

STATISTIK POTENSI KELURAHAN PROVINSI DKI JAKARTA

*SUBDISTRICT POTENTIAL STATISTICS
OF DKI JAKARTA PROVINCE*

VOLUME 12, 2025

2025



**BADAN PUSAT STATISTIK
PROVINSI DKI JAKARTA**

BPS-STATISTICS OF DKI JAKARTA PROVINCE

STATISTIK POTENSI KELURAHAN PROVINSI DKI JAKARTA

*SUBDISTRICT POTENTIAL STATISTICS
OF DKI JAKARTA PROVINCE*

VOLUME 12, 2025

2025



**BADAN PUSAT STATISTIK
PROVINSI DKI JAKARTA**
BPS-STATISTICS OF DKI JAKARTA PROVINCE

Statistik Potensi Kelurahan Provinsi DKI Jakarta 2025
Subdistrict Potential Statistics of DKI Jakarta Province 2025
Volume 12, 2025

Katalog/Catalogue: 110516.31

ISSN.

Nomor Publikasi/Publication Number: 31000.2239

Ukuran Buku/Book Size: 17,6 cm x 25 cm

Jumlah Halaman/Number of Pages: xxiv+153 Halaman/Pages

Penyusun Naskah/Manuscript Drafter

Badan Pusat Statistik Provinsi DKI Jakarta

BPS-Statistics of DKI Jakarta Province

Penyunting/Editor:

Badan Pusat Statistik Provinsi DKI Jakarta

BPS-Statistics of DKI Jakarta Province

Pembuat Kover/Cover Designer:

Badan Pusat Statistik Provinsi DKI Jakarta

BPS-Statistics of DKI Jakarta Province

Diterbitkan oleh/Published by:

© Badan Pusat Statistik Provinsi DKI Jakarta

BPS-Statistics Indonesia of DKI Jakarta Province

Sumber Ilustrasi/Illustration Source:

canva.com, freepik.com, unsplash.com

Dilarang mereproduksi dan/atau menggandakan sebagian atau seluruh isi buku ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari Badan Pusat Statistik.

It is prohibited reproduce and/or duplicate part or all of this book for commercial purpose without permission from BPS-Statistics Indonesia.



Tim Penyusun *Compilers*

Statistik Potensi Kelurahan Provinsi DKI Jakarta 2025
Subdistrict Potential Statistics of DKI Jakarta Province 2025
Volume 12, 2025

Pengarah/Director
Nurul Hasanudin

Penanggung Jawab/Person in Charge
Dwi Paramita Dewi

Penyunting/Editor
Dwi Paramita Dewi

Pengolah Data, Penulis Naskah, dan Penerjemah/Data Processors, Writers, and Translators
Kadek Swarniati

Penata Letak/Layouters
Kadek Swarniati



Kata Pengantar

Statistik Potensi Kelurahan Provinsi DKI Jakarta 2025 merupakan seri publikasi BPS Provinsi DKI Jakarta yang menyajikan hasil Pemutakhiran Data Perkembangan Desa 2025 (Potensi Desa 2025). Publikasi ini memuat gambaran wilayah administrasi pemerintah kelurahan di seluruh Kabupaten/Kota di Provinsi DKI Jakarta menurut potensi yang dimiliki kelurahan, ketersediaan infrastruktur di kelurahan, dan juga tantangan yang dihadapi di kelurahan.

Data dan informasi yang disajikan pada tingkat provinsi merupakan agregasi data tingkat kabupaten/kota. Sementara itu, publikasi serupa juga dibuat pada tingkat kabupaten/kota yang merupakan agregasi data tingkat kecamatan.

Publikasi ini diharapkan dapat menjadi bahan rujukan data dan informasi terkait infrastruktur dan potensi wilayah bagi para pengambil kebijakan pembangunan di provinsi DKI Jakarta, juga bagi peneliti, akademisi, serta pengguna data pada umumnya. Deteksi awal maupun fenomena ketersediaan infrastruktur maupun potensi antar wilayah terpotret dalam berbagai tabel yang disajikan pada publikasi ini.

Kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah ikut berpartisipasi dalam menyukseskan kegiatan Pemutakhiran Data Perkembangan Desa 2025 (Potensi Desa 2025) hingga tersusunnya publikasi ini. Kami mengharapkan kritik dan saran yang konstruktif dari para pengguna publikasi ini untuk perbaikan pada edisi di masa mendatang.

Jakarta, Desember 2025
Kepala Badan Pusat Statistik
Provinsi DKI Jakarta

Nurul Hasanudin



Preface

Subdistrict Potential Statistics of DKI Jakarta Province 2025 belongs to a series of publications by BPS-Statistics of DKI Jakarta Province which presents the results of the Village Development Data Update (Village Potential 2025). This publication contains an overview of the administrative characteristics of subdistricts across all municipalities in DKI Jakarta Province, including their respective potentials, the availability of infrastructure, and also the challenges faced at the subdistrict level.

Data and information presented at the provincial level are municipality-level data aggregation. Meanwhile, a similar publication at municipality level is also made which presents the aggregation of data at district level.

This publication is expected to be a reference for data and information on infrastructure and regional potential for policymakers involved in development planning within DKI Jakarta Province, as well as for researchers, academics, and the general data-using community. Early detection and phenomenon of infrastructure availability as well as potential among regions are captured in the various tables presented in this publication.

We would like to thank all parties who have participated in making the Village Development Data Update (Village Potential 2025) activity a success until this publication was compiled. We welcome constructive criticism and suggestions from users of this publication to improve future editions of this publication.

Jakarta, December 2025
Chief Statistician-BPS Statistics
Indonesia of DKI Jakarta
Province


Nurul Hasanudin





Ringkasan Eksekutif

Badan Pusat Statistik telah melaksanakan Pemutakhiran Data Perkembangan Desa 2025 (Potensi Desa 2025) pada bulan Juni 2025 secara sensus terhadap seluruh wilayah administrasi pemerintah terendah setingkat desa. Adapun wilayah administrasi setingkat desa yang dicakup di Potensi Desa (Podes) meliputi desa, kelurahan, nagari di Sumatera Barat, Unit Permukiman Transmigrasi (UPT), dan Satuan Permukiman Transmigrasi (SPT) yang masih dibina oleh kementerian terkait. Di Provinsi DKI Jakarta, seluruh wilayah administrasi berstatus kelurahan. Hasil Podes 2025 di Provinsi DKI Jakarta mencatat bahwa terdapat total 44 kecamatan dan 267 kelurahan. Dari jumlah tersebut, seluruh kelurahan berhasil dilakukan pendataan.

Podes 2025 di Provinsi DKI Jakarta mengumpulkan beragam informasi, baik yang bersifat potensi yang dimiliki kelurahan maupun informasi terkait kerawanan atau tantangan yang dihadapi kelurahan serta infrastruktur dasar di kelurahan. Informasi terkait potensi kelurahan, meliputi kependudukan, perumahan dan lingkungan hidup, bencana alam dan mitigasi bencana alam, pendidikan dan kesehatan, angkutan, komunikasi dan informasi, ekonomi, keamanan, keuangan dan aset desa, dan keterangan pemerintahan kelurahan.

Hasil Podes 2025 di Provinsi DKI Jakarta menunjukkan bahwa pada sebagian besar kelurahan, penduduknya didominasi oleh mereka yang bekerja di sektor jasa. Tercatat terdapat 245 kelurahan di mana sebagian besar masyarakat bekerja pada sektor tersebut. Selain itu, ada 16 kelurahan yang sebagian besar masyarakatnya bekerja di bidang industri, dan hanya ada 6 kelurahan yang sebagian besar masyarakatnya bekerja di bidang pertanian.

Podes 2025 menunjukkan potensi ekonomi yang dimiliki kelurahan, terdapat 91 kelurahan yang memiliki produk barang unggulan di Provinsi DKI Jakarta. Dalam mendukung bergeraknya perekonomian tidak hanya ditunjang oleh sarana fisik, namun dukungan fasilitas perkreditan dan fasilitas jaringan telekomunikasi menjadi penting di masa kini agar geliat pertumbuhan ekonomi lebih cepat. Hasil Podes 2025 menunjukkan terdapat 155 kelurahan yang warganya menerima Kredit Usaha Rakyat (KUR), ada 51 kelurahan yang warganya menerima Kredit Usaha Bersama (KUBE), ada 67 kelurahan yang warganya menerima Kredit Usaha Kecil (KUK). Fasilitas jaringan telekomunikasi yang dicakup di Podes yaitu keberadaan *Base Transceiver Station* (BTS), sinyal telepon seluler, dan sinyal internet telepon seluler/*handphone*. Seluruh kelurahan di Provinsi DKI Jakarta memiliki sinyal telepon selular, dengan 193 kelurahan kekuatan sinyalnya sangat kuat, dan 74 kelurahan kekuatan sinyalnya kuat.

Podes 2025 mencatat bahwa di Provinsi DKI Jakarta, terdapat 31 kelurahan yang terjadi pencemaran air di wilayahnya, terdapat 6 kelurahan yang terjadi pencemaran tanah di



wilayahnya, dan terdapat 30 kelurahan yang terjadi pencemaran udara di wilayahnya. Selain kejadian pencemaran, Podes 2025 menunjukkan kejadian bencana alam di wilayah kelurahan pada periode Januari 2024 sampai dengan Mei 2025. Pada periode tersebut, bencana banjir terjadi di 127 kelurahan, bencana tanah longsor terjadi di 14 kelurahan, bencana gelombang pasang laut terjadi di 7 kelurahan, dan bencana angin puyuh/puting beliung/topan terjadi di 7 kelurahan di Provinsi DKI Jakarta.

Podes 2025 juga menyajikan berbagai informasi terkait ketersediaan infrastruktur berbagai bidang. Pada bidang pendidikan, di jenjang sekolah dasar diketahui bahwa di Provinsi DKI Jakarta ada 2252 SD Negeri dan Swasta, dan ada 455 MI Negeri dan Swasta yang tersebar kelurahan. Pada jenjang sekolah menengah pertama, ada 1063 SMP Negeri dan Swasta dan 252 MTs Negeri dan Swasta yang tersebar di seluruh kelurahan. Pada jenjang sekolah menengah atas ada 510 SMA Negeri dan Swasta, ada 103 MA Negeri dan Swasta, dan ada 556 SMK Negeri dan Swasta yang tersebar di seluruh kelurahan. Pada jenjang akademi/ perguruan tinggi ada 18 akademi/perguruan tinggi negeri dan ada 238 akademi/perguruan tinggi swasta di DKI Jakarta. Pada bidang kesehatan, Podes 2025 menunjukkan terdapat 202 rumah sakit, dimana Kota Jakarta Selatan adalah wilayah kota dengan keberadaan rumah sakit terbanyak di DKI Jakarta yaitu 55 rumah sakit. Selain rumah sakit, jumlah fasilitas puskesmas di DKI Jakarta berdasarkan Podes 2025 sebanyak 3 puskesmas rawat inap dan 40 puskesmas tanpa rawat inap.

Pemerintah memprioritaskan pembangunan yang dimulai dari wilayah setingkat desa/ kelurahan dengan tujuan pemerataan ekonomi dan percepatan pengentasan kemiskinan. Hasil Pendataan Podes dapat digunakan sebagai bahan analisis kewilayahan terkait potensi ekonomi, sosial dan sarana/prasarana wilayah. Selain itu juga dapat digunakan dalam evaluasi program dan digunakan dalam penyusunan kebijakan/strategi berbasis kewilayahan.



Executive Summary

BPS-Statistics Indonesia has carried out data collection on Village Development Data Update 2025 (Village Potential 2025) in June 2025 in a census of all lowest government administrative areas at the village level. The village-level administrative areas covered by Podes include villages, subdistricts, nagari in West Sumatra, the Transmigration Settlement Unit (UPT), and Entity of Transmigration Settlement (SPT) which are still being fostered by the relevant ministries. In DKI Jakarta Province, all administrative units are classified as subdistrict (kelurahan). The results of Podes 2025 in DKI Jakarta recorded a total of 44 districts and 267 subdistrict, all of which were successfully enumerated. Podes 2025 collects a variety of information, both those are potential for subdistricts, information related to vulnerabilities or challenges faced by subdistricts, and basic infrastructure in subdistrict. Information related to the potential of the subdistrict, includes demography, settlement and environment, natural disasters and disaster mitigation, education and health, transportation, communication and information, economy, security, village finance and assets, and information on subdistrict government.

The results of Podes 2025 shows that in most subdistricts across DKI Jakarta, residents are predominantly employed in the service sector. There are 245 subdistricts where the majority of the population works in services. In addition, there are 16 subdistricts where most of the population work in industry, and there are only 6 subdistricts where most of the population work in the agriculture sector.

Podes 2025 shows the economic potential of subdistricts, there are 91 subdistricts that have superior goods products in DKI Jakarta. Economic growth is supported not only by physical facilities, but also by credit facilities and telecommunication networks, which together help boost economic growth. The results of Podes 2025 show that there are 155 subdistricts whose residents receive People's Business Credit (KUR), 51 subdistricts whose residents receive Joint Business Credit (KUBE), 67 subdistricts whose residents receive Small Business Credit (KUK) in DKI Jakarta. The telecommunication network facilities covered by the Podes include the presence of a Base Transceiver Station (BTS), cellular phone signals, and cellular/mobile phone internet signals. All subdistrictsn in DKI Jakarta have mobile phone signal coverage, with 193 subdistricts reporting very strong signal strength and 74 subdistricts reporting strong signal strength.

Podes 2025 records various environmental issues, including water pollution in 31 subdistricts, soil contamination in 6 subdistrictd and air pollution in 30 subdistricts in DKI Jakarta. Apart from



reporting pollution incidents, Podes 2025 also records natural disasters occurring in subdistricts during the period from January 2024 to May 2025. During this period, 127 subdistricts experienced flooding, 14 subdistricts experienced landslides, 7 subdistricts experienced coastal tidal waves, and 7 subdistricts experienced Typhoon Cyclone.

Podes 2025 also provides various information related to the availability of infrastructure in various fields. In the field of education, at the elementary school level, it is known that there are 2252 public and private elementary schools, and 455 public and private MI spread across subdistricts in DKI Jakarta. At the junior high school level, there are 1063 public and private junior high schools and 252 public and private MTs spread across subdistricts in DKI Jakarta. At the high school level, there are 510 public and private SMAs, 103 public and private MAs, and 556 public and private SMKs spread across subdistricts in DKI Jakarta. At the academy/college level, there are 18 public academies/universities and there are 238 private academies/universities in DKI Jakarta.

In the health sector, Podes 2025 shows 202 hospitals across DKI Jakarta, with Jakarta Selatan having the highest number at 55 hospitals. In addition to hospitals, the number of Community Health Center (Puskesmas) facilities in DKI Jakarta based on the Podes 2025 is 3 inpatient health centers and 40 health centers without inpatient services.

The government prioritises development starting from villages/subdistrict level with the aim of economic equality and accelerating poverty alleviation. The results of Podes 2025 can be used as material for regional analysis related to the economic, social and regional facilities/infrastructure potential. In addition, it can also be used in program evaluation and used in the formulation of regional-based policies/strategies.

Daftar Isi

Contents

Statistik Potensi Kelurahan Provinsi DKI Jakarta 2025 *Subdistrict Potential Statistics of DKI Jakarta Province 2025* Volume 12, 2025

	Halaman Pages
Kata Pengantar/ <i>Preface</i>	v
Ringkasan Eksekutif/ <i>Executive Summary</i>	vii
Daftar Isi/ <i>Contents</i>	xi
Daftar Tabel/ <i>List of Tables</i>	xiii
Daftar Lampiran/ <i>List of Appendices</i>	xix
Penjelasan Teknis Pemutakhiran Data Perkembangan Desa 2025 (Potensi Desa 2025)/ <i>Technical Notes of Village Development Data Update 2025 (Potential Village 2025)</i>	xxi
1. Keterangan Umum Kelurahan/ <i>General Information of the Subdistrict</i>	1
2. Perumahan dan Lingkungan/ <i>Settlement and Environment</i>	15
3. Pendidikan dan Kesehatan/ <i>Education and Health</i>	33
4. Angkutan, Komunikasi, dan Informasi/ <i>Transportation, Communication, and Information</i>	45
5. Sarana Ekonomi dan Industri/ <i>Economic and Industry Facilities</i>	59
6. Keuangan dan Aset Desa/ <i>Village Financial and Assets</i>	71
7. Keterangan Pemerintah Kelurahan/ <i>Subdistrict Government Information</i>	79
8. Bencana Alam dan Gangguan Keamanan/ <i>Natural Disaster and Security Disturbance</i>	91
9. Infrastruktur Pendidikan/ <i>Education Infrastructure</i>	111
10. Infrastruktur Kesehatan/ <i>Health Infrastructure</i>	121
11. Infrastruktur Ekonomi/ <i>Economy Infrastructure</i>	131
Daftar Pustaka/ <i>Bibliography</i>	141
Lampiran/ <i>Appendix</i>	143



Daftar Tabel

List of Tables

Tabel Tables	Halaman Pages
1. KETERANGAN UMUM KELURAHAN GENERAL INFORMATION OF THE SUBDISTRICT.....	1
1.1 Banyaknya Wilayah Administrasi Pemerintahan Menurut Kabupaten/Kota, 2025 <i>Number of Governmental Administrative Regions by Regency/Municipality, 2025.....</i>	8
1.2 Banyaknya Wilayah Administrasi Pemerintahan Terendah Menurut Kabupaten/Kota dan Klasifikasi Pemerintahan, 2025 <i>Number of the Lowest Governmental Administrative Regions by Regency/Municipality and Governmental Classification, 2025.....</i>	9
1.3 Banyaknya Kelurahan Menurut Kabupaten/Kota dan Lokasi Kelurahan Terhadap Kawasan Hutan, 2025 <i>Number of Subdistricts by Regency/Municipality and Subdistrict Location to Forest Area, 2025</i>	10
1.4 Banyaknya Kelurahan Menurut Kabupaten/Kota dan Lokasi Kelurahan Terhadap Laut, 2025 <i>Number of Subdistricts by Regency/Municipality and Location of Subdistrict Toward the Sea, 2025.....</i>	11
1.5 Banyaknya Kelurahan Menurut Kabupaten/Kota dan Sumber Penghasilan Utama Sebagian Besar Penduduk, 2025 <i>Number of Subdistricts by Regency/Municipality and Main Income Source of the Majority of Population, 2025.....</i>	12
1.6 Banyaknya Kelurahan yang Sebagian Besar Penduduknya Bekerja pada Sektor Pertanian Menurut Kabupaten/Kota dan Jenis Sub Sektor Utama, 2025 <i>Number of Subdistricts that the Majority of Population Work in Agricultural Sector By Regency/ Municipality and Main Type of Sub-Sector, 2025.....</i>	13
2. PERUMAHAN DAN LINGKUNGAN SETTLEMENT AND ENVIRONMENT.....	15
2.1 Banyaknya Kelurahan dengan Keberadaan Keluarga Pengguna Listrik dan Bukan Pengguna Listrik Menurut Kabupaten/Kota, 2025 <i>Number of Subdistricts with Presence of Family of Electric Consumer and Non Electric Consumer by Regency/Municipality, 2025.....</i>	22
2.2 Banyaknya Kelurahan Menurut Kabupaten/Kota dan Sumber Penerangan Jalan Utama Desa, 2025 <i>Number of Subdistricts by Regency/Municipality and Source of Lighting for the Main Village Road, 2025.....</i>	23
2.3 Banyaknya Kelurahan Menurut Kabupaten/Kota dan Jenis Bahan Bakar untuk Memasak yang Digunakan Sebagian Besar Keluarga, 2025 <i>Number of Subdistricts by Regency/Municipality and Type of Cooking Fuel Used by Majority of Families, 2025.....</i>	24
2.4 Banyaknya Kelurahan Menurut Kabupaten/Kota dan Keberadaan Agen/Penjual Bahan Bakar, 2025 <i>Number of Subdistricts by Regency/Municipality and Availability of Agent/Seller of Fuel, 2025</i>	26



Tabel Tables	Halaman Pages
2.5 Banyaknya Kelurahan Menurut Kabupaten/Kota dan Jenis Pencemaran Lingkungan Hidup, 2025 <i>Number of Subdistricts by Regency/Municipality and Type of Environmental Pollution, 2025..</i>	27
2.6 Banyaknya Kelurahan dengan Pencemaran Lingkungan Hidup Menurut Kabupaten/Kota dan Sumber Utama Pencemaran, 2025 <i>Number of Subdistricts with Environmental Pollution by Regency/Municipality and Main Source of Pollution, 2025.....</i>	28
2.7 Banyaknya Kelurahan Menurut Kabupaten/Kota dan Keberadaan Kegiatan Pengelolaan dan Pelestarian Lingkungan, 2025 <i>Number Subdistricts by Regency/Municipality and the Existence of Environmental Management and Conservation Activities, 2025.....</i>	29
2.8 Banyaknya Kelurahan Menurut Kabupaten/Kota dan Keberadaan Kegiatan Adaptasi dan Mitigasi Perubahan Iklim, 2025 <i>Number Subdistricts by Regency/Municipality and the Existence of Climate Change Adaptation and Mitigation Activities, 2025</i>	30
3. PENDIDIKAN DAN KESEHATAN EDUCATION AND HEALTH	33
3.1 Banyaknya Kelurahan dengan Keberadaan Sarana Pendidikan Menurut Kabupaten/Kota dan Jenis Sarana Pendidikan, 2025 <i>Number of Subdistricts with Availability Educational Facilities by Regency/Municipality and Type of Educational Facilities, 2025</i>	41
3.2 Banyaknya Kelurahan dengan Keberadaan Sarana Kesehatan Menurut Kabupaten/Kota dan Jenis Sarana Kesehatan, 2025 <i>Number of Subdistricts with by Availability of Health Facilities by Regency/Municipality and Type of Health Facilities, 2025</i>	42
3.3 Banyaknya Kelurahan dengan Kegiatan Posyandu dan Posbindu Menurut Kabupaten/Kota, 2025 <i>Number of Subdistricts with Integrated Health Post and Integrated Development Post Activities by Regency/Municipality, 2025.....</i>	44
4. ANGKUTAN, KOMUNIKASI, DAN INFORMASI TRANSPORTATION, COMMUNICATION, AND INFORMATION.....	45
4.1 Banyaknya Kelurahan Menurut Kabupaten/Kota dan Jenis Prasarana Transportasi, 2025 <i>Number of Subdistricts by Regency/Municipality and Type of Transportation Infrastructure, 2025.....</i>	50
4.2 Banyaknya Kelurahan Menurut Kabupaten/Kota dan Ketersediaan Angkutan Umum, 2025 <i>Number of Subdistricts by Regency/Municipality and Availability of Public Transportation, 2025.....</i>	51
4.3 Banyaknya Kelurahan Menurut Kabupaten/Kota dan Ketersediaan Angkutan Online, 2025 <i>Number of Subdistricts by Regency/Municipality and Availability of Online Transportation, 2025.....</i>	52
4.4 Banyaknya Kelurahan yang Menggunakan Prasarana Transportasi Darat atau Darat dan Air Menurut Kabupaten/Kota dan Jenis Permukaan Jalan Darat Terluas, 2025 <i>Number of Subdistricts Used Land or Land and Water Transportation Infrastructure by Regency/ Municipality and Type of the Widest Road Surface, 2025</i>	53
4.5 Banyaknya Kelurahan Menurut Kabupaten/Kota dan Keberadaan Base Transceiver Station (BTS), 2025 <i>Number of Subdistricts by Regency/Municipality and Existence of Base Transceiver Station (BTS), 2025</i>	54



Tabel Tables	Halaman Pages
4.6 Banyaknya Kelurahan Menurut Kabupaten/Kota dan Kekuatan Sinyal Telepon Seluler, 2025 <i>Number of Subdistricts by Regency/Municipality and the Strenght of Cellular Phone Signal, 2025.....</i>	55
4.7 Banyaknya Kelurahan Menurut Kabupaten/Kota dan Kekuatan Sinyal Internet, 2025 <i>Number of Subdistricts by Regency/Municipality and the Strenght of Internet Signal, 2025.....</i>	56
4.8 Banyaknya Kelurahan dengan Keberadaan Layanan Pos dan Ekspedisi Menurut Kabupaten/Kota, 2025 <i>Number of Subdistricts with the Existence of Postal and Expedition Services by Regency/Municipality, 2025</i>	57
5. SARANA EKONOMI DAN INDUSTRI ECONOMIC AND INDUSTRY FACILITIES	59
5.1 Banyaknya Kelurahan dengan Keberadaan Sarana Perdagangan dan Akomodasi Menurut Kabupaten/Kota, 2025 <i>Number of Subdistricts with the Availability of Trade and Accommodation Facilities by Regency/Municipality, 2025</i>	64
5.2 Banyaknya Kelurahan Menurut Kabupaten/Kota dan Keberadaan Kelompok Pertokoan dan Pasar, 2025 <i>Number of Subdistricts by Regency/Municipality and the Availability of Shopping Complexs and Markets, 2025.....</i>	65
5.3 Banyaknya Kelurahan Menurut Kabupaten/Kota dan Keberadaan Bank, 2025 <i>Number of Subdistricts by Regency/Municipality and the Availability of Bank, 2025.....</i>	66
5.4 Banyaknya Kelurahan dengan Keberadaan Koperasi Menurut Kabupaten/Kota, 2025 <i>Number of Subdistricts with the Availability of Cooperatives by Regency/Municipality, 2025...</i>	67
5.5 Banyaknya Kelurahan dengan Keberadaan Fasilitas Perkreditan Menurut Kabupaten/Kota, 2025 <i>Number of Subdistricts with the Availability of Credit Facilities by Regency/Municipality, 2025</i>	68
5.6 Banyaknya Kelurahan dengan Keberadaan Industri Mikro dan Kecil dan Sentra Industri Menurut Kabupaten/Kota, 2025 <i>Number of Subdistricts with the Availability of Micro and Small Industries and Industrial Centers by Regency/Municipality, 2025.....</i>	69
5.7 Banyaknya Kelurahan Menurut Kabupaten/Kota dan Keberadaan Produk Barang Unggulan, 2025 <i>Number of Subdistricts by Regency/Municipality and the Availability of Leading Products, 2025.....</i>	70
6. KEUANGAN DAN ASET DESA VILLAGE FINANCIAL AND ASSETS	71
6.1 Banyaknya Desa Menurut Kabupaten/Kota dan Keberadaan Sistem Informasi Desa, 2025 <i>Number of Villages by Regency/Municipality and Availability of Village Information System, 2025.....</i>	74
6.2 Banyaknya Desa Menurut Kabupaten/Kota dan Keberadaan Sistem Keuangan Desa, 2025 <i>Number of Villages by Regency/Municipality and Village Financial System, 2025.....</i>	75
6.3 Banyaknya Desa dengan Kepemilikan Badan Usaha dan Aset Desa Menurut Kabupaten/Kota, 2025 <i>Number of Villages with the Ownership of Enterprise and Village Assets by Regency/Municipality, 2025</i>	76
6.4 Banyaknya Desa Menurut Kabupaten/Kota dan Keberadaan Peraturan Desa Tahun 2024 <i>Number of Villages by Regency/Municipality and Availability of Village Regulation for 2024 .</i>	78
7. KETERANGAN PEMERINTAHAN DESA/KELURAHAN	

	VILLAGE/SUBDISTRICT GOVERNMENT INFORMATION.....	79
7.1	Banyaknya Kelurahan dengan Aparat Pemerintah Desa/Kelurahan Menurut Kabupaten/Kota, 2025 <i>Number of Subdistricts with the Existence of the Village/Subdistrict Government by Regency/Municipality, 2025.....</i>	83
7.2	Banyaknya Kelurahan dengan Kepala Desa/Lurah dan/atau Sekretaris Desa/Kelurahan Menurut Kabupaten/Kota dan Jenis Kelamin, 2025 <i>Number of Subdistricts with the Presence of Village/Subdistrict Head and Village/Subdistrict Secretary by Regency/Municipality and Sex, 2025.....</i>	84
7.3	Banyaknya Kelurahan dengan Kepala Desa/Lurah Menurut Kabupaten/Kota dan Kelompok Umur, 2025 <i>Number of Subdistricts with the Presence of Village/Subdistrict Head by Regency/Municipality and Age Group, 2025.....</i>	85
7.4	Banyaknya Kelurahan dengan Sekretaris Desa/Kelurahan Menurut Kabupaten/Kota dan Kelompok Umur, 2025 <i>Number of Subdistricts with the Presence of Village/Subdistrict Secretary by Regency/Municipality and Age Group, 2025.....</i>	86
7.5	Banyaknya Kelurahan dengan Kepala Desa/Lurah Menurut Kabupaten/Kota dan Tingkat Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan, 2025 <i>Number of Subdistricts with the Presence of Village/Subdistrict Head by Regency/Municipality and Education Attainment, 2025.....</i>	87
7.6	Banyaknya Kelurahan dengan Sekretaris Desa/Lurah Menurut Kabupaten/Kota dan Tingkat Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan, 2025 <i>Number of Subdistricts with the Presence of Village/Subdistrict Secretary by Regency/Municipality and Education Attainment, 2025.....</i>	89
8.	BENCANA ALAM DAN GANGGUAN KEAMANAN NATURAL DISASTER AND SECURITY DISTURBANCE.....	91
8.1	Banyaknya Kelurahan Menurut Kabupaten/Kota dan Jenis Upaya Antisipasi/Mitigasi Bencana Alam, 2025 <i>Number of Subdistricts by Regency/Municipality and the Type of Effort in Anticipation/Mitigation of Natural Disaster, 2025.....</i>	99
8.2	Banyaknya Kelurahan Menurut Kabupaten/Kota dan Jenis Bencana Alam, 2025 ¹ <i>Number of Subdistricts by Regency/Municipality and Type of Natural Disaster, 2025¹.....</i>	100
8.3	Banyaknya Kelurahan dengan Keberadaan Aktivitas yang Berpotensi Meningkatkan Emisi Gas Rumah Kaca Menurut Kabupaten/Kota, 2025 ¹ <i>Number of Subdistricts with Activities that Have the Potential to Increase Greenhouse Gas Emissions by Regency/Municipality, 2025¹.....</i>	102
8.4	Banyaknya Kelurahan dengan Keberadaan Kejadian yang Dirasakan Penduduk Akibat Perubahan Iklim Menurut Kabupaten/Kota, 2025 ¹ <i>Number of Subdistricts with Events Perceived by Residents as Resulting from Climate Change by Regency/Municipality, 2025¹.....</i>	104
8.5	Banyaknya Kelurahan Menurut Kabupaten/Kota dan Keberadaan Kejadian Perkelahian Massal, 2025 <i>Number of Subdistricts by Regency/Municipality and the Occurrence of Mass Fight, 2025.....</i>	106
8.6	Banyaknya Kelurahan dengan Kejadian Perkelahian Massal Menurut Kabupaten/Kota dan Keberadaan Korban Meninggal dan Luka-Luka, 2025 <i>Number of Subdistricts with Incidents of Mass Fight by Regency/Municipality and the Presence of Fatalities and Injuries, 2025.....</i>	107



**Tabel
Tables**

**Halaman
Pages**

8.7	Banyaknya Kelurahan dengan Kejadian Perkelahian Massal Menurut Kabupaten/Kota dan Inisiator Penyelesaiannya, 2025 <i>Number of Subdistricts with Incidents of Mass Fight by Regency/Municipality and Initiator of the Resolution, 2025</i>	108
8.8	Banyaknya Kelurahan Menurut Kabupaten/Kota dan Jenis Upaya Warga Menjaga Keamanan Lingkungan, 2025 <i>Number of Subdistricts by Regency/Municipality and Type of Citizen's Effort to Secure Community, 2025</i>	109
9.	INFRASTRUKTUR PENDIDIKAN EDUCATION INFRASTRUCTURE.....	111
9.1	Banyaknya SD/MI Negeri dan Swasta Menurut Kabupaten/Kota, 2025 <i>Number of Public and Private Elementary Schools by Regency/Municipality, 2025.....</i>	115
9.2	Banyaknya SMP/MTs Negeri dan Swasta Menurut Kabupaten/Kota, 2025 <i>Number of Public and Private Junior High Schools by Regency/Municipality, 2025</i>	116
9.3	Banyaknya SMA/MA Negeri dan Swasta Menurut Kabupaten/Kota, 2025 <i>Number of Public and Private Senior High Schools by Regency/Municipality, 2025.....</i>	117
9.4	Banyaknya SMK Negeri dan Swasta Menurut Kabupaten/Kota, 2025 <i>Number of Public and Private Vocational Schools by Regency/Municipality, 2025.....</i>	118
9.5	Banyaknya Akademi/Perguruan Tinggi Negeri dan Swasta Menurut Kabupaten/Kota, 2025 <i>Number of Public and Private Academy/University by Regency/Municipality, 2025</i>	119
10.	INFRASTRUKTUR KESEHATAN HEALTH INFRASTRUCTURE.....	121
10.1	Banyaknya Rumah Sakit, Klinik Utama, dan Balai Kesehatan Menurut Kabupaten/Kota, 2025 <i>Number of Hospitals, Principal Clinics, and Health Centers by Regency/Municipality, 2025..</i>	127
10.2	Banyaknya Puskesmas Menurut Kabupaten/Kota, 2025 <i>Number of Public Health Center by Regency/Municipality, 2025.....</i>	128
10.3	Banyaknya Klinik Pratama, Tempat Praktik Dokter, Tempat Praktik Bidan, dan Apotek Menurut Kabupaten/Kota, 2025 <i>Number of Primary Clinics, Independent Physician Practices, Independent Midwife Practices, and Pharmacies by Regency/Municipality, 2025</i>	129
11.	INFRASTRUKTUR EKONOMI ECONOMY INFRASTRUCTURE.....	131
11.1	Banyaknya Kelompok Pertokoan dan Pasar Menurut Kabupaten/Kota, 2025 <i>Number of Shopping Complex And Markets by Regency/Municipality, 2025</i>	136
11.2	Banyaknya Sarana Perdagangan Menurut Kabupaten/Kota, 2025 <i>Number of Trading Facilities by Regency/Municipality, 2025</i>	137
11.3	Banyaknya Sarana Akomodasi Menurut Kabupaten/Kota, 2025 <i>Number of Acomodation Facilities by Regency/Municipality, 2025.....</i>	138
11.4	Banyaknya Lembaga Keuangan Bank Menurut Kabupaten/Kota, 2025 <i>Number of Bank Facilities by Regency/Municipality, 2025.....</i>	139
11.5	Banyaknya Lembaga Keuangan Koperasi Menurut Kabupaten/Kota, 2025 <i>Number of Cooperative by Regency/Municipality, 2025.....</i>	140



Daftar Lampiran

List of Appendices

Lampiran Appendices	Halaman Pages
1. Realisasi Cakupan Pemutakhiran Data Perkembangan Desa 2025 (Potensi Desa 2025) Menurut Kabupaten/Kota ¹ <i>Realisation of the Coverage of Village Development Data Update 2025 (Village Potential 2025) by Regency/Municipality</i>	145
2. Kuesioner Pemutakhiran Data Perkembangan Desa 2025 (Potensi Desa 2025) <i>Questionnaire of Village Development Data Update 2025 (Village Potential 2025)</i>	146

<https://jakarta.bps.go.id>



Penjelasan Teknis Pemutakhiran Data Perkembangan Desa 2025 (Potensi Desa 2025)

1. Pendataan Podes telah dilaksanakan sekitar 19 kali sejak 1976. Dalam 16 tahun terakhir (2008 - 2024) dilaksanakan dua tahun menjelang sensus. Mulai tahun 2019, pada tahun-tahun yang tidak ada Pendataan Podes, dilakukan Updating Podes (Pemutakhiran Data Perkembangan Desa)
2. Pemutakhiran Data Perkembangan Desa 2025 (Potensi Desa 2025) dilaksanakan dengan tujuan sebagai berikut: (1) sebagai sarana untuk *Updating Master File Desa* (MFD); (2) menyediakan data tentang keberadaan dan perkembangan potensi yang dimiliki desa/kelurahan yang meliputi, sosial, ekonomi, sarana, dan prasarana wilayah; (3) menyediakan data bagi keperluan klasifikasi tipologi desa; (4) menyediakan data bagi keperluan penyusunan Indeks Kesulitan Geografis sebagai salah satu alokasi dana desa, (5) sebagai sumber data pemutakhiran peta wilayah kerja statistik; (6) menyediakan data pokok bagi penyusunan statistik wilayah kecil (*small area statistics*); (7) menyediakan data bagi penyusunan berbagai analisis seperti identifikasi dan penentuan desa tertinggal, variabel konteks dalam PMT, identifikasi desa rawan bencana,

Technical Notes on Village Development Data Update 2025 (Village Potential 2025)

1. *Village Potential Census (Podes) has been carried out approximately 19 times since 1976. In the last 16 years, (2008-2024), Village Potential Census has been carried out every two years prior to census. Starting in 2019, in years when there is no Village Potential Census, Podes updating (Village Development Data Update) is carried out.*
2. *The Village Development Data Update 2025 (Village Potential 2025) is carried out to achieve the following objectives: (1) to serve as data source to update the BPS "Master File Desa" (Village Master File); (2) to provide the data on the existence and development of the potential of villages/subdistricts include social, economy, and facilities and infrastructures aspect; (3) to provide the data for village classification typology; (4) to provide data for the preparation of the Geographical Difficulty Index, which is used as one of the bases for village fund allocation; (5) to serve as a data source for updating statistical area map; (6) to provide main data for compilation of small area statistics; (7) to provide data for compilation of various analyses such as identification and determining disadvantaged village, context variables in the PMT, identification of disaster prone village, and identification of the*



dan identifikasi desa yang mempunyai kesulitan geografis; (8) menyediakan data bagi penghitungan indikator-indikator pembangunan/kemajuan desa.

3. Podes 2025 dilaksanakan di seluruh wilayah administrasi pemerintahan setingkat desa meliputi desa, kelurahan, nagari, Unit Permukiman Transmigrasi (UPT), dan Satuan Permukiman Transmigrasi (SPT) yang masih dibina oleh kementerian terkait di seluruh Indonesia.
4. Suatu wilayah administrasi pemerintahan ditetapkan sebagai target lokasi pendataan jika wilayah tersebut telah dinyatakan sebagai wilayah yang definitif dan operasional dengan kriteria sebagai berikut: (1) memiliki batas wilayah yang jelas, (2) memiliki penduduk yang menetap di wilayahnya, dan (3) memiliki pemerintahan yang sah dan berdaulat.
5. Instrumen Podes 2025 yang digunakan sebanyak dua jenis kuesioner, yaitu: PODES2025-DESA dan PODES2025-2T. Sementara itu, referensi waktu bagi setiap data merujuk pada periode pencacahan yaitu Juni 2025, kecuali bagi beberapa data tertentu yang dinyatakan memiliki referensi waktu yang berbeda misalnya satu atau tiga tahun sebelum periode pencacahan.
6. Pengumpulan data Podes 2025 dilakukan melalui wawancara

village with geographical difficulties; (8) to provide the data used for calculating the village development/progress index.

3. *Podes 2025 is implemented in all administrative region equivalent to village, including villages, sub-districts, nagari, Transmigration Settlement Units (UPT), and Entity of Transmigration Settlement (SPT) that are still under the guidance of the relevant ministries throughout Indonesia.*
4. *An administrative area is designated as a target location for data collection if it has been declared as a definitive and operational area, based on the following criteria: (1) having jurisdiction with clear boundaries, (2) has a population residing permanently in its territory, and (3) has a legitimate and sovereign government.*
5. *The instruments of Podes 2025 consist of two types of questionnaires, namely: PODES2025-DESA and PODES2025-2T. Meanwhile, the time reference for each data refers to the enumeration period, which is June 2025, except for certain data that are specified to have different reference periods, such as one or three years prior to the enumeration period.*
6. *Data collection of Podes 2025 carried out through direct interviews by trained*



langsung oleh petugas terlatih dengan narasumber yang relevan di wilayah pencacahan serta penelusuran dokumen terkait. Petugas wawancara adalah aparatur ataupun mitra kerja BPS kabupaten/kota yang telah dinyatakan lulus pelatihan pendataan Podes 2025. Sementara itu, narasumber yang dipilih adalah beberapa orang yang memiliki pengetahuan, kewenangan, dan tanggung jawab terhadap wilayah target pencacahan. Kemajuan pendataan dilaporkan dan dipantau secara langsung melalui *web dashboard*.

7. Pengolahan data Podes 2025 secara umum sudah dilakukan secara otomatis melalui penggunaan CAPI dalam pencacahan, sehingga input data dapat dilakukan secara bersamaan dengan proses wawancara. Selain berfungsi sebagai media input data, CAPI juga merupakan media pertama yang digunakan untuk melakukan evaluasi data dengan rule validasi yang telah terpasang dalam aplikasi. Dalam rangka menjamin kualitas data, pelaksanaan Podes 2025 menggunakan dashboard Podes yang dilengkapi dengan menu *query tools* dan tabulasi untuk mengevaluasi data hasil Podes 2025. Selain itu, penjaminan kualitas data juga dilakukan melalui pemeriksaan data secara bertingkat di tingkat kabupaten, provinsi, sampai dengan tingkat BPS Pusat.

enumerators with relevant respondents in the enumeration area and review of relevant documents. The enumerators are BPS regency/city employees or partners that have passed Podes enumeration training. Meanwhile, the selected respondents are several people who have the knowledge, authority, and responsibility towards the target area of enumeration. The progress of data collection is reported and monitored directly through and are presented in real time on the dashboard web.

7. *The processing of Podes 2025 data has generally been carried out automatically through the use of CAPI in the enumeration so that data input can be carried out simultaneously with the interview process. In addition to functioning as a data input media, CAPI is also the first media used for evaluating data through validation rules installed in the application. To ensure data quality, the implementation of Podes 2025 utilizes the Podes Dashboard, which is equipped with query tools and tabulation features to evaluate the Podes 2025 results. In addition, data quality assurance is also carried out through data checks at various levels at the regency, provincial, up to the BPS RI level.*



8. Publikasi Statistik Potensi Desa Indonesia 2025 dibuat dalam tiga cakupan data yaitu publikasi nasional (dirinci menurut provinsi), publikasi provinsi (dirinci menurut kabupaten/kota), dan publikasi kabupaten/kota (dirinci menurut kecamatan).

9. Pada pelaksanaan Pemutakhiran Data Perkembangan Desa 2025 (Podes 2025) di Provinsi DKI Jakarta, seluruh kelurahan (267 kelurahan) berhasil dicacah. Cakupan desa/kelurahan yang berhasil dicacah menurut kabupaten/kota disajikan pada Lampiran 1.

8. *The 2025 Indonesia Village Potential Statistics are presented in three levels of data coverage: a national publication (disaggregated by province), provincial publications (disaggregated by regency/municipality), and regency/municipality publications (disaggregated by district).*

9. *In the implementation of the 2025 Village Development Data Updating (Podes 2025) in DKI Jakarta Province, all subdistricts (267 subdistricts) were successfully enumerated. The coverage of subdistricts successfully enumerated by regency/municipality is presented in Appendix 1.*

<https://jakarta.bps.go.id>

Keterangan Umum Kelurahan, Kependudukan, dan Ketenagakerjaan

General Information on Subdistrict, Population and Employment



94,01 %

Bukan Kelurahan Tepi Laut

Non-Coastal Area

5,99 %

kelurahan Tepi Laut

Coastal Area

100 %

Kelurahan di luar hutan

Outside the forest



tidak ada

Kelurahan di dalam hutan

Inside the forest

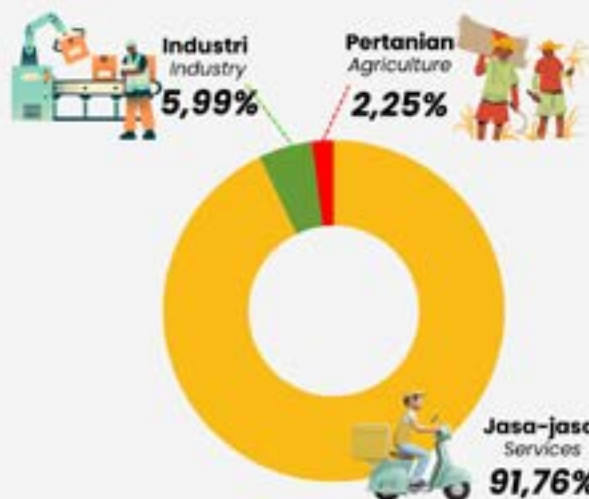
tidak ada

Kelurahan di tepi/sekitar hutan

Around the forest

Kelurahan dengan Sumber Penghasilan Utama sebagian besar Penduduk

Subdistrict by the Main Income Source of Majority Population



Kelurahan dengan Penghasilan Utama di Sektor Pertanian Menurut Sub Sektor

Subdistrict with the Agricultural Main Income by Sub-Sector

Tanaman Pangan
Food Crops

0



Hortikultura
Horticultural Crops

0



Perkebunan
Estate Crops

0



Perikanan /Fishery

5



Jasa Pertanian
Agricultural Services

0





Penjelasan Teknis Keterangan Umum Desa

1. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/ atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia (Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa).
2. Kelurahan adalah pembagian wilayah administrasi di Indonesia di bawah kecamatan. Kelurahan dipimpin oleh seorang kepala kelurahan yang disebut lurah selaku perangkat kecamatan dan bertanggungjawab kepada camat. Lurah diangkat oleh bupati/walikota atas usul sekretaris daerah dari pegawai negeri sipil yang memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan (Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah)
3. Unit Permukiman Transmigrasi (UPT) adalah satuan permukiman transmigrasi yang berfungsi sebagai tempat tinggal dan tempat usaha transmigran yang sejak awal

Technical Notes General Information of the Village

1. Village is village and custom village or that is called by other terms, hereinafter referred to as the village is the unity of the legal community who have territorial boundaries that are authorized to regulate and manage government affairs, the interest of local communities based on community initiatives, the origin and local customs that are acknowledged and respected within the unitary System of Government Republic of Indonesia (Law No. 6 Year 2014 about Village).
2. Subdistrict is division of administrative areas in Indonesia under the district. Subdistrict is led by a head of subdistrict (Lurah) as an apparatus of district and responsible to the district head. The Lurah inaugurated by regent/mayor head as suggestion by region secretary from civil servants who qualified according regulation (Law No. 23 Year 2014 about Local Governmental).
3. Transmigration Settlement Unit (UPT) is entity of transmigration settlement that serves as a residence and place of business for migrants that is planned to form a village or join the local village. Organizational of transmigration



direncanakan untuk membentuk suatu desa atau bergabung dengan desa setempat. Organisasi UPT merupakan kelembagaan yang bersifat sementara dibentuk sekurang-kurangnya 2 bulan sebelum transmigran ditempatkan dan paling lama 5 tahun (Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi No. PER.22/MEN/IX/2007).

settlement unit is a temporary institution established for at least 2 months before the migrants are placed and maximum of 5 years (Regulation of the Minister of Manpower and Transmigration No. PER.22/MEN/IX/2007).

4. Satuan Permukiman Transmigrasi (SPT) adalah satuan permukiman potensial yang ditetapkan sebagai permukiman transmigrasi untuk mendukung pusat pertumbuhan ekonomi pada wilayah yang sudah ada atau sedang berkembang sesuai dengan rencana tata ruang wilayah (Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 246 Tahun 2003 tentang Prosedur dan Kriteria Penyiapan Lokasi Permukiman Transmigrasi).
5. Nagari adalah kesatuan masyarakat hukum adat yang memiliki batas-batas wilayah tertentu, dan berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan filosofi adat Minangkabau (Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah) dan atau berdasarkan asal-usul dan adat-istiadat setempat dalam wilayah Provinsi Sumatera Barat (Peraturan Daerah provinsi Sumatera Barat No. 7 Tahun 2018 tentang Nagari). Catatan: nagari dapat dilihat datanya pada publikasi nasional dan publikasi Provinsi Sumatera Barat.

4. *Entity of Transmigration Settlement (SPT) is potential settlement unit that designed as transmigration settlements to support the economic growth centers in the region that already exist or are being developed accordance with the spatial plans (Decision of the Ministry of Manpower and Transmigration of the Republic of Indonesia No. 246 Year 2003 concerning Procedures and Criteria for Preparation of Settlement Location Transmigrasi).*
5. *Nagari is customary law community units that have certain territorial boundaries, and are authorized to regulate and manage the interests of its own local community based on the Minangkabau traditional philosophy (Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah) or based on local origins and customs in the West Sumatra Province (Peraturan Daerah provinsi Sumatera Barat No. 7 Tahun 2018 tentang Nagari). Note: the data of nagari is found in the national publications and the publication of Province of Sumatra Barat.*



6. Hutan adalah suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumber daya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam persekutuan alam lingkungannya yang satu dengan lainnya tidak dapat dipisahkan (Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999).
7. Lokasi Desa Terhadap Kawasan Hutan/ Hutan, dibedakan menjadi:
 - a. Di Dalam Kawasan Hutan adalah desa/kelurahan yang seluruh wilayahnya terletak di tengah/ dikelilingi hutan.
 - b. Di Tepi/Sekitar Kawasan Hutan adalah desa/kelurahan yang wilayahnya berbatasan langsung dengan hutan, atau sebagian wilayah desa tersebut berada di dalam hutan.
 - c. Di Luar Kawasan Hutan adalah desa/kelurahan yang seluruh wilayahnya tidak berbatasan langsung dengan hutan.
8. Desa Tepi Laut adalah desa yang sebagian atau seluruh wilayahnya bersinggungan langsung dengan laut, baik berupa pantai maupun tebing karang.
9. Sumber Penghasilan Utama Sebagian Besar Penduduk adalah lapangan usaha sebagian besar penduduk desa/ kelurahan memperoleh penghasilan/ pendapatan. Sumber penghasilan penduduk dibedakan kedalam tiga kategori kegiatan ekonomi antara lain:
6. *Forest is the unit of ecosystem in the form of lands comprising biological resources that are dominated by trees in their natural environment that can not be separated (Law No. 41 Year 1999).*
7. *Village Location of the Forest Area, divided into:*
 - a. *Inside the Forest Area is the village/subdistrict whose all territory is located in the middle or surrounded by forests.*
 - b. *Around the Forest Area is the village/subdistrict whose territory is adjacent to forest areas or parts of villages located in forest.*
 - c. *Outside the Forest Area is the village/subdistrict whose territory is not directly adjacent to the forest.*
8. *Coastal Village is a village which some areas are intersect/directly adjacent to the sea, either gently sloping/flat beach or cliffs/reef.*
9. *Main Income Source of the Majority of Population is field of business where most residents earn revenue/income, main income population are divided into three categories of economic activities, including:*



- a. Pertanian, mencakup semua kegiatan ekonomi/lapangan usaha, yang meliputi sektor pertanian, kehutanan dan perikanan.
- b. Industri meliputi pertambangan dan penggalian, manufaktur, konstruksi dan utilitas publik (listrik, gas dan air), sesuai dengan kategori B sampai F ISIC 4, yang meliputi sektor Pertambangan dan penggalian, Industri Pengolahan, Pengadaan Listrik dan Gas, Pengadaan air, pengelolaan sampah, limbah dan daur ulang, dan Konstruksi.
- c. Jasa meliputi perdagangan grosir dan eceran, restoran dan hotel, transportasi, penyimpanan dan komunikasi, keuangan, asuransi, real estat dan layanan bisnis, dan layanan masyarakat, sosial dan pribadi.

10. Jenis Komoditi/Sub Sektor Pertanian antara lain meliputi:

- a. Tanaman pangan dikelompokkan berdasarkan umur, yaitu tanaman semusim dan tanaman tahunan.
- b. Tanaman hortikultura lebih sering mengarah pada produk-produk yang bisa dikonsumsi atau tanaman kebun, seperti buah-buahan, sayuran, dan tanaman hias.
- c. Perkebunan dikelompokkan berdasarkan umur, yaitu tanaman semusim dan tanaman tahunan.

a. *Agriculture, includes all economic activities/business fields, which include the agricultural, forestry and fisheries sectors.*

b. *Industry includes mining and quarrying, manufacturing, construction, and public utilities (electricity, gas, and water), according to categories B to F ISIC 4, which includes the Mining and Quarrying, Manufacturing, Electricity and Gas Supply, Water Supply, Waste Management, Waste and Recycling, and Construction sectors.*

c. *Services include wholesale and retail trade, restaurants and hotels, transportation, storage and communications, finance, insurance, real estate and business services, and community, social and personal services.*

10. *The Type of Commodity/Agriculture Subsector,*

- a. *Food crops are grouped based on age, namely annual crops and perennial crops.*
- b. *Horticultural crops more often refer to edible products or garden crops, such as fruits, vegetables, and ornamental plants.*
- c. *Plantations are grouped based on age, namely annual plants and perennial plants.*



- d. Kehutanan mencakup penebangan pohon untuk diambil kayunya serta pengambilan dan pemungutan hasil hutan selain kayu yang tumbuh liar.
- e. Perikanan mencakup penangkapan dan budidaya ikan, jenis crustacea (seperti udang, kepiting) moluska, dan biota air lainnya di laut, air payau dan air tawar. Tidak termasuk pemancingan untuk rekreasi.
- f. Peternakan mencakup budidaya dan pembibitan hewan ternak, unggas, serangga, binatang melata/reptil, cacing, hewan peliharaan.
- g. Jasa penunjang pertanian dan pasca panen mencakup kegiatan penunjang dalam memproduksi hasil pertanian dan kegiatan sejenis untuk pertanian yang tidak dilakukan untuk keperluan produksi atas dasar balas jasa (fee) atau kontrak, termasuk jasa pemanenan dan pasca panen, serta menyiapkan hasil pertanian untuk dijual ke pasar.
- d. *Forestry includes the felling of trees for their wood as well as the collection and harvesting of forest products other than wild wood.*
- e. *Fisheries include the capture and cultivation of fish, crustaceans (such as shrimp and crabs), mollusks, and other aquatic life in marine, brackish, and freshwater environments. Recreational fishing is excluded.*
- f. *Animal husbandry includes the cultivation and breeding of livestock, poultry, insects, reptiles, worms, pets.*
- g. *Agricultural and post-harvest support services include supporting activities in producing agricultural products and similar activities for agriculture that are not carried out for production purposes on a fee or contract basis, including harvesting and post-harvest services, and preparing agricultural products for sale to the market.*



Tabel 1.1 **Banyaknya Wilayah Administrasi Pemerintahan Menurut Kabupaten/Kota, 2025**
Table 1.1 **Number of Governmental Administrative Regions by Regency/Municipality, 2025**

Kabupaten/Kota Regency/Municipality	Kecamatan District	Desa/Kelurahan Village/Subdistrict
(1)	(2)	(3)
Kepulauan Seribu	2	6
Kota Jakarta Selatan	10	65
Kota Jakarta Timur	10	65
Kota Jakarta Pusat	8	44
Kota Jakarta Barat	8	56
Kota Jakarta Utara	6	31
DKI Jakarta	44	267



Tabel 1.2 Banyaknya Wilayah Administrasi Pemerintahan Terendah Menurut Kabupaten/Kota dan Klasifikasi Pemerintahan, 2025
Number of the Lowest Governmental Administrative Regions by Regency/Municipality and Governmental Classification, 2025

Kabupaten/Kota Regency/Municipality	Desa Village	Kelurahan Subdistrict	UPT/SPT Transmigration Settlement Unit/Entity of Transmigration Settlement	Jumlah Total
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Kepulauan Seribu	-	6	-	6
Kota Jakarta Selatan	-	65	-	65
Kota Jakarta Timur	-	65	-	65
Kota Jakarta Pusat	-	44	-	44
Kota Jakarta Barat	-	56	-	56
Kota Jakarta Utara	-	31	-	31
DKI Jakarta	-	267	-	267

**Tabel**
Table

1.3

Banyaknya Kelurahan Menurut Kabupaten/Kota dan Lokasi Desa Terhadap Kawasan Hutan, 2025***Number of Subdistricts by Regency/Municipality and Village Location to Forest Area, 2025***

Kabupaten/Kota <i>Regency/Municipality</i>	Dalam Hutan <i>Inside Forest Area</i>	Tepi/Sekitar Hutan <i>Edge/Around Forest Area</i>	Luar Hutan <i>Outside Forest Area</i>	Jumlah <i>Total</i>
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Kepulauan Seribu	-	-	6	6
Kota Jakarta Selatan	-	-	65	65
Kota Jakarta Timur	-	-	65	65
Kota Jakarta Pusat	-	-	44	44
Kota Jakarta Barat	-	-	56	56
Kota Jakarta Utara	-	-	31	31
DKI Jakarta	-	-	267	267



Tabel 1.4 Banyaknya Kelurahan Menurut Kabupaten/Kota dan Lokasi Desa Terhadap Laut, 2025
Table *Number of Subdistricts by Regency/Municipality and Location of Village Toward the Sea, 2025*

Kabupaten/Kota Regency/Municipality	Tepi Laut Coastal Area	Bukan Tepi Laut Non-Coastal Area	Jumlah Total
(1)	(2)	(3)	(4)
Kepulauan Seribu	6	-	6
Kota Jakarta Selatan	-	65	65
Kota Jakarta Timur	-	65	65
Kota Jakarta Pusat	-	44	44
Kota Jakarta Barat	-	56	56
Kota Jakarta Utara	10	21	31
DKI Jakarta	16	251	267

**Tabel**
Table

1.5

Banyaknya Kelurahan Menurut Kabupaten/Kota dan Sumber Penghasilan Utama Sebagian Besar Penduduk, 2025***Number of Subdistricts by Regency/Municipality and Main Income Source of the Majority of Population, 2025***

Kabupaten/Kota Regency/Municipality	Pertanian Agriculture	Industri Manufacturing	Jasa Service	Jumlah Total
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Kepulauan Seribu	6	-	-	6
Kota Jakarta Selatan	-	-	65	65
Kota Jakarta Timur	-	5	60	65
Kota Jakarta Pusat	-	1	43	44
Kota Jakarta Barat	-	7	49	56
Kota Jakarta Utara	-	3	28	31
DKI Jakarta	6	16	245	267

<https://jakarta.bps.go.id>



Tabel
Table

1.6

Banyaknya Kelurahan yang Sebagian Besar Penduduknya Bekerja pada Sektor Pertanian Menurut Kabupaten/Kota dan Jenis Sub Sektor Utama, 2025
Number of Subdistricts that the Majority of Population Work in Agricultural Sector By Regency/Municipality and Main Type of Sub-Sector, 2025

Kabupaten/Kota Regency/Municipality	Tanaman Pangan Food Crops	Tanaman Perkebunan Estate Crops	Tanaman Hortikultura Horticulture Crops	Peternakan Livestock	Perikanan Fishery	Kehutanan Forestry	Jasa Pertanian Agricultural Service	Jumlah Total
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
Kepulauan Seribu	-	-	-	-	6	-	-	6
Kota Jakarta Selatan	-	-	-	-	-	-	-	-
Kota Jakarta Timur	-	-	-	-	-	-	-	-
Kota Jakarta Pusat	-	-	-	-	-	-	-	-
Kota Jakarta Barat	-	-	-	-	-	-	-	-
Kota Jakarta Utara	-	-	-	-	-	-	-	-
DKI Jakarta	-	-	-	-	6	-	-	6

Jumlah kelurahan yang **terdapat penerangan** di jalan utama kelurahan sebanyak **267** kelurahan (seluruh kelurahan).

The number of subdistricts **that have lighting** on the main subdistrict roads is **267** subdistricts.

Tidak terdapat kelurahan yang **tidak memiliki penerangan** di jalan utama kelurahan.

There are no subdistricts **without lighting** in the main subdistrict roads

3 Jenis Bahan Bakar untuk Memasak yang Paling Banyak Digunakan oleh Sebagian Besar Keluarga di Kelurahan

3 Types of Cooking Fuel Most Commonly Used by Most Families in Subdistricts



1 Elpiji 12 kg/12kg-LPG
13 kelurahan
subdistricts

Elpiji 3 kg/12kg-LPG
254 kelurahan
subdistricts



2

Pencemaran Lingkungan Hidup Environmental Pollution

Pencemaran Air Water Pollution



31 kelurahan
subdistricts

Pencemaran Tanah Land Pollution



6 kelurahan
subdistricts

Pencemaran Udara Air Pollution



30 kelurahan
subdistricts



Penjelasan Teknis Perumahan dan Lingkungan

1. Keluarga Pengguna Listrik PLN (Perusahaan Listrik Negara) adalah keluarga pengguna/pelanggan listrik yang disalurkan oleh PLN dengan atau tanpa meteran resmi dari PLN.
2. Keluarga Pengguna Listrik Non-PLN adalah keluarga pengguna/pelanggan listrik selain PLN, misalnya diesel/generator, listrik diusahakan oleh pemerintah daerah, swasta, atau listrik swadaya masyarakat.
3. Keluarga Bukan Pengguna Listrik adalah keluarga yang tidak menggunakan listrik sebagai sumber energi untuk penerangan rumah.
4. Jalan Utama Desa adalah jalan yang dianggap oleh sebagian besar penduduk desa/kelurahan setempat sebagai jalan yang paling penting atau paling sering digunakan untuk arus transportasi dari/menjujur kantor camat terdekat.
5. Sumber Penerangan Jalan Utama Desa adalah jenis penerangan dan sumber pembiayaan penerangan yang ada di jalan utama desa. Dikelompokkan menjadi: listrik diusahakan oleh pemerintah, listrik non-pemerintah, dan non-listrik.

Technical Notes Settlement and Environment

1. *Family of PLN (State Electricity Company) Electric Consumer is user family/customer of electricity supplied by State Electricity Company with or without official meter.*
2. *Family of Electric Consumer of NonState Electricity Company (Non-PLN) is user family/customer of electricity supplied besides by National Electricity Company, eg diesel/ generator, power cultivated by the local government, private, and electricity based on community.*
3. *Non-Electricity Consuming Family is family that do not use electricity as a source of energy for home lighting.*
4. *The Main Village Road is a road that is considered by most of the local village/subdistrict residents as the most important or most frequently used road for transportation from/to the nearest subdistrict office.*
5. *The Source of Lighting for the Main Village Road is the type of lighting and funding sources for lighting on the village's main roads. They are grouped into: government-provided electricity, non-government-provided electricity, and non-electricity.*



6. Bahan Bakar adalah jenis bahan yang digunakan untuk memasak oleh mayoritas keluarga di desa/kelurahan.
 7. Pencemaran Lingkungan Hidup (Polusi) adalah masuk atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan atau komponen lain ke dalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia sehingga melampaui baku mutu lingkungan hidup yang telah ditetapkan.
 8. Pelestarian Fungsi Lingkungan Hidup adalah upaya memelihara kelangsungan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup melalui serangkaian kegiatan yang sistematis dan terpadu, seperti perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, dan penegakan hukum (Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup)
 9. Mitigasi Perubahan Iklim adalah usaha pengendalian untuk mengurangi risiko akibat perubahan iklim melalui kegiatan yang dapat menurunkan emisi atau meningkatkan penyerapan GRK dan penyimpanan/penguatan cadangan karbon dari berbagai sumber emisi (Perpres Nomor 98 Tahun 2021).
 10. Adaptasi Perubahan Iklim adalah upaya yang dilakukan untuk meningkatkan kemampuan dalam menyesuaikan diri terhadap perubahan iklim, termasuk
6. *Fuel is the type of material that is used for cooking by the majority of families in village/ subdistrict.*
 7. *Environmental Pollution is the introduction or introduction of living things, substances, energy, and/or other components into the environment by human activities, thereby exceeding established environmental quality standards.*
 8. *Environmental Preservation is an effort to maintain the continuity of the environment's carrying capacity and carrying capacity through a series of systematic and integrated activities, such as planning, utilization, control, maintenance, supervision, and law enforcement (Law Number 32 of 2009 concerning Environmental Protection and Management).*
 9. *Climate Change Mitigation is a control effort to reduce the risks caused by climate change through activities that reduce emissions or increase the absorption of greenhouse gases (GHG) and the storage/strengthening of carbon stocks from various emission sources (Presidential Regulation Number 98 of 2021).*
 10. *Climate Change Adaptation is an effort undertaken to increase the ability to adapt to climate change, including climate variability and extreme events,*



keragaman iklim dan kejadian ekstrim sehingga potensi kerusakan akibat perubahan iklim berkurang, peluang yang ditimbulkan oleh perubahan iklim dapat dimanfaatkan, dan konsekuensi yang timbul akibat perubahan iklim dapat diatasi (Perpres Nomor 98 Tahun 2021).

11. Mangrove adalah vegetasi pantai yang memiliki morfologi khas dengan sistem perakaran yang mampu beradaptasi pada daerah pasang surut dengan substrat lumpur atau lumpur berpasir. (Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 27 Tahun 2025).
12. Reboisasi adalah upaya penanaman jenis pohon pada Kawasan Hutan, untuk mengembalikan fungsi Hutan (Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 26 Tahun 2020).
13. Pengolahan/Daur Ulang Sampah/Limbah adalah kegiatan yang sistematis, menyeluruh, dan berkesinambungan yang meliputi pengurangan dan penanganan sampah (Undang-Undang Nomor 18 tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah).
14. Pupuk Organik adalah pupuk yang sebagian atau seluruhnya berasal dari tanaman dan/atau hewan yang telah melalui proses rekayasa, dapat berbentuk padat atau cair yang digunakan mensuplai bahan organik untuk memperbaiki sifat fisik, kimia

so that potential damage from climate change is reduced, opportunities posed by climate change can be exploited, and consequences arising from climate change can be addressed (Presidential Regulation Number 98 of 2021).

11. *Mangroves are coastal vegetation with a distinctive morphology and root system that adapts to tidal areas with mud or sandy mud substrates (Government Regulation (PP) Number 27 of 2025).*
12. *Reforestation is the planting of tree species in forest areas to restore forest function (Government Regulation (PP) Number 26 of 2020).*
13. *Waste Processing/Recycling is a systematic, comprehensive, and continuous activity that includes waste reduction and handling (Law Number 18 of 2008 concerning Waste Management).*
14. *Organic Fertilizer is a fertilizer derived partly or wholly from plants and/or animals that have undergone an engineering process. It can be in solid or liquid form and is used to supply organic matter to improve the physical, chemical, and biological properties*



dan biologi tanah (Peraturan Menteri Pertanian Nomor 2 Tahun 2006).

of the soil (Minister of Agriculture Regulation Number 2 of 2006).

15. Lubang Resapan Biopori adalah lubang yang dibuat secara tegak lurus (vertikal) ke dalam tanah, dengan diameter 10 – 25 cm dan kedalaman sekitar 100 cm atau tidak melebihi kedalaman muka air tanah (Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 12 Tahun 2009).

15. Biopore Infiltration Holes are holes dug perpendicular (vertical) into the ground, with a diameter of 10 - 25 cm and a depth of approximately 100 cm, or not exceeding the groundwater level (Minister of Environment Regulation Number 12 of 2009).

16. Energi Baru adalah energi yang berasal dari sumber energi baru. Sumber energi terbarukan adalah sumber energi yang dihasilkan dari sumber daya energi yang berkelanjutan jika dikelola dengan baik, antara lain panas bumi, angin, bioenergi, sinar matahari, aliran dan terjunan air, serta gerakan dan perbedaan suhu lapisan laut. (Undang-undang No.30/2007 Tentang Energi).

16. New Energy is energy derived from new energy sources. Renewable energy sources are energy sources generated from sustainable energy resources if properly managed, including geothermal, wind, bioenergy, sunlight, water and waterfalls, as well as the movement and temperature differences of the ocean floor. (Law No. 30/2007 concerning Energy)

17. Pola Tanam adalah usaha penanaman pada sebidang lahan dengan mengatur susunan tata letak dan urutan tanaman selama periode waktu tertentu termasuk masa pengolahan tanah dan masa tidak ditanami selama periode tertentu (Badan Pengkajian Teknologi Pertanian, 2017).

17. Crop Patterns are planting practices on a plot of land by arranging the layout and sequence of crops over a specific period, including a period of tillage and a period of no planting (Agricultural Technology Assessment Agency, 2017).

18. Penampungan Air Hujan (PAH) adalah bangunan tempat menampung air hujan untuk memenuhi kebutuhan air minum pada sepanjang musim, baik secara individual atau komunal (Bappenas - Departemen PU, 2008).

18. Rainwater Reservoir (PAH) is a structure used to collect rainwater to meet drinking water needs throughout the season, either individually or communally (Bappenas - Department of Public Works, 2008).



19. Terasering atau Sengkedan adalah metode konservasi dengan membuat teras-teras yang dilakukan untuk mengurangi panjang lereng, menahan air sehingga mengurangi kecepatan dan jumlah aliran permukaan, serta memperbesar peluang penyerapan air oleh tanah (Balittanah Penelitian dan Pengembangan Departemen Pertanian).

19. *Terracing or Swales is a conservation methods that involve creating terraces to reduce slope length, retain water, thereby reducing the speed and amount of surface runoff, and increasing the opportunity for water absorption by the soil (Balittanah Penelitian dan Pengembangan Kementerian Pertanian).*

<https://jakarta.bps.go.id>

**Tabel**
Table

2.1

Banyaknya Kelurahan dengan Keberadaan Keluarga Pengguna Listrik dan Bukan Pengguna Listrik Menurut Kabupaten/Kota, 2025**Number of Subdistricts with Presence of Family of Electric Consumer and Non Electric Consumer by Regency/Municipality, 2025**

Kabupaten/Kota Regency/Municipality	Keluarga Pengguna Listrik Electric Consumer Families		Keluarga Bukan Pengguna Listrik ¹ Non Electric Consumer Families ¹
	PLN State Electricity Company	Non PLN Non-State Electricity Company	
(1)	(2)	(3)	(4)
Kepulauan Seribu	6	-	-
Kota Jakarta Selatan	65	-	-
Kota Jakarta Timur	65	-	-
Kota Jakarta Pusat	44	-	-
Kota Jakarta Barat	56	-	-
Kota Jakarta Utara	31	-	-
DKI Jakarta	267	-	-

Catatan: ¹ Mencakup desa/kelurahan yang sama sekali tidak ada keluarga pengguna listrik atau yang terdapat keluarga pengguna listrik, masih ada keluarga bukan pengguna listrik.

Note: ¹ Includes villages/subdistricts where all families are non electric consumers, as well as villages/subdistricts where some families are non electric consumers.



Tabel 2.2 Banyaknya Kelurahan Menurut Kabupaten/Kota dan Sumber Penerangan Jalan Utama Desa, 2025
Number of Subdistricts by Regency/Municipality and Source of Lighting for the Main Village Road, 2025

Kabupaten/Kota Regency/Municipality	Listrik Pemerintah Government- Provided Electricity	Listrik Non Pemerintah Non Government- Provided Electricity	Non Listrik Non Electricity	Tidak Ada Penerangan No Lighting	Jumlah Total
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Kepulauan Seribu	6	-	-	-	6
Kota Jakarta Selatan	65	-	-	-	65
Kota Jakarta Timur	65	-	-	-	65
Kota Jakarta Pusat	44	-	-	-	44
Kota Jakarta Barat	56	-	-	-	56
Kota Jakarta Utara	31	-	-	-	31
DKI Jakarta	267	-	-	-	267



Tabel 2.3 Banyaknya Kelurahan Menurut Kabupaten/Kota dan Jenis Bahan Bakar untuk Memasak yang Digunakan Sebagian Besar Keluarga, 2025
Number of Subdistricts by Regency/Municipality and Type of Cooking Fuel Used by Majority of Families, 2025

Kabupaten/Kota <i>Regency/Municipality</i>	Listrik <i>Electricity</i>	Elpiji 5,5 kg <i>5.5 kg-LPG</i>	Elpiji 12 kg <i>12 kg-LPG</i>	Elpiji 3 kg <i>3 kg-LPG</i>	Gas Kota <i>City Gas</i>	Biogas <i>Biogas</i>
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Kepulauan Seribu	-	-	0	6	-	-
Kota Jakarta Selatan	-	-	6	59	-	-
Kota Jakarta Timur	-	-	3	62	-	-
Kota Jakarta Pusat	-	-	1	43	-	-
Kota Jakarta Barat	-	-	2	54	-	-
Kota Jakarta Utara	-	-	1	30	-	-
DKI Jakarta	-	-	13	254	-	-



Lanjutan Tabel 2.3
Continued Table

Kabupaten/Kota <i>Regency/Municipality</i>	Minyak Tanah <i>Kerosone</i>	Briket <i>Briquettes</i>	Arang <i>Charcoal</i>	Kayu Bakar <i>Firewood</i>	Lainnya <i>Others</i>	Jumlah <i>Total</i>
(1)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
Kepulauan Seribu	-	-	-	-	-	-
Kota Jakarta Selatan	-	-	-	-	-	-
Kota Jakarta Timur	-	-	-	-	-	-
Kota Jakarta Pusat	-	-	-	-	-	-
Kota Jakarta Barat	-	-	-	-	-	-
Kota Jakarta Utara	-	-	-	-	-	-
DKI Jakarta	-	-	-	-	-	-

**Tabel**
Table

2.4

Banyaknya Kelurahan Menurut Kabupaten/Kota dan Keberadaan Agen/Penjual Bahan Bakar, 2025**Number of Subdistricts by Regency/Municipality and Availability of Agent/Seller of Fuel, 2025**

Kabupaten/Kota Regency/Municipality	Minyak Tanah Kerosone	LPG LPG	Tidak Ada Non Available
(1)	(2)	(3)	(4)
Kepulauan Seribu	-	6	-
Kota Jakarta Selatan	2	65	-
Kota Jakarta Timur	8	65	-
Kota Jakarta Pusat	10	44	-
Kota Jakarta Barat	4	56	-
Kota Jakarta Utara	4	31	-
DKI Jakarta	28	267	-



Tabel 2.5 Banyaknya Kelurahan Menurut Kabupaten/Kota dan Jenis Pencemaran Lingkungan Hidup, 2025
Table 2.5 *Number of Subdistricts by Regency/Municipality and Type of Environmental Pollution, 2025*

Kabupaten/Kota Regency/Municipality	Pencemaran Air Water Pollution	Pencemaran Tanah Soil Pollution	Pencemaran Udara Air Pollution	Tidak Ada Pencemaran No Pollution
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Kepulauan Seribu	-	-	-	6
Kota Jakarta Selatan	8	-	7	53
Kota Jakarta Timur	6	-	5	56
Kota Jakarta Pusat	-	1	7	37
Kota Jakarta Barat	13	4	9	41
Kota Jakarta Utara	4	1	2	27
DKI Jakarta	31	6	30	220

**Tabel**
Table 2.6**Banyaknya Kelurahan dengan Pencemaran Lingkungan Hidup Menurut Kabupaten/Kota dan Sumber Utama Pencemaran, 2025****Number of Subdistricts with Environmental Pollution by Regency/Municipality and Main Source of Pollution, 2025**

Kabupaten/Kota <i>Regency/Municipality</i>	Sumber Pencemaran Air <i>The Source of Water Pollution</i>			Sumber Pencemaran Tanah <i>The Source of Soil Pollution</i>			Sumber Pencemaran Udara <i>The Source of Air Pollution</i>		
	Rumah Tangga Domestic	Pabrik/ Industri/ Usaha Factory/ Industry/ Business	Lainnya Others	Rumah Tangga Domestic	Pabrik/ Industri/ Usaha Factory/ Industry/ Business	Lainnya Others	Rumah Tangga Domestic	Pabrik/ Industri/ Usaha Factory/ Industry/ Business	Lainnya Others
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
Kepulauan Seribu	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Kota Jakarta Selatan	6	2	-	-	-	-	2	-	5
Kota Jakarta Timur	5	1	-	-	-	-	-	-	5
Kota Jakarta Pusat	-	-	-	1	-	-	4	-	3
Kota Jakarta Barat	8	5	-	2	2	-	2	4	3
Kota Jakarta Utara	4	-	-	-	1	-	-	1	1
DKI Jakarta	23	8	-	3	3	-	8	5	17



Tabel 2.7 Banyaknya Kelurahan Menurut Kabupaten/Kota dan Keberadaan Kegiatan Pengelolaan dan Pelestarian Lingkungan, 2025
Number Subdistricts by Regency/Municipality and the Existence of Environmental Management and Conservation Activities, 2025

Kabupaten/Kota Regency/Municipality	Penanaman/Pemeliharaan Pohon dan Mangrove Planting/Maintenance of Trees and Mangroves		Pengolahan/Daur Ulang Sampah/Limbah Waste Processing/Recycling		Penggalian Penggunaan Pupuk Organik Promoting the Use of Organic Fertilizers	
	Ada Exist	Tidak Ada Not Exist	Ada Exist	Tidak Ada Not Exist	Ada Exist	Tidak Ada Not Exist
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Kepulauan Seribu	6	-	6	-	4	2
Kota Jakarta Selatan	28	37	60	5	26	39
Kota Jakarta Timur	37	28	60	5	36	29
Kota Jakarta Pusat	6	38	40	4	15	29
Kota Jakarta Barat	29	27	45	11	22	34
Kota Jakarta Utara	21	10	29	2	12	19
DKI Jakarta	127	140	240	27	115	152

**Tabel**
Table

2.8

Banyaknya Kelurahan Menurut Kabupaten/Kota dan Keberadaan Kegiatan Adaptasi dan Mitigasi Perubahan Iklim, 2025**Number Subdistricts by Regency/Municipality and the Existence of Climate Change Adaptation and Mitigation Activities, 2025**

Kabupaten/Kota Regency/Municipality	Pembuatan Lubang Biopori Making Biopore Holes		Pemanfaatan Energi Baru Terbarukan Utilisation of New and Renewable Energy		Penerapan Pola Tanam Implementation of Cropping Patterns	
	Ada Exist	Tidak Ada Not Exist	Ada Exist	Tidak Ada Not Exist	Ada Exist	Tidak Ada Not Exist
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Kepulauan Seribu	6	-	2	4	-	6
Kota Jakarta Selatan	44	21	3	62	11	54
Kota Jakarta Timur	55	10	6	59	12	53
Kota Jakarta Pusat	25	19	10	34	12	32
Kota Jakarta Barat	32	24	5	51	6	50
Kota Jakarta Utara	12	19	4	27	9	22
DKI Jakarta	174	93	30	237	50	217



Lanjutan Tabel 2.8
Continued Table

Kabupaten/Kota <i>Regency/Municipality</i>	Penampungan/Pemanenan Air Hujan <i>Rainwater Harvesting/Collection</i>		Pembuatan/Pemeliharaan Terasering <i>Construction/Maintenance of Terraces</i>	
	Ada <i>Exist</i>	Tidak Ada <i>Not Exist</i>	Ada <i>Exist</i>	Tidak Ada <i>Not Exist</i>
(1)	(8)	(9)	(10)	(11)
Kepulauan Seribu	4	2	-	6
Kota Jakarta Selatan	9	56	-	65
Kota Jakarta Timur	13	52	-	65
Kota Jakarta Pusat	8	36	-	44
Kota Jakarta Barat	4	52	-	56
Kota Jakarta Utara	4	27	-	31
DKI Jakarta	42	225	-	267

Pendidikan dan kesehatan

Education and Health



98,88

PERSENTASE KELURAHAN TERDAPAT SD/MI
PERCENTAGE OF SUBDISTRICTS WITH ELEMENTARY SCHOOL

PERSENTASE KELURAHAN TERDAPAT SMP/MTS
PERCENTAGE OF SUBDISTRICTS WITH JUNIOR HIGH SCHOOL

95,13

82,02

PERSENTASE KELURAHAN TERDAPAT SMA/MA
PERCENTAGE OF SUBDISTRICTS WITH SENIOR HIGH SCHOOL



PERSENTASE KELURAHAN TERDAPAT RUMAH SAKIT
PERCENTAGE OF SUBDISTRICTS WITH HOSPITAL

46,82

15,73

PERSENTASE KELURAHAN TERDAPAT PUSKESMAS
PERCENTAGE OF SUBDISTRICTS WITH PUBLIC HEALTH CENTER





Penjelasan Teknis Pendidikan dan Kesehatan

1. Lembaga Pendidikan adalah lembaga yang menghasilkan siswa yang lulus dan diakui/disahkan oleh Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah serta Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi yang dibuktikan dengan sertifikat/ijazah.
2. Jenjang Pendidikan Formal terdiri atas pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi. Jenis pendidikan yang diajarkan mencakup pendidikan umum, kejuruan, akademik, profesi, vokasi, keagamaan, dan khusus.
3. Pendidikan Dasar berbentuk Sekolah Dasar (SD) dan Madrasah Ibtidaiyah (MI) atau bentuk lain yang sederajat serta Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan Madrasah Tsanawiyah (MTs) atau bentuk lain yang sederajat.
4. Pendidikan Menengah berbentuk Sekolah Menengah Atas (SMA), Madrasah Aliyah (MA), Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), dan Madrasah Aliyah Kejuruan (MAK), atau bentuk lain yang sederajat.
5. Pendidikan Tinggi merupakan jenjang pendidikan setelah pendidikan menengah yang mencakup program pendidikan diploma, sarjana, magister, spesialis, dan doktor yang

Technical Notes Education and Health

1. *Educational Institutions are institutions that produce students who graduate and are recognized/approved by the Ministry of Primary and Secondary Education and the Ministry of Higher Education, Science, and Technology, as evidenced by certificates/diplomas.*
2. *The Formal Education Level consists of primary education, secondary education, and higher education. The kind of education taught consists of general education, vocational, academic, professional, religious, and special education.*
3. *The Primary Education consists of Elementary School and Islamic Elementary School or other equivalent forms and Junior High School and Madrasah Tsanawiyah (MTs), or other equivalent forms.*
4. *The Secondary Education consists of Senior High School (SMA), Madrasah Aliyah (MA), Vocational School (SMK), and Vocational Madrasah Aliyah (MAK), or other equivalent forms.*
5. *The Higher Education is the education level after secondary education that consists of diploma, bachelor, master, specialist, and doctoral degrees that are held by the higher education institution*



diselenggarakan oleh perguruan tinggi. Perguruan tinggi dapat berbentuk akademi, politeknik, sekolah tinggi, institut, atau universitas.

(college). The Higher Education Institutions can be academy, polytechnic, high school, institute, or university.

6. Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, fasilitas pelayanan kesehatan meliputi fasilitas pelayanan kesehatan tingkat pertama, fasilitas pelayanan kesehatan tingkat lanjut; dan fasilitas pelayanan kesehatan penunjang.

6. According to Government Regulation of the Republic of Indonesia Number 28 of 2024 concerning the Implementing Regulations of Law Number 17 of 2023 concerning Health, health care facilities include primary care facilities, advanced care facilities, and supporting care facilities.

7. Rumah Sakit adalah fasilitas pelayanan kesehatan tingkat lanjut yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perseorangan secara paripurna melalui pelayanan kesehatan promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif, dan/atau paliatif dengan menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan, dan gawat darurat (Undang-undang No 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan).

7. A Hospital is an advanced-level healthcare facility that provides comprehensive individual health services through promotive, preventive, curative, rehabilitative, and/or palliative healthcare services, including inpatient, outpatient, and emergency care (Law No. 17 of 2023 concerning Health).

8. Klinik adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan yang menyediakan pelayanan medik dasar dan/atau spesialisik secara komprehensif.

8. A Clinic is a health care facility that provides comprehensive basic and/or specialist medical services.

9. Balai Kesehatan merupakan jenis fasilitas pelayanan kesehatan rujukan tingkat lanjutan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan masyarakat

9. A Health Center is a type of advanced referral health care facility that provides public health services or health support services. In addition to providing public



atau pelayanan penunjang kesehatan. Selain menyelenggarakan pelayanan kesehatan masyarakat, balai kesehatan dapat menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan. Balai dapat diselenggarakan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, atau masyarakat (Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/MENKES/34/2018 tentang Balai sebagai Jenis Fasilitas Pelayanan Kesehatan).

10. Puskesmas (Pusat Kesehatan Masyarakat) adalah fasilitas pelayanan kesehatan tingkat pertama yang menyelenggarakan dan mengoordinasikan pelayanan kesehatan promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif, dan/atau paliatif dengan mengutamakan promotif dan preventif di wilayah kerjanya (Undang-undang No 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan).
11. Puskesmas dengan Rawat Inap adalah puskesmas yang diberi tambahan sumber daya kesehatan untuk menyelenggarakan rawat inap pada pelayanan persalinan normal termasuk pelayanan obstetrik neonatal emergency dasar (PONED), dan pelayanan rawat inap lainnya. (Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2024 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat).
12. Puskesmas Non Rawat Inap adalah puskesmas yang menyelenggarakan

health services, centers can also provide individual health services. A Health Centre can be operated by the Central Government, Regional Governments, or the community (Decree of the Minister of Health of the Republic of Indonesia No. HK.01.07/MENKES/34/2018 concerning Centers as a Type of Health Service Facility).

10. *A Community Health Center (Puskesmas) is a primary-level healthcare facility that organizes and coordinates promotive, preventive, curative, rehabilitative, and/or palliative health services, prioritizing promotive and preventive services in its working area (Law No. 17 of 2023 concerning Health).*
11. *A Community Health Center (Puskesmas) with Inpatient Care is a community health center (puskesmas) that has been given additional health resources to provide inpatient care for normal delivery services, including basic emergency obstetric and neonatal care, and other inpatient services. (Regulation of the Minister of Health of the Republic of Indonesia Number 19 of 2024 concerning Community Health Centers).*
12. *Non-inpatient community health centers are community health centers*



pelayanan rawat jalan, perawatan di rumah, pelayanan persalinan normal, dan pelayanan gawat darurat. (Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Pusat Kesehatan Masyarakat).

that provide outpatient services, home care, normal delivery services, and emergency services. (Regulation of the Minister of Health of the Republic of Indonesia Number 19 of 2024 concerning the Implementation of Community Health Centers).

13. Puskesmas Pembantu (Pustu) merupakan salah satu bentuk unit pelayanan kesehatan di tingkat desa/kelurahan yang mengoordinasikan urusan kesehatan di desa/kelurahan, termasuk pemberian pelayanan kesehatan primer dan peningkatan partisipasi masyarakat pada tingkat desa/kelurahan. Pustu memberikan pelayanan berobat jalan. Pustu bertanggung jawab ke puskesmas induk di kecamatan.

13. A Auxiliary Health Centers (Pustu) is a health service unit at the village/sub-district level that coordinates health affairs in the village/sub-district, including the provision of primary health care and increasing community participation at the village/sub-district level. The Pustu provides outpatient services and is accountable to the main community health center in the sub-district.

14. Klinik Pratama adalah klinik yang menyelenggarakan pelayanan medis dasar. (Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 14 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Kesehatan).

14. A Primary Clinic is a clinic that provides basic medical services. (Minister of Health Regulation Number 14 of 2021 concerning Standards for Business Activities and Products in the Implementation of Risk-Based Business Licensing in the Health Sector).

15. Praktik mandiri dokter adalah sarana kesehatan/bangunan yang digunakan untuk tempat praktik dokter yang biasanya memberikan pelayanan berobat jalan, termasuk praktik dokter yang mempunyai fasilitas rawat inap dan apotek.

15. An independent physician's practice is a healthcare facility/building used as a physician's practice that typically provides outpatient services, including physician practices that have inpatient facilities and a pharmacy.

16. Praktik mandiri bidan adalah sarana kesehatan/bangunan yang digunakan

16. An independent midwife practice is a health facility/building used as a



untuk tempat praktik bidan yang biasanya memberikan pelayanan ibu hamil dan bayi.

midwife's practice location which usually provides services to pregnant women and babies.

17. Poskesdes (Pos Kesehatan Desa) adalah sarana kesehatan/bangunan yang dibentuk di desa/kelurahan dalam rangka mendekatkan/ menyediakan pelayanan kesehatan dasar bagi masyarakat desa/kelurahan. Poskesdes merupakan Upaya Kesehatan Bersumber daya Masyarakat (UKBM) sehingga masyarakat dapat berperan aktif dalam meningkatkan taraf kesehatan di lingkungannya dengan kewaspadaan dini terhadap berbagai risiko dan masalah kesehatan. Poskesdes dikelola oleh bidan dan dibantu beberapa kader.
17. *Village Health Posts (Poskesdes) are health facilities/buildings established in villages/sub-districts to bring basic health services closer to the community. Poskesdes are a Community-Based Health Initiative (UKBM) that allows communities to play an active role in improving the health of their communities by providing early warning of various health risks and problems. Poskesdes are managed by midwives and assisted by several cadres.*
18. Polindes (Pondok Bersalin Desa) adalah bangunan yang dibangun dengan sumbangan dana pemerintah dan partisipasi masyarakat desa untuk tempat pertolongan persalinan dan pemondokan ibu bersalin, sekaligus tempat tinggal bidan di desa. Di samping pertolongan persalinan juga dilakukan pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak (KIA), Keluarga Berencana (KB), dan pelayanan kesehatan lain sesuai kebutuhan masyarakat dan kompetensi teknis bidan tersebut.
18. *Polindes (Village Maternity Post) is a building constructed with government funding and community participation to provide delivery assistance and accommodation for women in labor, as well as housing for village midwives. In addition to providing delivery assistance, it also provides maternal and child health (KIA) services, family planning (KB), and other health services according to community needs and the midwives' technical competence.*
19. Apotek adalah sarana pelayanan kefarmasian tempat dilakukan praktik kefarmasian oleh apoteker (Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 26 Tahun 2018).
19. *A Pharmacy is a pharmaceutical service facility where pharmacists practice pharmacy (Minister of Health Regulation Number 26 of 2018 concerning*



2018 tentang Apotek).

Pharmacies).

20. Toko Khusus Obat/Jamu adalah tempat tertentu yang digunakan untuk melakukan pekerjaan menyimpan, dan menjual obat/bahan khusus untuk obat/jamu. Toko obat/jamu melayani pembelian obat-obatan bebas terbatas dan juga obat bebas.
21. Posyandu adalah bagian dari lembaga kemasyarakatan desa/ kemasyarakatan kelurahan sebagai wadah partisipasi masyarakat yang merupakan mitra pemerintah desa/kelurahan dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan pembangunan serta meningkatkan pelayanan desa. Posyandu memiliki tugas membantu kepala desa/lurah melakukan pemberdayaan masyarakat, ikut serta dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan, dan meningkatkan Pelayanan Kesehatan masyarakat di desa/kelurahan (Permenkes No 19 Tahun 2024).
22. Pos Pembinaan Terpadu (Posbindu), yang saat ini dikenal Posbindu PTM (Penyakit Tidak Menular) merupakan peran serta masyarakat dalam melakukan kegiatan deteksi dini dan pemantauan faktor risiko PTM Utama yang dilaksanakan secara terpadu, rutin, dan periodik (Juknis Pelaksanaan Posbindu, Kemenkes, 2012).
20. *A Traditional Drug Store is a designated location dedicated to storing and selling specific drugs/ingredients for drugs/herbal medicine. Drug/herbal medicine stores offer non-prescription and limited over-the-counter (OTC) medicine.*
21. *Posyandu (Integrated Health Post) is part of a village/subdistrict community organization that serves as a forum for community participation and partners with the village/subdistrict government in planning, implementing, and monitoring development and improving village services. Posyandu's role is to assist the village/subdistrict head in empowering the community, participating in development planning and implementation, and improving public health services in the village/subdistrict (Minister of Health Regulation No. 19 of 2024).*
22. *Integrated Guidance Post (Posbindu), currently known as Posbindu PTM (Integrated Non-Communicable Disease Post), is a community participation in carrying out early detection activities and monitoring of the main PTM risk factors which are carried out in an integrated, routine and periodic manner (Technical Guidelines for Implementing Posbindu, Ministry of Health, 2012).*



Tabel
Table

3.1

Banyaknya Kelurahan dengan Keberadaan Sarana Pendidikan Menurut Kabupaten/Kota dan Jenis Sarana Pendidikan, 2025
Number of Subdistricts with Availability Educational Facilities by Regency/Municipality and Type of Educational Facilities, 2025

Kabupaten/Kota Regency/Municipality	TK/RA/BA Kindergarten	SD/MI Elementary School	SMP/MTS Junior High School	SMA/MA Senior High School	SMK Vocational High School	Akademi/ Perguruan Tinggi Academy/ University
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Kepulauan Seribu	6	6	5	3	1	-
Kota Jakarta Selatan	64	63	61	55	47	45
Kota Jakarta Timur	65	65	64	55	57	34
Kota Jakarta Pusat	42	43	40	31	31	20
Kota Jakarta Barat	55	56	53	44	47	17
Kota Jakarta Utara	31	31	31	31	26	12
DKI Jakarta	263	264	254	219	209	128

**Tabel**
Table 3.2**Banyaknya Kelurahan dengan Keberadaan Sarana Kesehatan Menurut Kabupaten/Kota dan Jenis Sarana Kesehatan, 2025*****Number of Subdistricts with by Availability of Health Facilities by Regency/Municipality and Type of Health Facilities, 2025***

Kabupaten/Kota <i>Regency/Municipality</i>	Rumah Sakit <i>Hospital</i>	Klinik Utama <i>Principal Clinic</i>	Balai Kesehatan <i>Health Center</i>	Puskesmas ¹ <i>Community Health Center¹</i>	Puskesmas Pembantu <i>Auxiliary Health Centers</i>	Klinik Pratama <i>Primary Clinic</i>
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Kepulauan Seribu	1	-	-	2	4	-
Kota Jakarta Selatan	33	46	1	9	59	61
Kota Jakarta Timur	31	39	-	10	62	57
Kota Jakarta Pusat	22	13	-	8	34	31
Kota Jakarta Barat	21	13	-	7	49	49
Kota Jakarta Utara	17	14	2	6	30	31
DKI Jakarta	125	125	3	42	238	229

Catatan: ¹ Puskesmas mencakup puskesmas dengan rawat inap dan puskesmas tanpa rawat inap.Note: ¹ Public Health Center includes public health center with hospitalization and without hospitalization.



Lanjutan Tabel 3.2
Continued Table

Kabupaten/Kota <i>Regency/Municipality</i>	Praktik Mandiri Dokter <i>Independent Physician Practice</i>	Praktik Mandiri Bidan <i>Independent Midwife Practice</i>	Poskesdes <i>Village Health Post</i>	Polindes <i>Village Maternity Post</i>	Apotek <i>Pharmacy</i>	Toko Khusus Obat/Jamu <i>Traditional Drugs Store</i>
(1)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
Kepulauan Seribu	1	-	1	-	-	-
Kota Jakarta Selatan	61	46	-	-	63	53
Kota Jakarta Timur	60	59	-	-	65	60
Kota Jakarta Pusat	38	15	-	-	41	29
Kota Jakarta Barat	53	37	-	-	56	50
Kota Jakarta Utara	30	27	-	-	31	28
DKI Jakarta	243	184	1	-	256	220

**Tabel**
Table

3.3

Banyaknya Kelurahan dengan Kegiatan Posyandu dan Posbindu Menurut Kabupaten/Kota, 2025***Number of Subdistricts with Integrated Health Post and Integrated Development Post Activities by Regency/Municipality, 2025***

Kabupaten/Kota Regency/Municipality	Kegiatan Posyandu The Activity of Integrated Health Post		Pos Pembinaan Terpadu (Posbindu) Integrated Guidance Post
	Setiap Sebulan Sekali Once in a Month	Setiap 2 Bulan/Lebih Once in at Least Two Months	
(1)	(2)	(3)	(4)
Kepulauan Seribu	6	1	6
Kota Jakarta Selatan	64	4	57
Kota Jakarta Timur	65	1	65
Kota Jakarta Pusat	44	-	43
Kota Jakarta Barat	55	4	56
Kota Jakarta Utara	31	1	24
DKI Jakarta	265	11	251

Angkutan, Komunikasi, dan Informasi *Transportation, Communication, and Information*

ANGKUTAN UMUM DI KELURAHAN *PUBLIC TRANSPORTATION IN SUBDISTRICTS*

100%

Kelurahan ada transportasi umum

Subdistricts accessible by public transportation



Kelurahan ada angkutan online

Subdistricts accessible by online transportation

97,75%



SINYAL TELEPON DAN SINYAL INTERNET DI KELURAHAN *PHONE AND INTERNET SIGNAL IN SUBDISTRICTS*

PHONE AND INTERNET SIGNAL IN SUBDISTRICTS

Persentase Kelurahan Menurut Kekuatan Sinyal Telepon Seluler di Sebagian Besar Wilayah

Percentage of Subdistricts by the Strength of Cellular Phone Signal in Most Areas



Sangat Kuat 72,28%
Very Strong 72,28%

Kuat 27,72%
Strong 27,72%

Persentase Kelurahan Menurut Kekuatan Sinyal Internet di Sebagian Besar Wilayah

Percentage of Subdistricts by the Strength of Internet Signal in Most Areas



5G/4G/LTE 100%



SARANA KOMUNIKASI DI KELURAHAN *COMMUNICATION FACILITIES IN SUBDISTRICTS*

COMMUNICATION FACILITIES IN SUBDISTRICTS



75,66% Kelurahan ada kantor pos/pos pembantu/rumah pos
Subdistricts with post office/sub-post office/post house



99,25% Kelurahan ada perusahaan/agen jasa ekspedisi swasta
Subdistricts with private expedition service





Penjelasan Teknis Angkutan, Komunikasi, dan Informasi

1. Prasarana Transportasi adalah sarana penunjang lalu lintas pemindahan orang dan/atau barang, yang terdiri atas jalan, jembatan, dermaga, pelabuhan, dan lain-lain yang digunakan oleh warga desa untuk mobilitas dari dan ke desa terdekat.
2. Angkutan Umum adalah sarana angkutan pemindahan orang dan/atau barang dari suatu tempat ke tempat lain dengan menggunakan kendaraan bermotor yang disediakan untuk dipergunakan untuk umum dengan dipungut bayaran (Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1993 Tentang Angkutan Jalan).
3. Trayek adalah lintasan kendaraan umum untuk pelayanan jasa angkutan orang atau orang dan barang, yang mempunyai titik asal dan tujuan perjalanan tetap, lintasan tetap, dan jadwal tetap maupun tidak berjadwal.
4. Ketersediaan Angkutan *Online* di desa adalah kemampuan warga desa/ kelurahan untuk mengakses dan memesan layanan transportasi daring berbasis aplikasi (misalnya Gojek, Grab, Maxim, dan lainnya).
5. Jenis Permukaan Jalan Terluas adalah

Technical Notes Transportation, Communica- tion, and Information

1. *Transportation Infrastructure is defined as supporting facilities for the movement of people and/or goods, including roads, bridges, docks, ports, and other facilities that are utilized by villagers to ensure mobility to and from the nearest villages.*
2. *Public Transportation is a type of transportation for the movement of people and/or goods from one place to another using motor vehicles provided for public use on a fare-paying basis (Government Regulation of the Republic of Indonesia Number 41 of 1993 on Road Transportation)."*
3. *Route is the designated path used by public vehicles in passenger-and-goods transport services, characterized by fixed point of origin and destination, a fixed path, and either a fixed or non-fixed timetable.*
4. *The Availability of Online Transportation in villages refers to the ability of villagers/subdistrict residents to access and order online transportation services based on applications (e.g. Gojek, Grab, Maxim, and others).*
5. *Type of Widest Road Surface is the widest*



jenis permukaan jalan terluas yang ada di desa/kelurahan. Jenis permukaan jalan terdiri dari: aspal/beton, diperkeras (dengan kerikil atau batu), tanah, dan lainnya yaitu terbuat dari kayu/papan yang biasanya digunakan di daerah rawa, termasuk jalan setapak, jalan di hutan dan sejenisnya.

road surface in the village/subdistrict. The types of road surface including: asphalt/concrete, pebble (with gravel or stone), land, and others : such as made of wood/board that is usually used in swamp areas, including walkways, forest roads, etc.

6. *Base Transceiver Station (BTS)* adalah alat yang berfungsi sebagai pengirim dan penerima (transceiver) sinyal komunikasi seluler. Biasanya BTS ditandai adanya menara/tower yang dilengkapi antena sebagai perangkat transceiver.

6. *Cellular Phone Tower or Base Transceiver Station (BTS)* is a tool that serves as the sender and receiver (transceiver) of cellular communication signals. Usually, BTS is marked with a tower equipped with antenna as transceiver devices.

7. Sinyal telepon seluler adalah besaran elektromagnetik yang berubah dalam ruang dan waktu dengan membawa informasi yang memberikan konfirmasi bahwa layanan telepon seluler sudah tersedia.

7. *Cellphone signal* is electromagnetic quantities that change in space and time by bringing information that confirms when the cell phone services are available.

8. Sinyal internet telepon seluler adalah jaringan sistem data paket internet dengan kecepatan transfer data tertentu. Paket data disini biasanya digunakan dalam melakukan akses internet. Protokol transfer data ini mengalami beberapa perubahan mulai dari yang kecepatannya rendah sampai tinggi yaitu 2,5G/E/GPRS, 3G/H/H+/EVDO, hingga 5G/4G/LTE.

8. *Cellphone internet signal* is an internet package data system network with certain data transfer speeds. Data packages here are usually used to access the internet. This data transfer protocol has undergone several changes ranging from low to high speeds, namely 2,5G/E/GPRS, 3G/H/H+/EVDO, to 5G/4G/LTE.

9. Kantor Pos adalah tempat pemberi pelayanan komunikasi tertulis dan atau surat elektronik, layanan paket,

9. *Post Office* is a service provider place of written communication and or electronic mail, parcel service, logistics



layanan logistik, layanan transaksi keuangan, dan layanan keagenan pos untuk kepentingan umum. Rumah pos berfungsi sama seperti kantor pos dan kantor pos pembantu, bedanya rumah pos biasanya terletak di daerah terpencil.

services, financial transaction services, postal and agency services to the public. Postal house has the same function as the post office and subsidiary of post office, the difference is that postal house usually located in remote areas.

10. Pos Keliling adalah pelayanan pos (menjual, mengirim, dan menerima benda pos) keliling dengan menggunakan mobil atau sarana angkutan yang berfungsi sama seperti kantor pos atau kantor pos pembantu.
11. Perusahaan Jasa Agen Ekspedisi Swasta adalah pelayanan pengiriman paket maupun dokumen yang dikelola oleh pihak swasta, misalnya Tiki, JNE, ESL, dll.

10. *Mobile Postal Service is tnomatic postal service (to sell, send, and receive postal stationery) by car or transportation facility that the functions are the same as the post office or subsidiary of post office.*
11. *Private Expedition Service Company is packages and documents delivery service managed by privates, for example Tiki, JNE, ESL, etc.*



Tabel 4.1 **Banyaknya Kelurahan Menurut Kabupaten/Kota dan Jenis Prasarana Transportasi, 2025**
Table 4.1 **Number of Subdistricts by Regency/Municipality and Type of Transportation Infrastructure, 2025**

Kabupaten/Kota Regency/Municipality	Darat Land	Air Water	Darat dan Air Land and Water	Udara Air	Jumlah Total
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Kepulauan Seribu	-	3	3	-	6
Kota Jakarta Selatan	65	-	-	-	65
Kota Jakarta Timur	65	-	-	-	65
Kota Jakarta Pusat	44	-	-	-	44
Kota Jakarta Barat	56	-	-	-	56
Kota Jakarta Utara	31	-	-	-	31
DKI Jakarta	261	3	3	-	267



Tabel 4.2 Banyaknya Kelurahan Menurut Kabupaten/Kota dan Ketersediaan Angkutan Umum, 2025
Table 4.2 *Number of Subdistricts by Regency/Municipality and Availability of Public Transportation, 2025*

Kabupaten/Kota Regency/Municipality	Ada, Dengan Trayek Tetap dan Tanpa Trayek Tetap Available with Fixed Routes and without Fixed Routes	Ada, Dengan Trayek Tetap Available with Fixed Routes	Ada, Tanpa Trayek Tetap Available without Fixed Routes	Tidak Ada Angkutan Umum Not Available Public Transportation	Jumlah Total
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Kepulauan Seribu	-	6	6	6	6
Kota Jakarta Selatan	65	-	65	65	65
Kota Jakarta Timur	65	-	65	65	65
Kota Jakarta Pusat	44	-	44	44	44
Kota Jakarta Barat	56	-	56	56	56
Kota Jakarta Utara	31	-	31	31	31
DKI Jakarta	261	6	267	267	267

**Tabel**
Table

4.3

Banyaknya Kelurahan Menurut Kabupaten/Kota dan Ketersediaan Angkutan Online, 2025
Number of Subdistricts by Regency/Municipality and Availability of Online Transportation, 2025

Kabupaten/Kota Regency/Municipality	Ada Available	Tidak Ada Not Available	Jumlah Total
(1)	(2)	(3)	(4)
Kepulauan Seribu	-	6	6
Kota Jakarta Selatan	65	-	65
Kota Jakarta Timur	65	-	65
Kota Jakarta Pusat	44	-	44
Kota Jakarta Barat	56	-	56
Kota Jakarta Utara	31	-	31
DKI Jakarta	261	6	267



Tabel 4.4 Banyaknya Kelurahan yang Menggunakan Prasarana Transportasi Darat atau Darat dan Air Menurut Kabupaten/Kota dan Jenis Permukaan Jalan Darat Terluas, 2025
Table 4.4 *Number of Subdistricts Used Land or Land and Water Transportation Infrastructure by Regency/Municipality and Type of the Widest Road Surface, 2025*

Kabupaten/Kota Regency/Municipality	Aspal/Beton Asphalt/ Concrete	Diperkeras (Kerikil, Batu, dll) Pebble	Tanah Land	Lainnya Others	Jumlah Total
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Kepulauan Seribu	-	2	-	1	3
Kota Jakarta Selatan	65	-	-	-	65
Kota Jakarta Timur	65	-	-	-	65
Kota Jakarta Pusat	44	-	-	-	44
Kota Jakarta Barat	56	-	-	-	56
Kota Jakarta Utara	31	-	-	-	31
DKI Jakarta	261	2	-	1	264

**Tabel**
Table

4.5

Banyaknya Kelurahan Menurut Kabupaten/Kota dan Keberadaan *Base Transceiver Station* (BTS), 2025***Number of Subdistricts by Regency/Municipality and Existence of Base Transceiver Station (BTS), 2025***

Kabupaten/Kota <i>Regency/Municipality</i>	Ada <i>Exist</i>	Tidak Ada <i>Not Exist</i>	Jumlah <i>Total</i>
(1)	(2)	(3)	(4)
Kepulauan Seribu	6	-	6
Kota Jakarta Selatan	65	-	65
Kota Jakarta Timur	59	6	65
Kota Jakarta Pusat	35	9	44
Kota Jakarta Barat	47	9	56
Kota Jakarta Utara	29	2	31
DKI Jakarta	241	26	267



Tabel 4.6 Banyaknya Kelurahan Menurut Kabupaten/Kota dan Kekuatan Sinyal Telepon Seluler, 2025
Table *Number of Subdistricts by Regency/Municipality and the Strenght of Cellular Phone Signal, 2025*

Kabupaten/Kota Regency/Municipality	Sangat Kuat Very Strong	Kuat Strong	Lemah Weak	Tidak Ada Sinyal No Signal	Jumlah Total
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Kepulauan Seribu	2	4	-	-	6
Kota Jakarta Selatan	52	13	-	-	65
Kota Jakarta Timur	29	36	-	-	65
Kota Jakarta Pusat	31	13	-	-	44
Kota Jakarta Barat	56	-	-	-	56
Kota Jakarta Utara	23	8	-	-	31
DKI Jakarta	193	74	-	-	267



Tabel 4.7 **Banyaknya Kelurahan Menurut Kabupaten/Kota dan Kekuatan Sinyal Internet, 2025**
Table 4.7 **Number of Subdistricts by Regency/Municipality and the Strenght of Internet Signal, 2025**

Kabupaten/Kota Regency/Municipality	5G/4G/LTE 5G/4G/LTE	3G/H/H+/ EVDO 3G/H/H+/ EVDO	2,5G/E/GPRS 2,5G/E/GPRS	Tidak Ada Sinyal Internet No Internet Signal	Jumlah Total
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Kepulauan Seribu	6	-	-	-	6
Kota Jakarta Selatan	65	-	-	-	65
Kota Jakarta Timur	65	-	-	-	65
Kota Jakarta Pusat	44	-	-	-	44
Kota Jakarta Barat	56	-	-	-	56
Kota Jakarta Utara	31	-	-	-	31
DKI Jakarta	267	-	-	-	267



Tabel 4.8 Banyaknya Kelurahan dengan Keberadaan Layanan Pos dan Ekspedisi Menurut Kabupaten/ Kota, 2025
Table 4.8 *Number of Subdistricts with the Existence of Postal and Expedition Services by Regency/ Municipality, 2025*

Kabupaten/Kota Regency/Municipality	Kantor Pos/Pos Pembantu/ Rumah Pos Post Office/Subsidiary of Post Office	Pos Keliling Mobile Postal Service	Perusahaan Jasa Ekspedisi Swasta Private Expedition Service Company
(1)	(2)	(3)	(4)
Kepulauan Seribu	4	4	5
Kota Jakarta Selatan	54	15	65
Kota Jakarta Timur	49	10	65
Kota Jakarta Pusat	31	6	43
Kota Jakarta Barat	37	-	56
Kota Jakarta Utara	27	4	31
DKI Jakarta	202	39	265

Sarana Ekonomi dan Industri

Economic and Industrial Facilities



95,51 % KELURAHAN TERDAPAT INDUSTRI MIKRO KECIL

95,51 % PERCENT OF SUBDISTRICTS CONTAIN SMALL MICRO INDUSTRIES



92,88 % KELURAHAN TERDAPAT BANK

92,88 % PERCENT OF SUBDISTRICTS CONTAIN BANK

100 % KELURAHAN TERDAPAT SARANA PERDAGANGAN DAN AKOMODASI

100 % PERCENT OF SUBDISTRICTS CONTAIN MEANS OF TRADE AND ACCOMMODATION

40,82% KELURAHAN TERDAPAT KOPERASI

40,82 % PERCENT OF SUBDISTRICTS CONTAIN COOPERATIVE





Penjelasan Teknis Sarana Ekonomi dan Industri

1. Minimarket/swalayan adalah sistem pelayanan mandiri, menjual berbagai jenis barang secara eceran, dan semua barang memiliki label harga, dengan luas bangunan kurang dari 400 m².
2. Supermarket, atau dengan sebutan lain adalah tempat perdagangan dengan sistem pelayanan mandiri, semua barang memiliki label harga, dan luas minimal 400 m².
3. Restoran adalah usaha jasa menyajikan makanan dan minuman untuk dikonsumsi di tempat usahanya, bertempat di sebagian atau seluruh bangunan permanen, dilengkapi dengan jasa pelayanan meliputi memasak dan menyajikan sesuai pesanan dan mempunyai ciri pembeli biasanya dikenakan pajak.
4. Rumah Makan adalah jenis usaha yang menyediakan jasa pangan yang pengolahan makanannya dapat dilakukan diluar rumah makan, yang mempunyai ciri pembeli biasanya dikenakan pajak.
5. Hotel adalah jenis akomodasi yang mempergunakan sebagian atau keseluruhan bangunan untuk jasa pelayanan penginapan, penyedia makanan dan minuman serta jasa

Technical Notes Economic and Industry Facilities

1. *Minimarket or convenience store is a self-service system that sells various types of goods at retail prices, with all goods labeled with prices, and a building area of less than 400 m².*
2. *Supermarket, or other similar establishments, is a place of commerce with a self-service system, where all goods are labeled with prices, and has a minimum area of 400 m².*
3. *Restaurant is a service business that serves food and beverages consumed on its premises, located in part or all of a permanent building, equipped with services including cooking and serving according to orders, and characterized by the fact that buyers are usually subject to tax.*
4. *Food Stall is a type of business that provides food services which food processing may be carried out outside the food stall premises, and customers are generally subject to tax.*
5. *Hotel is a type of accommodation that uses part or all of a building to provide lodging services, food and beverage services, and other services (such as restaurants, laundry, etc.) for the general*



lainnya (seperti restoran, binatu, dll) bagi masyarakat umum yang dikelola secara komersial dengan izin usaha sebagai hotel.

public and operated commercially under a business license as a hotel.

6. Penginapan (hostel/motel/losmen/wisma) adalah jenis akomodasi yang mempergunakan sebagian atau keseluruhan bangunan untuk jasa pelayanan penginapan bagi umum, biasanya tanpa fasilitas pelayanan makan minum yang dikelola secara komersial dengan izin usaha bukan hotel.

6. *Lodging (hostel/motel/guesthouse/inn) is a type of accommodation that uses part or all of a building for lodging services for the general public, usually without food and beverage services, and is managed commercially under a business license other than a hotel license.*

7. Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-seorang atau badan hukum Koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip Koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan.

7. *Cooperative is a business entity consisting of individuals or legal entities based on cooperative principles and serving as a people's economic movement based on the principle of kinship.*

8. Koperasi melaksanakan prinsip Koperasi sebagai berikut:

- keanggotaan bersifat sukarela dan terbuka;
- pengelolaan dilakukan secara demokratis;
- pembagian sisa hasil usaha dilakukan secara adil sebanding dengan besarnya jasa usaha masing-masing anggota;
- pemberian balas jasa yang terbatas terhadap modal;
- kemandirian.

8. *Cooperatives implement the following cooperative principles:*

- membership is voluntary and open;*
- management is conducted democratically;*
- distribution of surplus is done fairly in proportion to each member's contribution;*
- limited return on capital;*
- Independence.*

9. Fasilitas Perkreditan adalah fasilitas keuangan yang memungkinkan

9. *Credit Facility is a financial arrangement that enables an individual or business*



seseorang atau badan usaha untuk meminjam uang untuk membeli produk dan membayarnya kembali dalam jangka waktu yang ditentukan. Tidak termasuk pinjaman dari perorangan.

entity to borrow funds for purchasing products, with repayment made over an agreed period. Loans from individuals are excluded.

10. Industri Mikro dan Kecil adalah industri yang memiliki tenaga kerja kurang dari 20 pekerja.

10. *Micro and Small Industries are industries that have fewer than 20 workers.*

<https://jakarta.bps.go.id>

**Tabel**
Table

5.1

Banyaknya Kelurahan dengan Keberadaan Sarana Perdagangan dan Akomodasi Menurut Kabupaten/Kota, 2025**Number of Subdistricts with the Availability of Trade and Accommodation Facilities by Regency/Municipality, 2025**

Kabupaten/Kota Regency/Municipality	Sarana Perdagangan Trading Facility		Sarana Akomodasi Accommodation Facility	
	Minimarket/Swalayan/ Supermarket Minimarket/Swalayan/ Supermarket	Restoran/Rumah Makan Restaurant/Food Stall	Hotel Hotel	Penginapan Lodging
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Kepulauan Seribu	1	2	-	6
Kota Jakarta Selatan	64	64	47	45
Kota Jakarta Timur	65	60	26	25
Kota Jakarta Pusat	44	41	40	33
Kota Jakarta Barat	56	54	36	39
Kota Jakarta Utara	31	26	23	20
DKI Jakarta	261	247	172	168



Tabel 5.2 Banyaknya Kelurahan Menurut Kabupaten/Kota dan Keberadaan Kelompok Pertokoan dan Pasar, 2025
Number of Subdistricts by Regency/Municipality and the Availability of Shopping Complexs and Markets, 2025

Kabupaten/Kota <i>Regency/Municipality</i>	Kelompok Pertokoan <i>Shopping Complexs</i>	Pasar dengan Bangunan Permanen <i>Markets in Permanent Building</i>	Pasar dengan Bangunan Semi Permanen <i>Markets in Semi Permanent Building</i>	Pasar tanpa Bangunan <i>Markets without Building</i>	Tidak ada Kelompok Pertokoan dan Pasar <i>No Shopping Complexs and Markets</i>
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Kepulauan Seribu	2	-	-	-	4
Kota Jakarta Selatan	51	27	22	12	8
Kota Jakarta Timur	55	33	26	24	5
Kota Jakarta Pusat	36	29	14	12	3
Kota Jakarta Barat	50	44	26	22	1
Kota Jakarta Utara	28	26	20	22	0
DKI Jakarta	222	159	108	92	21



Tabel 5.3 **Banyaknya Kelurahan Menurut Kabupaten/Kota dan Keberadaan Bank, 2025**
Table 5.3 **Number of Subdistricts by Regency/Municipality and the Availability of Bank, 2025**

Kabupaten/Kota Regency/Municipality	Jenis Bank The Type of Bank			Tidak Ada Bank No Bank
	Bank Umum Pemerintahan Government Bank	Bank Umum Swasta Private Bank	Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Rural Bank	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Kepulauan Seribu	1	-	-	5
Kota Jakarta Selatan	63	53	11	1
Kota Jakarta Timur	60	35	8	5
Kota Jakarta Pusat	39	38	5	4
Kota Jakarta Barat	48	46	5	2
Kota Jakarta Utara	29	20	6	2
DKI Jakarta	240	192	35	19



Tabel 5.4 Banyaknya Kelurahan dengan Keberadaan Koperasi Menurut Kabupaten/Kota, 2025
Table 5.4 Number of Subdistricts with the Availability of Cooperatives by Regency/Municipality, 2025

Kabupaten/Kota Regency/Municipality	Koperasi Unit Desa Village Cooperative Unit	Koperasi Industri Kecil dan Kerajinan Rakyat Cooperative of Small- Scale Industries and Handicrafts	Koperasi Simpan Pinjam Savings and Loan Cooperative	Koperasi Lainnya Other Cooperative
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Kepulauan Seribu	-	-	-	1
Kota Jakarta Selatan	-	7	23	11
Kota Jakarta Timur	3	8	24	-
Kota Jakarta Pusat	1	6	8	3
Kota Jakarta Barat	-	-	11	4
Kota Jakarta Utara	3	4	15	-
DKI Jakarta	7	25	81	19

**Tabel**
Table

5.5

Banyaknya Kelurahan dengan Keberadaan Fasilitas Perkreditan Menurut Kabupaten/Kota, 2025**Number of Subdistricts with the Availability of Credit Facilities by Regency/Municipality, 2025**

Kabupaten/Kota Regency/Municipality	Kredit Usaha Rakyat (KUR) People's Business Credit	Kredit Ketahanan Pangan dan Energi (KKP-E) Food and Energy Security Credit	Kredit Usaha Kecil (KUK) Small Business Credit	Kelompok Usaha Bersama (KUBE) Joint Business Group (KUBE)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Kepulauan Seribu	2	-	-	2
Kota Jakarta Selatan	32	5	21	13
Kota Jakarta Timur	25	4	16	12
Kota Jakarta Pusat	24	1	8	12
Kota Jakarta Barat	55	3	15	3
Kota Jakarta Utara	17	1	7	9
DKI Jakarta	155	14	67	51



Tabel 5.6 Banyaknya Kelurahan dengan Keberadaan Industri Mikro dan Kecil dan Sentra Industri Menurut Kabupaten/Kota, 2025
Table 5.6 *Number of Subdistricts with the Availability of Micro and Small Industries and Industrial Centers by Regency/Municipality, 2025*

Kabupaten/Kota Regency/Municipality	Industri Mikro dan Kecil Micro and Small Industries	Sentra Industri Industrial Centres
(1)	(2)	(3)
Kepulauan Seribu	5	1
Kota Jakarta Selatan	62	6
Kota Jakarta Timur	65	7
Kota Jakarta Pusat	36	4
Kota Jakarta Barat	56	1
Kota Jakarta Utara	31	6
DKI Jakarta	255	25



Tabel 5.7 **Banyaknya Kelurahan Menurut Kabupaten/Kota dan Keberadaan Produk Barang Unggulan, 2025**
Table 5.7 **Number of Subdistricts by Regency/Municipality and the Availability of Leading Products, 2025**

Kabupaten/Kota Regency/Municipality	Ada Available	Tidak Ada Not Available	Jumlah Total
(1)	(2)	(3)	(4)
Kepulauan Seribu	5	1	6
Kota Jakarta Selatan	25	40	65
Kota Jakarta Timur	17	48	65
Kota Jakarta Pusat	11	33	44
Kota Jakarta Barat	19	37	56
Kota Jakarta Utara	14	17	31
DKI Jakarta	91	176	267

Tidak terdapat desa di provinsi DKI Jakarta, karena DKI Jakarta merupakan Kota dengan Sistem Administrasi Perkotaan, sehingga seluruh wilayahnya merupakan Kelurahan

DKI Jakarta does not have villages, as it operates under an urban administrative system. Instead, all its areas are designated as Subdistrict.



Penjelasan Teknis Keuangan dan Aset Desa

1. Sistem Informasi Desa meliputi data desa, data pembangunan desa, kawasan perdesaan, serta informasi lain yang berkaitan dengan pembangunan desa dan pembangunan kawasan perdesaan. Sistem Informasi Desa dikelola oleh Pemerintah Desa dan dapat diakses oleh masyarakat desa dan semua pemangku kepentingan.
2. Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) merupakan aplikasi yang dikembangkan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dalam rangka meningkatkan kualitas tata kelola keuangan desa.
3. Aset Desa adalah barang milik desa yang berasal dari kekayaan asli desa, dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa atau perolehan hak lainnya yang sah. Aset desa yang dicatat di Podes dapat berupa tanah kas desa/ulayat, tambatan perahu, pasar desa, bangunan milik desa, hutan milik desa, mata air milik desa, tempat wisata/pemandian umum, serta aset lainnya milik desa.
4. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh kepala desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.

Technical Notes Village Financial and Assets

1. *The Village Information System includes village data, village development data, rural areas, and other information related to village development and rural area development. The Village Information System is managed by the Village Government and can be accessed by the village community and all stakeholders.*
2. *The Village Financial System (SISKEUDES) is an application developed by the Financial and Development Supervisory Agency (BPKP) in order to improve the quality of village financial management.*
3. *Village assets are items owned by the village that originate from the village's original wealth, are purchased or acquired using the Village Revenue and Expenditure Budget, or are obtained through other legal means. Village assets recorded in Podes can include village treasury land/customary land, boat moorings, village markets, village-owned buildings, village-owned forests, village-owned springs, tourist attractions/public bathing areas, and other village-owned assets.*
4. *Village regulations are laws and regulations established by the village head after discussion and agreement with the Village Consultative Agency.*



Tabel 6.1 **Banyaknya Desa Menurut Kabupaten/Kota dan Keberadaan Sistem Informasi Desa, 2025**
Table 6.1 **Number of Villages by Regency/Municipality and Availability of Village Information System, 2025**

Kabupaten/Kota Regency/Municipality	Ada, Diperbaharui Available, Update	Ada, Tidak Diperbaharui Available, Not Update	Tidak Ada None
(1)	(2)	(3)	(4)
Kepulauan Seribu	-	-	-
Kota Jakarta Selatan	-	-	-
Kota Jakarta Timur	-	-	-
Kota Jakarta Pusat	-	-	-
Kota Jakarta Barat	-	-	-
Kota Jakarta Utara	-	-	-
DKI Jakarta	-	-	-

<https://jakarta.bps.go.id>



Tabel 6.2 Banyaknya Desa Menurut Kabupaten/Kota dan Keberadaan Sistem Keuangan Desa, 2025
Table 6.2 *Number of Villages by Regency/Municipality and Village Financial System, 2025*

Kabupaten/Kota <i>Regency/Municipality</i>	Ada, Diperbaharui <i>Available, Update</i>	Ada, Tidak Diperbaharui <i>Available, Not Update</i>	Tidak Ada <i>None</i>
(1)	(2)	(3)	(4)
Kepulauan Seribu	-	-	-
Kota Jakarta Selatan	-	-	-
Kota Jakarta Timur	-	-	-
Kota Jakarta Pusat	-	-	-
Kota Jakarta Barat	-	-	-
Kota Jakarta Utara	-	-	-
DKI Jakarta	-	-	-

**Tabel**
Table

6.3

Banyaknya Desa dengan Kepemilikan Badan Usaha dan Aset Desa Menurut Kabupaten/ Kota, 2025**Number of Villages with the Ownership of Enterprise and Village Assets by Regency/ Municipality, 2025**

Kabupaten/Kota Regency/Municipality	Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Village-Owned Enterprise (BUMDes)	Tanah Kas Desa/Ulayat Village's Communal Land	Tambatan Perahu Mooring	Pasar Desa Village's Market	Bangunan Milik Desa Village's Building
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Kepulauan Seribu	-	-	-	-	-
Kota Jakarta Selatan	-	-	-	-	-
Kota Jakarta Timur	-	-	-	-	-
Kota Jakarta Pusat	-	-	-	-	-
Kota Jakarta Barat	-	-	-	-	-
Kota Jakarta Utara	-	-	-	-	-
DKI Jakarta	-	-	-	-	-

Lanjutan Tabel
Continued Table 6.3

Kabupaten/Kota <i>Regency/Municipality</i>	Hutan Milik Desa <i>Village's Forest</i>	Mata Air Milik Desa <i>Village's Springs</i>	Tempat Wisata/ Pemandian Umum <i>Tourist Place/Public Bath</i>	Lainnya <i>Others</i>
(1)	(7)	(8)	(9)	(10)
Kepulauan Seribu	-	-	-	-
Kota Jakarta Selatan	-	-	-	-
Kota Jakarta Timur	-	-	-	-
Kota Jakarta Pusat	-	-	-	-
Kota Jakarta Barat	-	-	-	-
Kota Jakarta Utara	-	-	-	-
DKI Jakarta	-	-	-	-



Tabel 6.4 **Banyaknya Desa Menurut Kabupaten/Kota dan Keberadaan Peraturan Desa Tahun 2024**
Table 6.4 **Number of Villages by Regency/Municipality and Availability of Village Regulation for 2024**

Kabupaten/Kota Regency/Municipality	Ada Available	Tidak Ada Not Available	Jumlah Total
(1)	(2)	(3)	(4)
Kepulauan Seribu	-	-	-
Kota Jakarta Selatan	-	-	-
Kota Jakarta Timur	-	-	-
Kota Jakarta Pusat	-	-	-
Kota Jakarta Barat	-	-	-
Kota Jakarta Utara	-	-	-
DKI Jakarta	-	-	-

<https://jakarta.bps.go.id>

Keterangan Pemerintah Kelurahan Subdistrict Government Information

Jumlah Kelurahan Menurut Jenis Kelamin Lurah *Number of Subdistricts by Sex of Subdistrict Head*



Laki-Laki
Male

203

kelurahan
subdistricts



Perempuan
Female

49

kelurahan
subdistricts

Jumlah Kelurahan Menurut Tingkat Pendidikan Tertinggi Lurah *Number of Subdistricts by Education Attainment of Subdistrict Head*

Kurang dari SD
Below Elementary
School

0

kelurahan
subdistricts



SD-SMP
Elementary -
Junior High School

0

kelurahan
subdistricts



SMA
Senior High
School

0

kelurahan
subdistricts



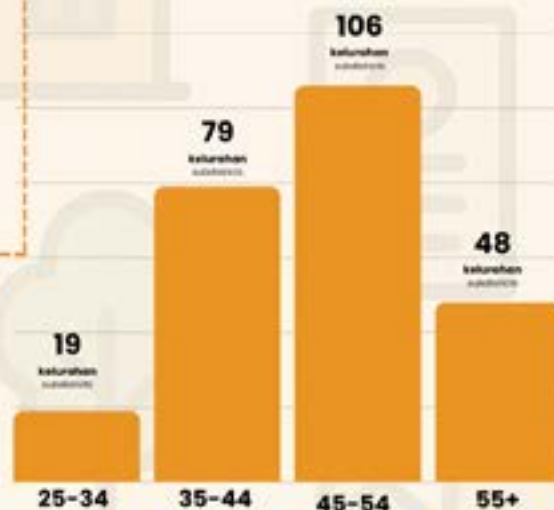
Perguruan Tinggi
Higher
Education

252

kelurahan
subdistricts



Jumlah Kelurahan Menurut Kelompok Umur Lurah *Number of Subdistricts by Age Group of Subdistrict Head*





Penjelasan Teknis Keterangan Pemerintah Desa/Kelurahan

1. Pemerintah Desa/Kelurahan adalah kepala desa/lurah atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat desa/kelurahan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa/kelurahan. Perangkat desa/kelurahan terdiri dari sekretariat desa/kelurahan, pelaksana kewilayahan, dan pelaksana teknis.
2. Kepala Desa/Lurah adalah pejabat pemerintah desa/kelurahan yang mempunyai wewenang, tugas, dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga desa/kelurahannya dan melaksanakan tugas dari pemerintah dan pemerintah daerah.
3. Sekretaris Desa/Kelurahan berkedudukan sebagai unsur pimpinan sekretariat desa/kelurahan. Sekretaris desa/kelurahan bertugas membantu kepala desa/lurah dalam bidang administrasi pemerintahan.
4. Sekretariat Desa/Kelurahan dipimpin oleh sekretaris desa/kelurahan dibantu oleh unsur staf sekretariat yang bertugas membantu kepala desa/lurah dalam bidang administrasi pemerintahan. Sekretariat desa/kelurahan paling banyak terdiri atas 3 (tiga) urusan yaitu urusan tata usaha dan umum, urusan keuangan, dan urusan perencanaan, dan paling sedikit

Technical Notes Village/Subdistrict Government Information

1. The Village/Subdistrict Government refers to the head of village/subdistrict, or any other equivalent designation, assisted by village/subdistrict officials who administer village/subdistrict governance. The village/subdistrict officials include the village/subdistrict secretariat, regional officers, and technical officers.
2. Head of Village/Subdistrict is a village/subdistrict government official who have the authority, duties and obligations to organize and manage their village households and carry out duties from the central and regional governments.
3. The Village/Subdistrict Secretary serves as the head of the village/subdistrict secretariat. The village/subdistrict secretary is responsible for assisting the head of village/subdistrict in government administration.
4. Village/Subdistrict Secretariat is led by village/subdistrict secretary and assisted by secretarial staff in assisting the head of village/subdistrict in public administration. The village/subdistrict secretariat consists of maximum 3 (three) divisions: administration and general affairs, financial affairs, and planning, and minimum 2 (two) divisions: general affairs and planning,



2 (dua) urusan yaitu urusan umum dan perencanaan, dan urusan keuangan.

5. Pelaksana Kewilayahan merupakan unsur pembantu kepala desa/lurah sebagai satuan tugas kewilayahan.

6. Pelaksana Teknis merupakan unsur pembantu kepala desa/lurah sebagai pelaksana tugas operasional. Pelaksana teknis paling banyak terdiri atas tiga seksi yaitu seksi pemerintahan, seksi kesejahteraan dan seksi pelayanan, paling sedikit dua seksi yaitu seksi pemerintahan, serta seksi kesejahteraan dan pelayanan.

and financial affairs.

5. *Regional Officers serve as supporting elements to the head of village/subdistrict and act as territorial task units.*

6. *Technical Officers serve as supporting elements to the head of village/subdistrict and act as operational task unit. The technical officers consist of maximum three sections: the government section, the welfare section, and the public services section; or minimum two sections : the government section and the combined welfare and public services section.*

<https://jakarta.bps.go.id>



Tabel 7.1 Banyaknya Kelurahan dengan Aparat Pemerintah Desa/Kelurahan Menurut Kabupaten/Kota, 2025
Table 7.1 *Number of Subdistricts with the Existence of the Village/Subdistrict Government by Regency/Municipality, 2025*

Kabupaten/Kota Regency/Municipality	Kepala Desa/Lurah Head of Village/ Subdistrict	Sekretaris Desa/Kelurahan Secretary of Village/Subdistrict	Pelaksana Kewilayahan Regional Officers	Pelaksana Teknis Technical Officers
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Kepulauan Seribu	6	4	4	6
Kota Jakarta Selatan	63	62	-	65
Kota Jakarta Timur	57	62	-	65
Kota Jakarta Pusat	43	41	-	44
Kota Jakarta Barat	52	54	-	56
Kota Jakarta Utara	31	30	-	31
DKI Jakarta	252	253	4	267

**Tabel**
Table

7.2

Banyaknya Kelurahan dengan Kepala Desa/Lurah dan/atau Sekretaris Desa/Kelurahan Menurut Kabupaten/Kota dan Jenis Kelamin, 2025**Number of Subdistricts with the Presence of Village/Subdistrict Head and Village/Subdistrict Secretary by Regency/Municipality and Sex, 2025**

Kabupaten/Kota Regency/Municipality	Kepala Desa/Lurah Head of Village/Subdistrict			Sekretaris Desa/Kelurahan Secretary of Village/Subdistrict		
	Laki-laki Male	Perempuan Female	Jumlah Total	Laki-laki Male	Perempuan Female	Jumlah Total
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Kepulauan Seribu	5	1	6	4	-	4
Kota Jakarta Selatan	45	18	63	38	24	62
Kota Jakarta Timur	44	13	57	35	27	62
Kota Jakarta Pusat	35	8	43	24	17	41
Kota Jakarta Barat	48	4	52	41	13	54
Kota Jakarta Utara	26	5	31	21	9	30
DKI Jakarta	203	49	252	163	90	253



Tabel 7.3 Banyaknya Kelurahan dengan Kepala Desa/Lurah Menurut Kabupaten/Kota dan Kelompok Umur, 2025
Table 7.3 *Number of Subdistricts with the Presence of Village/Subdistrict Head by Regency/Municipality and Age Group, 2025*

Kabupaten/Kota Regency/Municipality	≤ 24	25 – 34	35 – 44	45 – 54	55+	Jumlah Total
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Kepulauan Seribu	-	1	1	4	-	6
Kota Jakarta Selatan	-	4	19	30	10	63
Kota Jakarta Timur	-	-	18	27	12	57
Kota Jakarta Pusat	-	7	16	15	5	43
Kota Jakarta Barat	-	5	17	17	13	52
Kota Jakarta Utara	-	2	8	13	8	31
DKI Jakarta	-	19	79	106	48	252

**Tabel**
Table

7.4

Banyaknya Kelurahan dengan Sekretaris Desa/Kelurahan Menurut Kabupaten/Kota dan Kelompok Umur, 2025***Number of Subdistricts with the Presence of Village/Subdistrict Secretary by Regency/Municipality and Age Group, 2025***

Kabupaten/Kota Regency/Municipality	≤ 24	25 – 34	35 – 44	45 – 54	55+	Jumlah Total
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Kepulauan Seribu	-	-	3	1	-	4
Kota Jakarta Selatan	-	3	25	24	10	62
Kota Jakarta Timur	-	3	18	29	12	62
Kota Jakarta Pusat	-	6	19	7	9	41
Kota Jakarta Barat	-	4	23	19	8	54
Kota Jakarta Utara	-	2	10	12	6	30
DKI Jakarta	-	18	98	92	45	253



Tabel 7.5 Banyaknya Kelurahan dengan Kepala Desa/Lurah Menurut Kabupaten/Kota dan Tingkat Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan, 2025
Number of Subdistricts with the Presence of Village/Subdistrict Head by Regency/Municipality and Education Attainment, 2025

Kabupaten/Kota Regency/Municipality	Tidak Pernah Sekolah Never Attending School	Tidak Tamat SD Not Completed Elementary School	SD dan Sederajat Elementary School	SMP dan Sederajat Junior High School	SMU dan Sederajat Senior High School
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Kepulauan Seribu	-	-	-	-	-
Kota Jakarta Selatan	-	-	-	-	-
Kota Jakarta Timur	-	-	-	-	-
Kota Jakarta Pusat	-	-	-	-	-
Kota Jakarta Barat	-	-	-	-	-
Kota Jakarta Utara	-	-	-	-	-
DKI Jakarta	-	-	-	-	-



Lanjutan Tabel
Continued Table 7.5

Kabupaten/Kota Regency/Municipality	Akademi/DIII Academy/ Associate's Degree	Diploma IV/S1 Bachelor Degree/ Undergraduate	S2 Graduate	S3 Post Graduate	Jumlah Total
(1)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
Kepulauan Seribu	-	1	5	-	6
Kota Jakarta Selatan	-	10	53	-	63
Kota Jakarta Timur	-	14	43	-	57
Kota Jakarta Pusat	-	11	32	-	43
Kota Jakarta Barat	-	20	32	-	52
Kota Jakarta Utara	1	5	25	-	31
DKI Jakarta	1	61	190	-	252



Tabel 7.6 Banyaknya Kelurahan dengan Sekretaris Desa/Lurah Menurut Kabupaten/Kota dan Tingkat Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan, 2025
Number of Subdistricts with the Presence of Village/Subdistrict Secretary by Regency/Municipality and Education Attainment, 2025

Kabupaten/Kota Regency/Municipality	Tidak Pernah Sekolah Never Attending School	Tidak Tamat SD Not Completed Elementary School	SD dan Sederajat Elementary School	SMP dan Sederajat Junior High School	SMU dan Sederajat Senior High School
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Kepulauan Seribu	-	-	-	-	-
Kota Jakarta Selatan	-	-	-	-	-
Kota Jakarta Timur	-	-	-	-	-
Kota Jakarta Pusat	-	-	-	-	-
Kota Jakarta Barat	-	-	-	-	-
Kota Jakarta Utara	-	-	-	-	-
DKI Jakarta	-	-	-	-	-

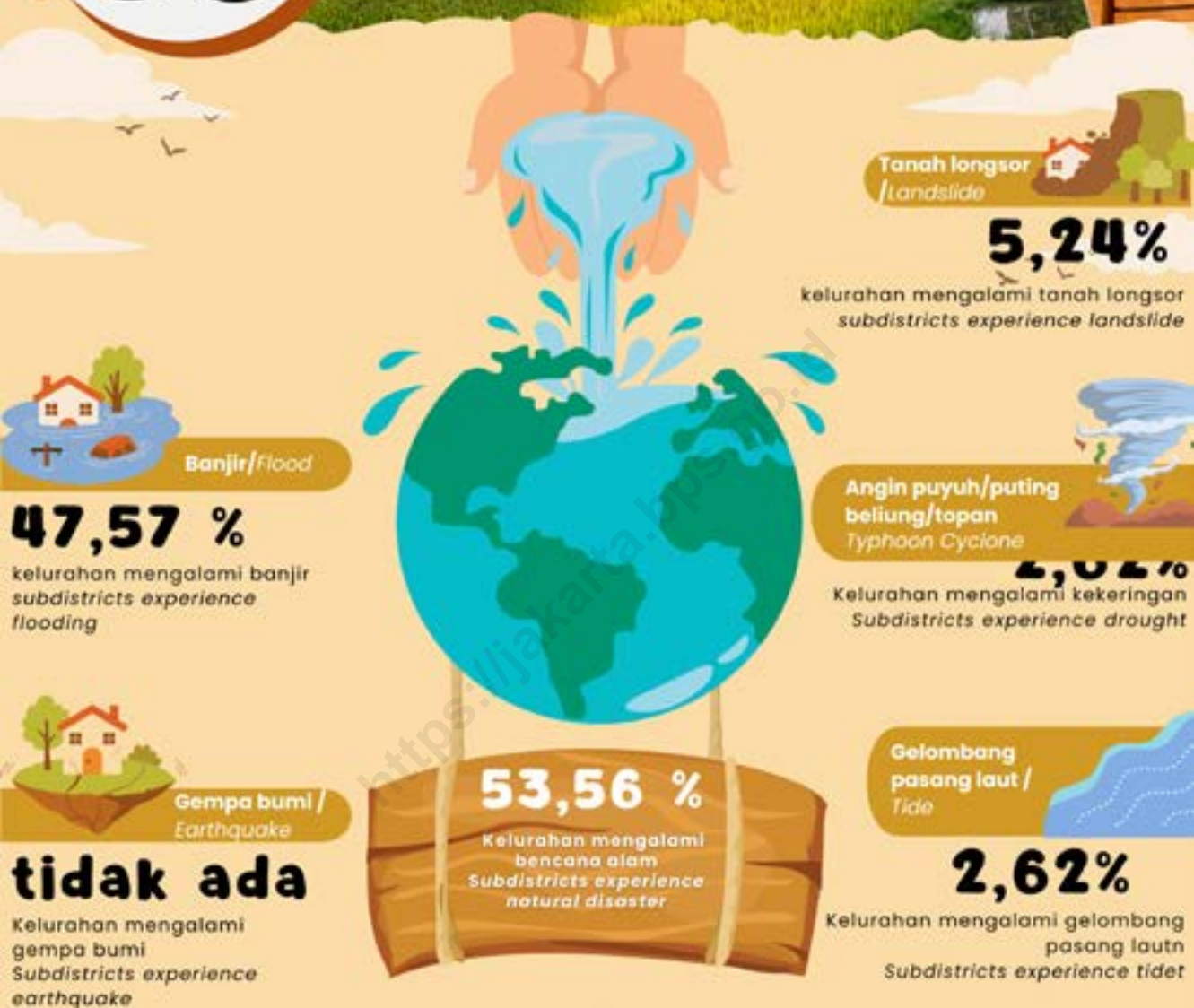


Lanjutan Tabel
Continued Table 7.6

Kabupaten/Kota Regency/Municipality	Akademi/DIII Academy/ Associate's Degree	Diploma IV/S1 Bachelor Degree/ Undergraduate	S2 Graduate	S3 Post Graduate	Jumlah Total
(1)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
Kepulauan Seribu	-	3	1	-	4
Kota Jakarta Selatan	-	25	37	-	62
Kota Jakarta Timur	-	30	31	1	62
Kota Jakarta Pusat	1	16	24	-	41
Kota Jakarta Barat	-	22	32	-	54
Kota Jakarta Utara	1	7	22	-	30
DKI Jakarta	2	103	147	1	253

Bencana Alam dan Gangguan Keamanan

Natural Disasters and Security Disturbances



*Periode bencana alam adalah pada 2024 hingga Mei 2025 / The natural disaster period is from 2024 to May 2025



Penjelasan Teknis Bencana Alam dan Gangguan Keamanan

1. Bencana Alam adalah peristiwa atau serangkaian peristiwa bencana yang terjadi dalam kurun waktu Januari 2024 hingga Mei 2025. Dalam suatu kejadian bencana alam dapat menimbulkan beberapa peristiwa alam lainnya seperti tanah longsor, banjir, banjir bandang, gempa bumi, tsunami, gelombang pasang laut, angin puyuh/puting beliung/topan, gunung meletus, kebakaran hutan dan lahan, kekeringan, dan abrasi, sehingga mengakibatkan kerugian materi maupun non-materi.
2. Sistem Peringatan Dini Bencana Alam adalah serangkaian kegiatan pemberian peringatan sesegera mungkin kepada masyarakat tentang kemungkinan terjadinya bencana alam pada suatu tempat oleh lembaga yang berwenang. Sistem peringatan dini bencana alam yang dimaksud, misalnya peringatan dini terhadap warga mengenai status ketinggian pintu air, status gunung, dan sebagainya, yang disampaikan melalui kentongan, pemberitahuan dengan *loud speaker*, dan lainnya.
3. Pembuatan, Perawatan, atau Normalisasi: Sungai, Kanal, Tanggul, dll, adalah contoh kegiatan yang dapat dilakukan sebagai upaya pencegahan bencana. Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 21

Technical Notes Natural Disaster and Security Disturbance

1. *Natural Disaster is an event or series of disaster events that occurred in the period from January 2024 to May 2025 that threaten and disrupt the lives and livelihoods caused by natural factors such as: landslides, floods, flash floods, earth-quake, tsunami, tide, typhoons/cyclone, volcanic eruptions, forest and land fires, drought, and abrasion, so it can lead to result in loss of material and non-material.*
2. *Natural Disaster Early Warning System is a series of activities warnings about the possibility of a natural disaster to local community by regulatory authorities. The natural disaster early warning system referred here is early warning to residents regarding the status of sluice height, mountain status, etc., which is conveyed through kentongan, notification with loud speakers, and others.*
3. *Construction, Maintenance or Normalization: Rivers, Canals, Embankments, etc, are activities that are examples of what can be done as disaster prevention efforts. According to Government Regulation Number 21 of 2008 concerning Implementation*



Tahun 2008 Tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana, pencegahan dilakukan dengan cara mengurangi ancaman bencana dan kerentanan pihak yang terancam bencana.

of Disaster Management, prevention is carried out by reducing the threat of disasters and the vulnerability of those threatened by disaster.

4. Sistem Peringatan Dini Tsunami adalah fasilitas pendeteksian kejadian bencana alam tsunami untuk memberikan peringatan dini sebelum bencana alam tsunami datang/menimpa desa/kelurahan. Sistem ini menggunakan peralatan teknologi tinggi sebagai alat atau sarana untuk memonitor kapan dan di mana bencana alam tsunami itu akan terjadi. Cakupan wilayah sistem peringatan dini tsunami meliputi semua desa/kelurahan yang dapat dijangkau oleh sistem tersebut dan bukan hanya desa/kelurahan dimana lokasi alat tersebut berada.

4. *Tsunami Early Warning System is a facility of early detection of tsunami occurrence to provide early warning for the population before the tsunami hit the village/subdistrict. This system uses high technology equipment as a tool to monitor when and where the tsunami will occur. The coverage area of the tsunami early warning system covers all villages/subdistricts that can be reached by the system and not just the village/subdistrict where the location of the equipment is located.*

5. Perlengkapan Keselamatan adalah perlengkapan yang diupayakan/disediakan oleh aparat setempat maupun warga desa untukantisipasi maupun evakuasi korban saat terjadi bencana alam, seperti: perahu karet, tenda, persediaan masker, dan sebagainya.

5. *Safety Equipment is equipment that sought/provided by local apparatus or village community to anticipate the occurrence of natural disasters, such as providing rubber boats, tents, masks stock, etc.*

6. Rambu-rambu dan Jalur Evakuasi adalah rambu-rambu/tanda dan jalur atau rute khusus yang digunakan untuk evakuasi pada saat terjadi bencana alam. Rambu-rambu dan jalur atau rute ini bisa tersedia di desa/kelurahan dalam bentuk apapun, misal peta,

6. *Evacuation Route is a path or a special route that is used for evacuation when a natural disaster is occurred. These routes could be available in the village in any form, e.g. maps, evacuation instructions, and muster point. The most important thing is that in case of a natural disaster,*



petunjuk evakuasi, dan lokasi aman untuk berkumpul (*muster point*). Hal yang terpenting adalah jika sewaktu waktu terjadi bencana alam, warga desa/kelurahan tahu jalur atau rute evakuasi yang harus dilewati.

the villagers have clear evacuation route that must be followed.

7. Pupuk Kimia atau Pupuk Anorganik adalah pupuk hasil proses rekayasa secara kimia, fisik dan/atau biologis, dan merupakan hasil industri atau pabrik pembuat pupuk (Peraturan Menteri Pertanian Nomor : 43/Permentan/SR.140/8/2011).
 8. Pestisida adalah zat atau senyawa kimia, zat pengatur dan perangsang tumbuh, bahan lain, serta organisme renik, atau virus yang digunakan untuk melakukan perlindungan tanaman (Undang-Undang No.12 Tahun 1992 Tentang Sistem Budidaya Tanaman).
 9. Cuaca Ekstrem adalah kejadian fenomena alam yang ditandai oleh kondisi curah hujan, arah dan kecepatan angin, suhu udara, kelembapan udara, dan jarak pandang yang dapat mengakibatkan kerugian terutama keselamatan jiwa dan harta (Peraturan BMKG No. 9 Tahun 2022 Tentang Penyediaan Dan Penyebarluasan Peringatan Dini Cuaca Ekstrem).
 10. Penggundulan Hutan untuk Permukiman, Kebun, Tambang, dan Lainnya adalah kegiatan penebangan atau alih fungsi hutan menjadi permukiman,
7. *Chemical or Inorganic Fertilizers are fertilizers produced through chemical, physical, and/or biological engineering processes and are manufactured by the fertilizer industry or factories (Minister of Agriculture Regulation No. 43/Permentan/SR.140/8/2011).*
 8. *Pesticides are chemical substances or compounds, growth regulators and stimulants, other materials, and microorganisms or viruses used to protect plants (Law No. 12 of 1992 concerning Plant Cultivation Systems).*
 9. *Extreme Weather is a natural phenomenon characterized by rainfall, wind direction and speed, air temperature, humidity, and visibility that can result in losses, especially to life and property (BMKG Regulation No. 9 of 2022 concerning the Provision and Dissemination of Early Warnings for Extreme Weather).*
 10. *Deforestation for Settlement, Plantations, Mining, and Other Purposes is the clearing or conversion of forests into settlements, plantations,*



kebun, atau lahan tambang yang menyebabkan berkurangnya daya serap karbon dan meningkatnya emisi gas rumah kaca.

or mining sites, resulting in reduced carbon sequestration and increased greenhouse gas emissions.

11. Penggunaan Pupuk Kimia dan Pestisida adalah penggunaan bahan kimia sintetis dalam kegiatan pertanian yang dapat menghasilkan emisi gas rumah kaca serta menimbulkan pencemaran tanah dan air.

11. Use of Chemical Fertilisers and Pesticides is the use of synthetic chemicals in agricultural activities that can produce greenhouse gas emissions and cause soil and water pollution.

12. Pembakaran atau Pembuangan Sampah di Tempat Ilegal adalah praktik membakar atau membuang sampah di lokasi tidak resmi yang menimbulkan emisi karbon dioksida (CO₂) dan metana (CH₄) serta mencemari lingkungan sekitar.

12. Burning or Disposal of Waste in Illegal Locations is the practice of burning or disposing of waste in unauthorised locations, which causes emissions of carbon dioxide (CO₂) and methane (CH₄) and pollutes the surrounding environment.

13. Peningkatan Jumlah Pabrik dan Industri adalah pertambahan fasilitas industri yang menghasilkan emisi gas rumah kaca melalui proses produksi dan pembakaran bahan bakar fosil.

13. Increase in the Number of Factories and Industries is the addition of industrial facilities that produce greenhouse gas emissions through production processes and the burning of fossil fuels.

14. Peningkatan Kepemilikan Kendaraan Bermotor Roda Empat atau Lebih adalah meningkatnya jumlah kendaraan bermotor yang menghasilkan emisi gas buang penyumbang utama pemanasan global dan pencemaran udara.

14. Increase in the Ownership of Four-Wheel or More Motor Vehicles is the increase in the number of motor vehicles that produce exhaust emissions, which are a major contributor to global warming and air pollution.

15. Kelangkaan Air akibat Kemarau Panjang adalah kondisi berkurangnya ketersediaan air bersih di desa/kelurahan akibat kemarau panjang dan perubahan pola hujan yang tidak menentu.

15. Water scarcity due to prolonged drought is a condition in which the availability of clean water in villages/subdistricts is reduced due to prolonged drought and unpredictable rainfall patterns.



16. Kesulitan Bertani atau Melaut adalah situasi ketika aktivitas pertanian atau perikanan terganggu akibat kekeringan, serangan hama, perubahan musim, atau cuaca laut yang ekstrem.
17. Kehilangan Mata Pencaharian yang Bergantung pada Alam adalah kehilangan pekerjaan atau sumber penghasilan yang bergantung pada sumber daya alam, seperti pertanian, perikanan, kehutanan, perkebunan, pertambangan, atau pariwisata alam, akibat dampak perubahan iklim seperti banjir, kekeringan, kebakaran hutan, atau bencana lainnya.
18. Gangguan Kesehatan akibat Perubahan Iklim adalah kasus penyakit seperti pneumonia, malaria, atau DBD yang meningkat di desa/kelurahan dalam 5 tahun terakhir akibat perubahan iklim.
19. Kerusakan Rumah/Harta Benda akibat Bencana Terkait Iklim adalah kerusakan fisik pada rumah dan barang milik warga akibat bencana terkait iklim seperti banjir, longsor, puting beliung, kekeringan, atau kebakaran hutan.
20. Gagal Panen, Rusaknya Tanaman, atau Kematian Ternak Akibat Bencana Terkait Iklim adalah kondisi di mana hasil pertanian atau peternakan menurun drastis atau hilang akibat cuaca ekstrem, kekeringan, banjir, atau perubahan suhu yang tidak menentu.
16. *Difficulties in Farming or Fishing are situations where agricultural or fishing activities are disrupted due to drought, pest infestations, seasonal changes, or extreme sea conditions.*
17. *Loss of Nature-Dependent Livelihoods refers to the loss of jobs or sources of income that depend on natural resources, such as agriculture, fisheries, forestry, plantations, mining, or nature-based tourism, due to the impacts of climate change, such as floods, droughts, forest fires, or other disasters.*
18. *Health Problems due to Climate Change are cases of diseases such as pneumonia, malaria, or dengue fever that have increased in villages/subdistricts in the last 5 years due to climate change.*
19. *Damage to Houses/Property due to Climate-Related Disasters is physical damage to residents' houses and property due to climate-related disasters such as floods, landslides, tornadoes, droughts, or forest fires.*
20. *Crop Failure, Crop Damage, or Livestock Deaths due to Climate-Related Disasters are conditions in which agricultural or livestock yields decline drastically or are lost due to extreme weather, drought, floods, or erratic temperature changes.*



21. Perkelahian Massal adalah perkelahian yang terjadi secara massal melibatkan banyak pelaku atau melibatkan minimal dua orang setiap kelompoknya. Perkelahian massal biasanya melibatkan: antar kelompok masyarakat, antar pelajar, antar suku, atau lainnya yang terjadi di desa selama setahun terakhir.
22. Inisiator Penyelesaian Perkelahian Massal adalah orang atau sekelompok orang yang berinisiatif secara aktif untuk mendamaikan massa yang sedang bertikai.
23. Aparat Keamanan meliputi aparat kepolisian, TNI, Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), Satuan Pengamanan (Satpam), dan sebagainya.
24. Aparat Pemerintah meliputi aparatur pemerintah daerah, kecamatan, desa dan sebagainya.
25. Tokoh Masyarakat adalah seseorang yang memiliki pengaruh atau wibawa di lingkungannya. Contoh: Ketua RT/RW, Ketua Adat, pengurus ormas, dan sebagainya.
26. Tokoh Agama adalah orang yang memiliki kharisma dalam agama dan menjadi panutan orang-orang sekitar. Contoh: ulama/ustadz, pendeta, dan sebagainya.
21. *A Mass Brawl is a fight that occurs on a large scale, involving many people or at least two people per group. Mass brawls typically involve: intergroup violence, students, interethnic groups, or other incidents that have occurred in a village over the past year.*
22. *The Initiator of the Resolution of Mass brawl is a person or group of people who actively takes the initiative to reconcile the masses who are fighting.*
23. *Security Forces include the police, military (TNI), Civil Service Police Unit (Satpol PP), Security Unit (Satpam), and so on.*
24. *Government Official includes the local government officials, subdistrict, village, and so on.*
25. *Community Figure is someone who has influence or authority in their communities. For example: Head of RT/RW, traditional leader or community organization leader (Organisasi Masyarakat), and so on.*
26. *Religious Leader is someone who have charisma in their religion and serves as a role model for those around them. For example: Ustadz, Pastor, and so on.*



Tabel 8.1 Banyaknya Kelurahan Menurut Kabupaten/Kota dan Jenis Upaya Antisipasi/Mitigasi Bencana Alam, 2025
Table 8.1 *Number of Subdistricts by Regency/Municipality and the Type of Effort in Anticipation/Mitigation of Natural Disaster, 2025*

Kabupaten/Kota <i>Regency/Municipality</i>	Sistem Peringatan Dini Bencana Alam <i>Natural Disaster Early Warning System</i>	Sistem Peringatan Dini Tsunami <i>Tsunami Early Warning System</i>	Perlengkapan Keselamatan <i>Safety Equipment</i>	Rambu-Rambu dan Jalur Evakuasi <i>Signs and Evacuation Route</i>	Pembuatan, Perawatan, atau Normalisasi: Sungai, Kanal, Tanggul, dll <i>Construction, Maintenance, or Normalization: Rivers, Canals, Embankment, etc</i>
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Kepulauan Seribu	-	-	6	2	4
Kota Jakarta Selatan	40	-	61	44	48
Kota Jakarta Timur	33	-	58	44	49
Kota Jakarta Pusat	14	-	34	29	28
Kota Jakarta Barat	30	-	52	43	43
Kota Jakarta Utara	20	2	29	24	29
DKI Jakarta	137	2	240	186	201



Tabel 8.2 **Banyaknya Kelurahan Menurut Kabupaten/Kota dan Jenis Bencana Alam, 2025¹**
Table 8.2 **Number of Subdistricts by Regency/Municipality and Type of Natural Disaster, 2025¹**

Kabupaten/Kota Regency/Municipality	Tanah Longsor Landslide	Banjir Flood	Banjir Bandang Flash Flood	Gempa Bumi Earth-quake	Tsunami Tsunami	Gelombang Pasang Laut Tide
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Kepulauan Seribu	-	3	-	-	-	5
Kota Jakarta Selatan	7	38	-	-	-	-
Kota Jakarta Timur	2	37	-	-	-	-
Kota Jakarta Pusat	1	9	-	-	-	-
Kota Jakarta Barat	4	22	-	-	-	-
Kota Jakarta Utara	-	18	-	-	-	2
DKI Jakarta	14	127	-	-	-	7

Catatan: ¹ Data mencerminkan kondisi pada Januari 2024 - May 2025.

Note: ¹ The data reflects conditions in January 2024 - May 2025.



Lanjutan Tabel
Continued Table 8.2

Kabupaten/Kota <i>Regency/Municipality</i>	Angin Puyuh/ Puting Beliung/Topan <i>Typhoon Cyclone</i>	Gunung Meletus <i>Volcanic Eruption</i>	Kebakaran Hutan dan Lahan <i>Forest and Land Fires</i>	Kekeringan <i>Drought</i>	Abrasi <i>Abration</i>	Tidak Ada Bencana Alam <i>No Natural Disaster</i>
(1)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
Kepulauan Seribu	1	-	-	-	-	-
Kota Jakarta Selatan	1	-	-	-	-	25
Kota Jakarta Timur	2	-	-	-	-	26
Kota Jakarta Pusat	-	-	-	-	-	34
Kota Jakarta Barat	3	-	-	-	-	28
Kota Jakarta Utara	-	-	-	-	-	11
DKI Jakarta	7	-	-	-	-	124

Catatan: ¹ Data mencerminkan kondisi pada Januari 2024 - May 2025.

Note: ¹ The data reflects conditions in January 2024 - May 2025.

**Tabel**
Table

8.3

Banyaknya Kelurahan dengan Keberadaan Aktivitas yang Berpotensi Meningkatkan Emisi Gas Rumah Kaca Menurut Kabupaten/Kota, 2025¹
Number of Subdistricts with Activities that Have the Potential to Increase Greenhouse Gas Emissions by Regency/Municipality, 2025¹

Kabupaten/Kota <i>Regency/Municipality</i>	Penggundulan Hutan untuk Permukiman, Kebun, Tambang, dll <i>Deforestation for Settlements, Plantations, Mines, etc.</i>	Peningkatan Penggunaan Pupuk Kimia dan Pestisida <i>Increased Use of Chemical Fertilisers and Pesticides</i>	Peningkatan Pembakaran dan Pembuangan Sampah di Tempat Ilegal <i>Increased Burning and Disposal of Waste in Illegal Dumpsites</i>
(1)	(2)	(3)	(4)
Kepulauan Seribu	-	-	-
Kota Jakarta Selatan	-	-	11
Kota Jakarta Timur	-	2	7
Kota Jakarta Pusat	-	-	4
Kota Jakarta Barat	-	-	3
Kota Jakarta Utara	-	1	2
DKI Jakarta	-	3	27

Catatan: ¹ Data mencerminkan kondisi selama lima tahun terakhir sebelum kegiatan Podes 2025.

Note: ¹ The data reflects conditions over the five years prior to the Podes 2025 activity.



Lanjutan Tabel
Continued Table 8.3

Kabupaten/Kota Regency/Municipality	Peningkatan Jumlah Pabrik dan Industri Increase in the Number of Factories and Industries	Peningkatan Kepemilikan Kendaraan Bermotor Roda Empat atau Lebih Increase in Ownership of Motor Vehicles with Four or More Wheels
(1)	(5)	(6)
Kepulauan Seribu	-	1
Kota Jakarta Selatan	2	48
Kota Jakarta Timur	3	42
Kota Jakarta Pusat	-	20
Kota Jakarta Barat	3	40
Kota Jakarta Utara	-	18
DKI Jakarta	8	169

Catatan: ¹ Data mencerminkan kondisi selama lima tahun terakhir sebelum kegiatan Podes 2025.

Note: ¹ The data reflects conditions over the five years prior to the Podes 2025 activity.



Tabel 8.4 Banyaknya Kelurahan dengan Keberadaan Kejadian yang Dirasakan Penduduk Akibat Perubahan Iklim Menurut Kabupaten/Kota, 2025¹
Number of Subdistricts with Events Perceived by Residents as Resulting from Climate Change by Regency/Municipality, 2025¹

Kabupaten/Kota <i>Regency/Municipality</i>	Kelangkaan Air Akibat Kemarau Panjang <i>Water Scarcity due to Prolonged Drought</i>	Kesulitan Bertani/Melaut (Hama, Kemarau, Cuaca Ekstrem) <i>Difficulty in Farming/Fishing (Pests, Drought, Extreme Weather)</i>	Kehilangan Mata Pencarian yang Bergantung pada Alam <i>Loss of Livelihoods Dependent on Nature</i>
(1)	(2)	(3)	(4)
Kepulauan Seribu	6	1	1
Kota Jakarta Selatan	11	-	1
Kota Jakarta Timur	8	1	3
Kota Jakarta Pusat	2	-	1
Kota Jakarta Barat	4	1	-
Kota Jakarta Utara	2	4	2
DKI Jakarta	33	7	8

Catatan: ¹ Data mencerminkan kondisi selama lima tahun terakhir sebelum kegiatan Podes 2025.

Note: ¹ The data reflects conditions over the five years prior to the Podes 2025 activity.



Lanjutan Tabel
Continued Table 8.4

Kabupaten/Kota <i>Regency/Municipality</i>	Gangguan Kesehatan (Pneumonia, Malaria, DBD) <i>Health Problems (Pneumonia, Malaria, Dengue)</i>	Kerusakan Rumah/Harta Benda Akibat Bencana Terkait Iklim <i>Damage to Houses/Property due to Climate-Related Disasters</i>	Gagal Panen, Rusaknya Tanaman, atau Kematian Ternak Akibat Bencana Terkait Iklim <i>Crop Failure or Livestock Death due to Climate-Related Disasters</i>
(1)	(5)	(6)	(7)
Kepulauan Seribu	2	3	-
Kota Jakarta Selatan	42	17	-
Kota Jakarta Timur	48	17	1
Kota Jakarta Pusat	19	4	1
Kota Jakarta Barat	22	7	-
Kota Jakarta Utara	25	2	-
DKI Jakarta	158	50	2

Catatan: ¹ Data mencerminkan kondisi selama lima tahun terakhir sebelum kegiatan Podes 2025.

Note: ¹ The data reflects conditions over the five years prior to the Podes 2025 activity.



Tabel 8.5 **Banyaknya Kelurahan Menurut Kabupaten/Kota dan Keberadaan Kejadian Perkelahian Massal, 2025**
Table 8.5 **Number of Subdistricts by Regency/Municipality and the Occurrence of Mass Fight, 2025**

Kabupaten/Kota Regency/Municipality	Ada Present	Tidak Ada Not Present	Jumlah Total
(1)	(2)	(3)	(4)
Kepulauan Seribu	-	6	6
Kota Jakarta Selatan	16	49	65
Kota Jakarta Timur	11	54	65
Kota Jakarta Pusat	9	35	44
Kota Jakarta Barat	5	51	56
Kota Jakarta Utara	7	24	31
DKI Jakarta	48	219	267



Tabel 8.6 Banyaknya Kelurahan dengan Kejadian Perkelahian Massal Menurut Kabupaten/Kota dan Keberadaan Korban Meninggal dan Luka-Luka, 2025
Table 8.6 *Number of Subdistricts with Incidents of Mass Fight by Regency/Municipality and the Presence of Fatalities and Injuries, 2025*

Kabupaten/Kota Regency/Municipality	Meninggal Fatalities			Luka-Luka Injuries		
	Ada Present	Tidak Ada Not Present	Jumlah Total	Ada Present	Tidak Ada Not Present	Jumlah Total
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Kepulauan Seribu	-	-	-	-	-	-
Kota Jakarta Selatan	1	15	16	10	6	16
Kota Jakarta Timur	2	9	11	8	3	11
Kota Jakarta Pusat	-	9	9	8	1	9
Kota Jakarta Barat	-	5	5	2	3	5
Kota Jakarta Utara	1	6	7	3	4	7
DKI Jakarta	4	44	48	31	17	48



Tabel 8.7 **Banyaknya Kelurahan dengan Kejadian Perkelahian Massal Menurut Kabupaten/Kota dan Inisiator Penyelesaiannya, 2025**
Table 8.7 **Number of Subdistricts with Incidents of Mass Fight by Regency/Municipality and Initiator of the Resolution, 2025**

Kabupaten/Kota <i>Regency/Municipality</i>	Aparat Keamanan <i>Security Forces</i>	Aparat Pemerintah <i>Government Official</i>	Tokoh Masyarakat <i>Community Figure</i>	Tokoh Agama <i>Religious Figure</i>	Lainnya <i>Others</i>	Tidak Ada Inisiator <i>No Initiator</i>
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Kepulauan Seribu	-	-	-	-	-	-
Kota Jakarta Selatan	16	14	13	8	-	-
Kota Jakarta Timur	10	9	9	7	1	1
Kota Jakarta Pusat	7	5	5	4	-	2
Kota Jakarta Barat	2	2	2	1	-	3
Kota Jakarta Utara	6	6	5	4	-	-
DKI Jakarta	41	36	34	24	1	6



Tabel 8.8 Banyaknya Kelurahan Menurut Kabupaten/Kota dan Jenis Upaya Warga Menjaga Keamanan Lingkungan, 2025
Table 8.8 *Number of Subdistricts by Regency/Municipality and Type of Citizen's Effort to Secure Community, 2025*

Kabupaten/Kota Regency/Municipality	Pembangunan/ Pemeliharaan Pos Keamanan Lingkungan Building/ Maintenance Security Post	Pembentukan/ Pengaturan Regu Keamanan Establishing Security Guard	Penambahan Jumlah Anggota Hansip/Linmas Raising Civil Defense/Civil Protection Personnel	Pelaporan Tamu Menginap Lebih dari 24 Jam Reporting Guests Staying More Than 24 Hours	Pengaktifan Sistem Keamanan Lingkungan dari Inisiatif Warga Activation of Security System from Citizen Initiative
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Kepulauan Seribu	6	6	2	6	6
Kota Jakarta Selatan	59	59	31	65	64
Kota Jakarta Timur	62	57	38	61	60
Kota Jakarta Pusat	38	36	23	44	42
Kota Jakarta Barat	48	43	24	52	53
Kota Jakarta Utara	29	27	15	30	31
DKI Jakarta	242	228	133	258	256

Infrastruktur Pendidikan

Educational Infrastructure

JUMLAH SEKOLAH MENURUT TINGKAT PENDIDIKAN

NUMBER OF SCHOOLS BY EDUCATIONAL LEVEL

SD/MI

Elementary Schools

1390

Negeri
Public

1317

Swasta
Private

SMP/MTs

Junior High Schools

346

Negeri
Public

969

Swasta
Private

SMA/MA

Senior High Schools

142

Negeri
Public

471

Swasta
Private

SMK

Vocational Schools

68

Negeri
Public

488

Swasta
Private

**AKADEMI/PERGURUAN
TINGGI**
Academy/University

18

Negeri
Public

238

Swasta
Private



Penjelasan Teknis Infrastruktur Pendidikan

1. Lembaga pendidikan adalah lembaga yang menghasilkan siswa yang lulus dan diakui/disahkan oleh Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah serta Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi yang dibuktikan dengan sertifikat/ijazah.
2. Jenjang Pendidikan Formal terdiri atas pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi. Jenis pendidikan yang diajarkan mencakup pendidikan umum, kejuruan, akademik, profesi, vokasi, keagamaan, dan khusus.
3. Pendidikan Dasar berbentuk Sekolah Dasar (SD) dan Madrasah Ibtidaiyah (MI) atau bentuk lain yang sederajat serta Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan Madrasah Tsanawiyah (MTs) atau bentuk lain yang sederajat.
4. Pendidikan Menengah berbentuk Sekolah Menengah Atas (SMA), Madrasah Aliyah (MA), Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), dan Madrasah Aliyah Kejuruan (MAK), atau bentuk lain yang sederajat.
5. Pendidikan Tinggi merupakan jenjang pendidikan setelah pendidikan menengah yang mencakup program pendidikan diploma, sarjana, magister, spesialis, dan doktor yang

Technical Notes Education Infrastructure

1. *Educational institutions are institutions that produce students who graduate and are recognized/approved by the Ministry of Primary and Secondary Education and the Ministry of Higher Education, Science, and Technology, as evidenced by certificates/diplomas.*
2. *The Formal Education Level consists of primary education, secondary education, and high education. The kind of education that taught consists of general education, vocational, academic, professional, religious, and specific education.*
3. *The Primary Education consists of Elementary School and Islamic Elementary School or other equivalent forms and Junior High School and Madrasah Tsanawiyah, or other equivalent forms.*
4. *The Secondary Education consists of the senior high school, Madrasah Aliyah, Vocational School, and Vocational Madrasah Aliyah, or other equivalent forms.*
5. *The High Education consists of the education level after the secondary education that consists of diplomas, bachelor, master, specialist, and doctoral degrees that are held by the college. The*



diselenggarakan oleh perguruan tinggi. Perguruan tinggi dapat berbentuk akademi, politeknik, sekolah tinggi, institut, atau universitas.

colleges can be academy, polytechnic, high school, institute, or university.

<https://jakarta.bps.go.id>



Tabel 9.1 Banyaknya SD/MI Negeri dan Swasta Menurut Kabupaten/Kota, 2025
Table 9.1 Number of Public and Private Elementary Schools by Regency/Municipality, 2025

Kabupaten/Kota Regency/Municipality	SD Elementary School			MI Madrasah Ibtidaiyah			SD/MI Elementary School/Madrasah Ibtidaiyah		
	Negeri Public	Swasta Private	Jumlah Total	Negeri Public	Swasta Private	Jumlah Total	Negeri Public	Swasta Private	Jumlah Total
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
Kepulauan Seribu	14	-	14	3	-	3	17	-	17
Kota Jakarta Selatan	278	172	450	6	136	142	284	308	592
Kota Jakarta Timur	422	186	608	10	98	108	432	284	716
Kota Jakarta Pusat	173	97	270	2	13	15	175	110	285
Kota Jakarta Barat	320	238	558	4	112	116	324	350	674
Kota Jakarta Utara	155	197	352	3	68	71	158	265	423
DKI Jakarta	1362	890	2252	28	427	455	1390	1317	2707



Tabel 9.2 Banyaknya SMP/MTs Negeri dan Swasta Menurut Kabupaten/Kota, 2025
Table 9.2 *Number of Public and Private Junior High Schools by Regency/Municipality, 2025*

Kabupaten/Kota Regency/Municipality	SMP Junior High School			MTs Madrasah Tsanawiyah			SMP/MTs Junior High School/Madrasah Tsanawiyah		
	Negeri Public	Swasta Private	Jumlah Total	Negeri Public	Swasta Private	Jumlah Total	Negeri Public	Swasta Private	Jumlah Total
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
Kepulauan Seribu	7	-	7	3	-	3	10	-	10
Kota Jakarta Selatan	67	152	219	10	60	70	77	212	289
Kota Jakarta Timur	97	162	259	21	67	88	118	229	347
Kota Jakarta Pusat	38	72	110	1	11	12	39	83	122
Kota Jakarta Barat	50	229	279	9	36	45	59	265	324
Kota Jakarta Utara	39	150	189	4	30	34	43	180	223
DKI Jakarta	298	765	1063	48	204	252	346	969	1315



Tabel 9.3 Banyaknya SMA/MA Negeri dan Swasta Menurut Kabupaten/Kota, 2025
Table 9.3 *Number of Public and Private Senior High Schools by Regency/Municipality, 2025*

Kabupaten/Kota Regency/Municipality	SMA Senior High School			MA Madrasah Aliyah			SMA/MA Senior High School/Madrasah Aliyah		
	Negeri Public	Swasta Private	Jumlah Total	Negeri Public	Swasta Private	Jumlah Total	Negeri Public	Swasta Private	Jumlah Total
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
Kepulauan Seribu	1	-	1	1	1	2	2	1	3
Kota Jakarta Selatan	29	81	110	5	26	31	34	107	141
Kota Jakarta Timur	40	89	129	9	20	29	49	109	158
Kota Jakarta Pusat	13	41	54	2	7	9	15	48	63
Kota Jakarta Barat	17	107	124	6	11	17	23	118	141
Kota Jakarta Utara	17	75	92	2	13	15	19	88	107
DKI Jakarta	117	393	510	25	78	103	142	471	613



Tabel 9.4 **Banyaknya SMK Negeri dan Swasta Menurut Kabupaten/Kota, 2025**
Table 9.4 **Number of Public and Private Vocational Schools by Regency/Municipality, 2025**

Kabupaten/Kota Regency/Municipality	Negeri Public	Swasta Private	Jumlah Total
(1)	(2)	(3)	(4)
Kepulauan Seribu	1	-	1
Kota Jakarta Selatan	19	103	122
Kota Jakarta Timur	16	160	176
Kota Jakarta Pusat	14	44	58
Kota Jakarta Barat	10	111	121
Kota Jakarta Utara	8	70	78
DKI Jakarta	68	488	556

<https://jakarta.bps.go.id>



Tabel 9.5 Banyaknya Akademi/Perguruan Tinggi Negeri dan Swasta Menurut Kabupaten/Kota, 2025
Table 9.5 Number of Public and Private Academy/University by Regency/Municipality, 2025

Kabupaten/Kota Regency/Municipality	Negeri Public	Swasta Private	Jumlah Total
(1)	(2)	(3)	(4)
Kepulauan Seribu	-	-	-
Kota Jakarta Selatan	12	76	88
Kota Jakarta Timur	3	73	76
Kota Jakarta Pusat	2	40	42
Kota Jakarta Barat	-	34	34
Kota Jakarta Utara	1	15	16
DKI Jakarta	18	238	256

<https://jakarta.bps.go.id>

Infrastruktur kesehatan

Health Infrastructure

202

BANYAKNYA RUMAH SAKIT
NUMBER OF HOSPITALS

281

BANYAKNYA KLINIK UTAMA
NUMBER OF PRINCIPAL CLINIC

1105

BANYAKNYA KLINIK PRATAMA
NUMBER OF PRIMARY CLINIC

336

BANYAKNYA PUSKESMAS DAN
PUSKESMAS PEMBANTU
NUMBER OF PUBLIC HEALTH CENTERS AND
AUXILIARY HEALTH CENTERS



Penjelasan Teknis Infrastruktur Kesehatan

1. Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, fasilitas pelayanan kesehatan meliputi fasilitas pelayanan kesehatan tingkat pertama, fasilitas pelayanan kesehatan tingkat lanjut; dan fasilitas pelayanan kesehatan penunjang.
2. Rumah Sakit adalah fasilitas pelayanan kesehatan tingkat lanjut yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perseorangan secara paripurna melalui pelayanan kesehatan promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif, dan/atau paliatif dengan menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan, dan gawat darurat (Undang-undang No 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan).
3. Klinik adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan yang menyediakan pelayanan medik dasar dan/atau spesialisik secara komprehensif.
4. Balai Kesehatan merupakan jenis fasilitas pelayanan kesehatan rujukan tingkat lanjutan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan masyarakat atau pelayanan penunjang kesehatan.

Technical Notes Health Infrastructure

1. According to Government Regulation of the Republic of Indonesia Number 28 of 2024 concerning the Implementing Regulations of Law Number 17 of 2023 concerning Health, health care facilities include primary care facilities, advanced care facilities, and supporting care facilities.
2. A Hospital is an advanced healthcare facility that provides comprehensive individual health services through promotive, preventive, curative, rehabilitative, and/or palliative healthcare services, including inpatient, outpatient, and emergency care (Law No. 17 of 2023 concerning Health).
3. A Clinic is a health care facility that provides comprehensive basic and/or specialist medical services.
4. A Health Center is a type of advanced referral health care facility that provides public health services or health support services. In addition to providing public health services, centers can also provide individual health services. A Health



Selain menyelenggarakan pelayanan kesehatan masyarakat, balai dapat menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan. Balai Kesehatan dapat diselenggarakan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, atau masyarakat (Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/MENKES/34/2018 tentang Balai sebagai Jenis Fasilitas Pelayanan Kesehatan).

Center can be operated by the Central Government, Regional Governments, or the community (Decree of the Minister of Health of the Republic of Indonesia No. HK.01.07/MENKES/34/2018 concerning Centers as a Type of Health Service Facility).

5. Puskesmas (Pusat Kesehatan Masyarakat) adalah fasilitas pelayanan kesehatan tingkat pertama yang menyelenggarakan dan mengoordinasikan pelayanan kesehatan promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif, dan/atau paliatif dengan mengutamakan promotif dan preventif di wilayah kerjanya (Undang-undang No 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan).

5. *A Community Health Center (Puskesmas) is a primary-level healthcare facility that organizes and coordinates promotive, preventive, curative, rehabilitative, and/or palliative health services, prioritizing promotive and preventive services in its working area (Law No. 17 of 2023 concerning Health).*

6. Puskesmas dengan Rawat Inap adalah puskesmas yang diberi tambahan sumber daya kesehatan untuk menyelenggarakan rawat inap pada pelayanan persalinan normal termasuk Pelayanan Obstetrik Neonatal Emergency Dasar (PONED), dan pelayanan rawat inap lainnya. (Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2024 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat).

6. *A Community Health Center (Puskesmas) with Inpatient Care is a Community Health Center (Puskesmas) that has been given additional health resources to provide inpatient care for normal delivery services, including basic emergency obstetric and neonatal care, and other inpatient services. (Regulation of the Minister of Health of the Republic of Indonesia Number 19 of 2024 concerning Community Health Centers).*

7. Puskesmas tanpa Rawat Inap adalah puskesmas yang menyelenggarakan pelayanan rawat jalan, perawatan

7. *A Community Health Center (Puskesmas) without Inpatient Care are community health centers that provide outpatient*



di rumah, pelayanan persalinan normal, dan pelayanan gawat darurat. (Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Pusat Kesehatan Masyarakat).

services, home care, normal delivery services, and emergency services. (Regulation of the Minister of Health of the Republic of Indonesia Number 19 of 2024 concerning the Implementation of Community Health Centers).

8. Puskesmas Pembantu (Pustu) merupakan salah satu bentuk unit pelayanan kesehatan di tingkat desa/kelurahan yang mengkoordinasikan urusan kesehatan di desa/kelurahan, termasuk pemberian Pelayanan kesehatan primer dan peningkatan partisipasi masyarakat pada tingkat desa/kelurahan. Pustu memberikan pelayanan berobat jalan. Pustu bertanggung jawab ke puskesmas induk di kecamatan.

8. *A Auxiliary Health Center (Pustu) is a health service unit at the village/sub-district level that coordinates health affairs in the village/sub-district, including the provision of primary health care and increasing community participation at the village/sub-district level. The Pustu provides outpatient services and is accountable to the main community health center in the sub-district.*

9. Klinik Pratama adalah klinik yang menyelenggarakan pelayanan medis dasar. (Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 14 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Kesehatan).

9. *A Primary Clinic is a clinic that provides basic medical services. (Minister of Health Regulation Number 14 of 2021 concerning Standards for Business Activities and Products in the Implementation of Risk-Based Business Licensing in the Health Sector).*

10. Praktik Mandiri Dokter adalah sarana kesehatan/bangunan yang digunakan untuk tempat praktik dokter yang biasanya memberikan pelayanan berobat jalan, termasuk praktik dokter yang mempunyai fasilitas rawat inap dan apotek.

10. *An Independent Physician Practice is a healthcare facility/building used as a physician's practice that typically provides outpatient services, including physician practices that have inpatient facilities and a pharmacy.*

11. Praktik Mandiri Bidan adalah sarana kesehatan/bangunan yang digunakan

11. *An Independent Midwife Practice is a health facility/building used as a*



untuk tempat praktik bidan yang biasanya memberikan pelayanan ibu hamil dan bayi.

12. Poskesdes (Pos Kesehatan Desa) adalah sarana kesehatan/bangunan yang dibentuk di desa/kelurahan dalam rangka mendekatkan/ menyediakan pelayanan kesehatan dasar bagi masyarakat desa/kelurahan. Poskesdes merupakan Upaya Kesehatan Bersumber daya Masyarakat (UKBM) sehingga masyarakat dapat berperan aktif dalam meningkatkan taraf kesehatan di lingkungannya dengan kewaspadaan dini terhadap berbagai risiko dan masalah kesehatan. Poskesdes dikelola oleh bidan dan dibantu beberapa kader.

13. Polindes (Pondok Bersalin Desa) adalah bangunan yang dibangun dengan sumbangan dana pemerintah dan partisipasi masyarakat desa untuk tempat pertolongan persalinan dan pemondokan ibu bersalin, sekaligus tempat tinggal bidan di desa. Di samping pertolongan persalinan juga dilakukan pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak (KIA), Keluarga Berencana (KB), dan pelayanan kesehatan lain sesuai kebutuhan masyarakat dan kompetensi teknis bidan tersebut.

14. Apotek adalah sarana pelayanan kefarmasian tempat dilakukan praktek kefarmasian oleh apoteker (Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 26 Tahun 2018 tentang Apotek).

midwife's practice location which usually provides services to pregnant women and babies.

12. *Village Health Posts (Poskesdes) are health facilities/buildings established in villages/sub-districts to bring basic health services closer to the community. Poskesdes are a Community-Based Health Initiative (UKBM) that allows communities to play an active role in improving the health of their communities by providing early warning of various health risks and problems. Poskesdes are managed by midwives and assisted by several cadres.*

13. *Polindes (Village Maternity Post) is a building constructed with government funding and community participation to provide delivery assistance and accommodation for women in labor, as well as housing for village midwives. In addition to providing delivery assistance, it also provides maternal and child health (KIA) services, family planning (KB), and other health services according to community needs and the midwives' technical competence.*

14. *A Pharmacy is a pharmaceutical service facility where pharmacists practice pharmacy (Minister of Health Regulation Number 26 of 2018 concerning Pharmacies).*



Tabel 10.1 Banyaknya Rumah Sakit, Klinik Utama, dan Balai Kesehatan Menurut Kabupaten/Kota, 2025
Table 10.1 *Number of Hospitals, Principal Clinics, and Health Centers by Regency/Municipality, 2025*

Kabupaten/Kota Regency/Municipality	Rumah Sakit Hospital	Klinik Utama Principal Clinic	Balai Kesehatan Health Center
(1)	(2)	(3)	(4)
Kepulauan Seribu	1	-	-
Kota Jakarta Selatan	55	144	1
Kota Jakarta Timur	49	64	-
Kota Jakarta Pusat	36	20	-
Kota Jakarta Barat	29	17	-
Kota Jakarta Utara	32	36	2
DKI Jakarta	202	281	3

<https://jakarta.bps.go.id>



Tabel 10.2 **Banyaknya Puskesmas Menurut Kabupaten/Kota, 2025**
Table 10.2 **Number of Public Health Center by Regency/Municipality, 2025**

Kabupaten/Kota <i>Regency/Municipality</i>	Puskesmas dengan Rawat Inap <i>Community Health Center with Inpatient Care</i>	Puskesmas tanpa Rawat Inap <i>Community Health Center without Inpatient Care</i>	Jumlah <i>Total</i>
(1)	(2)	(3)	(4)
Kepulauan Seribu	2	-	2
Kota Jakarta Selatan	-	9	9
Kota Jakarta Timur	-	10	10
Kota Jakarta Pusat	-	8	8
Kota Jakarta Barat	1	7	8
Kota Jakarta Utara	-	6	6
DKI Jakarta	3	40	43



Tabel 10.3 Banyaknya Klinik Pratama, Tempat Praktik Dokter, Tempat Praktik Bidan, dan Apotek Menurut Kabupaten/Kota, 2025
Number of Primary Clinics, Independent Physician Practices, Independent Midwife Practices, and Pharmacies by Regency/Municipality, 2025

Kabupaten/Kota Regency/Municipality	Klinik Pratama Primary Clinic	Tempat Praktik Dokter Independent Physician Practice	Tempat Praktik Bidan Independent Midwife Practice	Apotek Pharmacy
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Kepulauan Seribu	-	1	-	-
Kota Jakarta Selatan	384	261	154	300
Kota Jakarta Timur	251	226	192	315
Kota Jakarta Pusat	89	187	33	138
Kota Jakarta Barat	201	324	126	302
Kota Jakarta Utara	180	179	72	209
DKI Jakarta	1105	1178	577	1264

INFRASTRUKTUR EKONOMI

Economic Infrastructure





Penjelasan Teknis Infrastruktur Ekonomi

1. Minimarket/swalayan adalah sistem pelayanan mandiri, menjual berbagai jenis barang secara eceran, dan semua barang memiliki label harga, dengan luas bangunan kurang dari 400 m².
2. Supermarket, atau dengan sebutan lain adalah tempat perdagangan dengan sistem pelayanan mandiri, semua barang memiliki label harga, dan luas minimal 400m².
3. Restoran adalah usaha jasa menyajikan makanan dan minuman untuk dikonsumsi di tempat usahanya, bertempat di sebagian atau seluruh bangunan permanen, dilengkapi dengan jasa pelayanan meliputi memasak dan menyajikan sesuai pesanan dan mempunyai ciri pembeli biasanya dikenakan pajak.
4. Rumah makan adalah jenis usaha yang menyediakan jasa pangan yang pengolahan makanannya dapat dilakukan diluar rumah makan, yang mempunyai ciri pembeli biasanya dikenakan pajak.
5. Hotel adalah jenis akomodasi yang mempergunakan sebagian atau keseluruhan bangunan untuk jasa pelayanan penginapan, penyedia makanan dan minuman serta jasa lainnya (seperti restoran, binatu, dll)

Technical Notes Economy Infrastructure

1. *Minimarket or convenience store is a self-service system that sells various types of goods at retail prices, with all goods labeled with prices, and a building area of less than 400 m².*
2. *Supermarket, or other similar establishments, is a place of commerce with a self-service system, where all goods are labeled with prices, and has a minimum area of 400 m².*
3. *Restaurant is a service business that serves food and beverages for consumption on the premises, located in part or all of a permanent building, equipped with services including cooking and serving according to orders, and characterized by the fact that buyers are usually subject to tax.*
4. *Food stall is a type of business that provides food services where food processing can be done outside the food stall, characterized by the fact that buyers are usually subject to tax.*
5. *Hotel is a type of accommodation that uses part or all of a building to provide lodging services, food and beverage services, and other services (such as restaurants, laundry, etc.) to the general public, managed commercially with a*



bagi masyarakat umum yang dikelola secara komersial dengan izin usaha sebagai hotel.

6. Penginapan (hostel/motel/losmen/wisma) adalah jenis akomodasi yang mempergunakan sebagian atau keseluruhan bangunan untuk jasa pelayanan penginapan bagi umum, biasanya tanpa fasilitas pelayanan makan minum yang dikelola secara komersial dengan izin usaha bukan hotel.
7. Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-seorang atau badan hukum Koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip Koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan.
8. Koperasi melaksanakan prinsip Koperasi sebagai berikut:
 - a. keanggotaan bersifat sukarela dan terbuka;
 - b. pengelolaan dilakukan secara demokratis;
 - c. pembagian sisa hasil usaha dilakukan secara adil sebanding dengan besarnya jasa usaha masing-masing anggota;
 - d. pemberian balas jasa yang terbatas terhadap modal;
 - e. kemandirian.
9. Fasilitas Perkreditan adalah fasilitas keuangan yang memungkinkan

business license as a hotel.

6. *Lodging (hostel/motel/guesthouse/inn) is a type of accommodation that uses part or all of a building for lodging services for the general public, usually without food and beverage services, managed commercially with a business license other than a hotel.*
7. *Cooperative is a business entity consisting of individuals or legal entities based on cooperative principles and serving as a people's economic movement based on the principle of kinship.*
8. *Cooperatives implement the following cooperative principles:*
 - a. membership is voluntary and open;*
 - b. management is conducted democratically;*
 - c. distribution of surplus is done fairly in proportion to each member's contribution;*
 - d. limited return on capital;*
 - e. Independence.*
9. *Credit facilities are financial facilities that enable individuals or business*



seseorang atau badan usaha untuk meminjam uang untuk membeli produk dan membayarnya kembali dalam jangka waktu yang ditentukan. Tidak termasuk pinjaman dari perorangan.

entities to borrow money to purchase products and repay it within a specified period. This does not include loans from individuals.

<https://jakarta.bps.go.id>



Tabel 11.1 **Banyaknya Kelompok Pertokoan dan Pasar Menurut Kabupaten/Kota, 2025**
Table 11.1 **Number of Shopping Complexs And Markets by Regency/Municipality, 2025**

Kabupaten/Kota Regency/Municipality	Kelompok Pertokoan Shopping Complexs	Pasar dengan Bangunan Permanen Markets in Permanent Building	Pasar dengan Bangunan Semi Permanen Markets in Semi Permanent Building	Pasar tanpa Bangunan Markets without Building
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Kepulauan Seribu	2	-	-	-
Kota Jakarta Selatan	204	35	23	14
Kota Jakarta Timur	246	45	28	30
Kota Jakarta Pusat	82	40	15	14
Kota Jakarta Barat	231	60	43	27
Kota Jakarta Utara	251	37	27	31
DKI Jakarta	1016	217	136	116



Tabel 11.2 **Banyaknya Sarana Perdagangan Menurut Kabupaten/Kota, 2025**
Table 11.2 **Number of Trading Facilities by Regency/Municipality, 2025**

Kabupaten/Kota Regency/Municipality	Minimarket/Swalayan/Supermarket Minimarket/Swalayan/Supermarket	Restoran/Rumah Makan Restaurant/Food Stall
(1)	(2)	(3)
Kepulauan Seribu	1	3
Kota Jakarta Selatan	613	1472
Kota Jakarta Timur	708	728
Kota Jakarta Pusat	409	852
Kota Jakarta Barat	687	841
Kota Jakarta Utara	387	740
DKI Jakarta	2805	4636



Tabel 11.3 **Banyaknya Sarana Akomodasi Menurut Kabupaten/Kota, 2025**
Table **Number of Acomodation Facilities by Regency/Municipality, 2025**

Kabupaten/Kota Regency/Municipality	Hotel Hotel	Penginapan Inn
(1)	(2)	(3)
Kepulauan Seribu	-	274
Kota Jakarta Selatan	146	361
Kota Jakarta Timur	43	35
Kota Jakarta Pusat	232	160
Kota Jakarta Barat	118	248
Kota Jakarta Utara	64	61
DKI Jakarta	603	1139

<https://jakarta.bps.go.id>



Tabel 11.4 Banyaknya Lembaga Keuangan Bank Menurut Kabupaten/Kota, 2025
Table 11.4 *Number of Bank Facilities by Regency/Municipality, 2025*

Kabupaten/Kota <i>Regency/Municipality</i>	Bank Umum Pemerintah <i>Government Bank</i>	Bank Umum Swasta <i>Private Bank</i>	Bank Perkreditan Rakyat <i>Rural Bank</i>
(1)	(2)	(3)	(4)
Kepulauan Seribu	1	-	-
Kota Jakarta Selatan	245	213	11
Kota Jakarta Timur	201	94	8
Kota Jakarta Pusat	198	216	7
Kota Jakarta Barat	185	277	5
Kota Jakarta Utara	132	111	10
DKI Jakarta	962	911	41

<https://jakarta.bps.go.id>



Tabel 11.5 **Banyaknya Lembaga Keuangan Koperasi Menurut Kabupaten/Kota, 2025**
Table 11.5 **Number of Cooperative by Regency/Municipality, 2025**

Kabupaten/Kota Regency/Municipality	Kooperasi Unit Desa Village Cooperative Unit	Koperasi Industri Kecil dan Kerajinan Rakyat Small Industry and Citizen Handicraft Cooperative	Koperasi Simpan Pinjam Saving and Loan Cooperative	Koperasi Lainnya Other Cooperative
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Kepulauan Seribu	-	-	-	1
Kota Jakarta Selatan	-	7	33	19
Kota Jakarta Timur	10	12	48	-
Kota Jakarta Pusat	1	8	11	3
Kota Jakarta Barat	-	-	18	4
Kota Jakarta Utara	3	7	33	-
DKI Jakarta	14	34	143	27



Daftar Pustaka

Bibliography

Direktorat Statistik Ketahanan Sosial. 2025. *Buku 1: Pedoman Kepala BPS Provinsi dan Kabupaten/Kota Pemutakhiran Data Perkembangan Desa 2025 (Potensi Desa 2025)*. Jakarta: Badan Pusat Statistik.

Direktorat Statistik Ketahanan Sosial. 2025. *Buku 3: Pedoman Konsep dan Definisi Pemutakhiran Data Perkembangan Desa 2025 (Potensi Desa 2025)*. Jakarta: Badan Pusat Statistik.

<https://jakarta.bps.go.id>



LAMPIRAN

APPENDIX

Lampiran
Appendix

1. Realisasi Cakupan Pemutakhiran Data Perkembangan Desa 2025 (Potensi Desa 2025) Menurut Kabupaten/Kota¹
Realisation of the Coverage of Village Development Data Update 2025 (Village Potential 2025) by Regency/Municipality¹

Kabupaten/Kota <i>Regency/Municipality</i>	Jumlah <i>Total</i>			Persentase (%) <i>Percentage (%)</i>		
	Berhasil Dicacah <i>Successfully Enumerated</i>	Tidak Berhasil Dicacah <i>Not Successfully Enumerated</i>	Jumlah <i>Total</i>	Berhasil Dicacah <i>Successfully Enumerated</i>	Tidak Berhasil Dicacah <i>Not Successfully Enumerated</i>	Jumlah <i>Total</i>
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Kepulauan Seribu	6	-	6	100	-	100
Kota Jakarta Selatan	65	-	65	100	-	100
Kota Jakarta Timur	65	-	65	100	-	100
Kota Jakarta Pusat	44	-	44	100	-	100
Kota Jakarta Barat	56	-	56	100	-	100
Kota Jakarta Utara	31	-	31	100	-	100
DKI Jakarta	267	-	267	100	-	100



REPUBLIK INDONESIA
BADAN PUSAT STATISTIK
PEMUTAKHIRAN DATA PERKEMBANGAN DESA 2025

RAHASIA

PODES2025-DESA

I. KETERANGAN TEMPAT				
101	Provinsi			
102	Kabupaten/Kota *)			
103	Kecamatan			
104	Desa/Kelurahan *)			
105	Status Daerah	Perkotaan - 1	Perdesaan - 2	
106	SK pembentukan/pengesahan desa/kelurahan: Permendagri/Kepmendagri Perda Provinsi Perda Kabupaten	-1 -2 -3	SK Gubernur/Bupati Lainnya	
107	Status definitif desa dan operasional desa/kelurahan: a. Ada wilayah desa/kelurahan dengan batas yang jelas b. Ada penduduk yang menetap di wilayah desa/kelurahan c. Ada pemerintah desa/kelurahan	Ta - 1 Ta - 1 Ta - 1	Tidak - 2 Tidak - 2 Tidak - 2	
Jika R107 a, b atau c ada yang berkode 2 maka lanjutkan ke R201 sampai R207 kemudian STOP				
108	Lokasi pelayanan pemerintah desa/kelurahan:			
	a. Alamat lengkap			
	b. Nomor telepon			
	c. Alamat e-Mail			
	d. Kode Pos			
II. KETERANGAN PETUGAS DAN NARASUMBER				
201	Nama Pencacah		202	NIP/NIK
203	Tanggal Kunjungan			
	No	Tanggal Kunjungan		
204	Nama Pengawas/ Pemeriksa		205	NIP/NIK
206	Tanggal Pemeriksaan			
207	Narasumber :			
	Nama	Jabatan	No. Telepon	Email
	1.			
	2.			
	3.			
	4.			
	5.			

*) Garis yang titik sesuai

DAFTAR INI DIISI OLEH PETUGAS BERDASARKAN HASIL PENCACAHAN/
WAWANCARA DENGAN NARASUMBER TERKAIT YANG BERWENANG
DAN RELEVAN, SERTA PENELITIAN DOKUMEN DESA/KELURAHAN

2025

Mengesahkan
Kepala Desa/Lurah *)

Nama dan Stempel

Lanjutan Lampiran 2.
Continued Appendix

III. KETERANGAN UMUM DESA/KELURAHAN				
301	Status pemerintahan:			☐
	Desa - 1	Kelurahan - 2	UPT/SPT - 3	Negeri - 4
302	a. Ada wilayah desa/kelurahan yang berbatasan langsung dengan laut: Ada - 1 Tidak ada - 2			☐
	b. Jika berbatasan dengan laut, pemanfaatan laut:			
	1) Perikanan tangkap (menangkap seluruh biota laut)	Ada - 1	Tidak ada - 2	☐
	2) Perikanan budidaya (menangkap seluruh biota laut)	Ada - 1	Tidak ada - 2	☐
	3) Tambak garam	Ada - 1	Tidak ada - 2	☐
	4) Wisata bahari	Ada - 1	Tidak ada - 2	☐
	5) Transportasi umum	Ada - 1	Tidak ada - 2	☐
303	a. Lokasi wilayah desa/kelurahan terhadap kawasan hutan/hutan: Di dalam kawasan hutan - 1 Di tepi/sekitar kawasan hutan - 2 Di luar kawasan hutan - 3 → R401			☐
	b. Fungsi kawasan hutan/hutan: Pilihan boleh lebih dari satu kode. Konservasi - A Lindung - B Produksi - C			
304	a. Jumlah Rakun Warga (RW) di desa/kelurahan			
	b. Jumlah Rakun Tetangga (RT) di desa/kelurahan			
IV. KEPENDUDUKAN				
401	Penduduk dan keluarga pada 1 Januari 2025:			
	a. jumlah penduduk laki-laki			orang
	b. jumlah penduduk perempuan			orang
	c. jumlah keluarga			keluarga
	d. jumlah keluarga pertanian (tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, peternakan, perikanan, kehutanan)			keluarga
V. PERUMAHAN DAN LINGKUNGAN HIDUP				
501	a. Jumlah keluarga pengguna listrik :			
	1. PLN (Perusahaan Listrik Negara)			keluarga
	2. Non-PLN (minalnya: swasta, swadaya, atau pemecangan)			keluarga
	b. jumlah keluarga bukan pengguna listrik:			keluarga
502	a. Penerangan di jalan utama desa/kelurahan: Ada, sebagian besar - 1 Ada, sebagian kecil - 2 Tidak ada - 3 → R503			
	b. Sumber penerangan di jalan utama desa/kelurahan:			
	Listrik disalurkan oleh pemerintah - 1	Listrik disalurkan oleh non pemerintah - 2	Non listrik - 3	☐
503	Bahan bakar untuk memasak sebagian besar keluarga :			
	Listrik - 1	Gas kota - 5	Arang - 9	
	Elpiji 5,5 kg - 2	Biogas - 6	Kayu bakar - 10	
	Elpiji 12 kg - 3	Minyak tanah - 7	Lainnya - 11	
	Elpiji 3 kg - 4	Briket - 8		
504	Pencemaran lingkungan hidup (polusi) di desa/kelurahan selama setahun terakhir:			
	Pencemaran lingkungan hidup (polusi)	Kejadian pencemaran lingkungan Hidup Ada - 1 Tidak ada - 2	Jika ada kejadian pencemaran lingkungan hidup (kolom (2) berkode 1)	
			Sumber pencemaran lingkungan hidup yang utama Rumah tangga - 1 Pabrik/industri/usaha - 2 Lainnya - 3	Pengaduan warga ke aparat desa/kelurahan Ada - 1 Tidak ada - 2
	(1)	(2)	(3)	(4)
	a. Air	☐	☐	☐
	b. Tanah	☐	☐	☐
	c. Udara	☐	☐	☐

Lanjutan Lampiran 2.
Continued Appendix

505	Kegiatan pelestarian lingkungan dan mitigasi adaptasi terhadap perubahan iklim selama setahun terakhir							
Jenis Kegiatan		Ada, warna terlihat Ada, warna tidak terlihat Tidak ada kegiatan						
(1)		(2)						
a. Penanaman/pemeliharaan pepohonan di lahan kritis, penanaman mangrove, dan reboisasi di desa/kelurahan		☐						
b. Pengolahan/daur ulang sampah/limbah di desa/kelurahan		☐						
c. Penggunaan pupuk organik di lahan pertanian di desa/kelurahan		☐						
d. Pembuatan labang biopori di desa/kelurahan		☐						
e. Pemanfaatan energi baru terbarukan (tenaga surya/angin/mikrohidro/biogas/biomassa/pasang surut/arus laut) di desa/kelurahan		☐						
f. Penerapan pola tanam (rotasi tanaman, tumpang sari dll) di desa/kelurahan		☐						
g. Penampungan/pemanenan air hujan di desa/kelurahan		☐						
h. Pembuatan atau pemeliharaan terasering di desa/kelurahan		☐						
VI. BENCANA ALAM DAN MITIGASI BENCANA ALAM								
601	Kejadian/bencana alam (mengganggu kehidupan dan menyebabkan kerugian bagi masyarakat) yang terjadi:							
Kejadian/bencana alam		Kejadian Ada - 1 Tidak ada - 2		Jika ada kejadian/bencana alam (kolom (2) berkode 1) Tahun 2024 Januari - Mei 2025				
				Banyak kejadian Korban Meninggal		Keberadaan Korban Keberadaan Korban		
(1)		(2)		(3)		(4)		
a. Tanah longsor		☐		☐		A B C D		
b. Banjir		☐		☐		A B C D		
c. Banjir bandang		☐		☐		A B C D		
d. Gempa bumi		☐		☐		A B C D		
e. Tsunami		☐		☐		A B C D		
f. Gelombang pasang laut		☐		☐		A B C D		
g. Angin puyuh/puting beliung/topan		☐		☐		A B C D		
h. Letusan gunung api		☐		☐		A B C D		
i. Kebakaran hutan dan lahan		☐		☐		A B C D		
j. Kekeringan		☐		☐		A B C D		
k. Abrasi		☐		☐		A B C D		
Kode kolom (5) dan (6): Pilihlah salah satu kode								
Korban hilang - A				Korban terluka/sakit - B				
Korban mengungsi - C				Tidak ada korban hilang/terluka/sakit/mengungsi - D				
602	Fasilitas/upaya antisipasi/mitigasi bencana alam yang ada di desa/kelurahan:							
a. Sistem peringatan dini bencana alam		Ada - 1		Tidak ada - 2		☐		
b. Sistem peringatan dini khusus tsunami		Ada - 1		Tidak ada - 2		Bukan wilayah potensi tsunami - 3		
c. Perlengkapan keselamatan (perahu karet, tenda, masker, dll)		Ada - 1		Tidak ada - 2		☐		
d. Rambu-rambu dan jalur evakuasi bencana		Ada - 1		Tidak ada - 2		☐		
e. Pembuatan, perawatan, atau normalisasi sungai, kanal, tanggul, parit, drainase, waduk, pantai, dll.		Ada - 1		Tidak ada - 2		☐		

Lanjutan Lampiran 2.
Continued Appendix

603	Kejadian berikut terjadi di desa/kelurahan dalam 5 tahun terakhir:						
a. Penggundulan hutan, hutan menjadi perkebunan, kebun, tambang, dll	Ya	- 1	Tidak	- 2	☐		
b. Peningkatan Penggunaan pupuk kimia & pestisida	Ya	- 1	Tidak	- 2	☐		
c. Peningkatan perilaku kebiasaan membakar sampah dan membuang sampah di tempat ilegal	Ya	- 1	Tidak	- 2	☐		
d. Peningkatan jumlah pabrik dan industri	Ya	- 1	Tidak	- 2	☐		
e. Peningkatan jumlah warga yang memiliki kendaraan bermotor roda 4 atau lebih	Ya	- 1	Tidak	- 2	☐		
604	Kejadian berikut dirasakan oleh penduduk desa/kelurahan selama 5 tahun terakhir:						
a. Kelangkaan air karena kemarau panjang	Ya, ada sebagian besar	- 1	Ya, ada sebagian kecil	- 2	Tidak dirasakan	- 3	☐
b. Penduduk desa semakin sulit bertani (serangan hama, kemarau Panjang, menangkap ikan di laut (cuaca ekstrem), dll)	Ya, ada sebagian besar	- 1	Ya, ada sebagian kecil	- 2	Tidak dirasakan	- 3	☐
c. Penduduk desa kehilangan mata pencaharian yang bergantung pada alam (banjir bandang, kekeringan, kebakaran hutan, dll)	Ya, ada sebagian besar	- 1	Ya, ada sebagian kecil	- 2	Tidak dirasakan	- 3	☐
d. Gangguan kesehatan (Pneumonia, Malaria, dan DBD)	Ya, ada sebagian besar	- 1	Ya, ada sebagian kecil	- 2	Tidak dirasakan	- 3	☐
e. Kerusakan rumah dan harta benda karena bencana terkait iklim (banjir, tanah longsor, puting beliung, kekeringan, karhutla, gel. pasang)	Ya, ada sebagian besar	- 1	Ya, ada sebagian kecil	- 2	Tidak dirasakan	- 3	☐
f. Gagal panen, kerusakan tanaman atau kematian ternak karena bencana terkait iklim	Ya, ada sebagian besar	- 1	Ya, ada sebagian kecil	- 2	Tidak dirasakan	- 3	☐
VII. PENDIDIKAN DAN KESEHATAN							
701	Keberadaan fasilitas pendidikan menurut jenjang pendidikan di desa/kelurahan						
Jenis fasilitas pendidikan		Jumlah		[Jika tidak ada fasilitas pendidikan (kolom (2) dan kolom (3) bernomor 0), untuk mencapai fasilitas pendidikan terdekat]			
		Negeri	Swasta	Jarak (km)	Kemudahan untuk mencapai: Sangat mudah -1 Mudah -2 Sulit -3 Sangat sulit -4		
(1)		(2)	(3)	(4)	(5)		
a. TK					☐		
b. RA/BA					☐		
c. SD					☐		
d. MI					☐		
e. SMP					☐		
f. MTs					☐		
g. SMA					☐		
h. MA					☐		
i. SMK					☐		
j. Akademi/Perguruan Tinggi					☐		

Lanjutan Lampiran 2.
Continued Appendix

702	Keberadaan fasilitas pelayanan kesehatan di desa/kelurahan			
	Jenis fasilitas pelayanan kesehatan	Jumlah	Jika tidak ada fasilitas pelayanan kesehatan (kolom (7) terisi 0), untuk mencapai fasilitas pelayanan kesehatan terdekat	
			Jarak (km)	Kesulitan untuk mencapai: Sangat mudah -1 Mudah -2 Sulit -3 Sangat sulit -4
	(1)	(2)	(3)	(4)
	a. Rumah sakit			
	b. Klinik utama			
	c. Balai kesehatan			
	d. Puskesmas dengan rawat inap			
	e. Puskesmas tanpa rawat inap			
	f. Puskesmas pembantu			
	g. Klinik pratama			
	h. Praktik mandiri dokter			
	i. Praktik mandiri bidan			
	j. Poskades (pos kesehatan desa)			
	k. Polindes (pondok bersalin desa)			
	l. Apotek			
	m. Toko khusus obat/jamu			
703	Jumlah Upaya Kesehatan Bersumberdaya Masyarakat (UKBM) selama setahun terakhir:			
	a. Jumlah penyandu aktif:			unit
	b. Penyandu dengan kegiatan/pelayanan setiap sebulan sekali:			unit
	c. Penyandu dengan kegiatan/pelayanan setiap 2 bulan sekali atau lebih:			unit
	d. Pos Pembinaan Terpadu (Posbindu):			unit
VIII. ANGKUTAN, KOMUNIKASI DAN INFORMASI				
801	Prasarana dan sarana transportasi antar desa/kelurahan:			
	a. Lalu lintas dari/ke desa/kelurahan melalui:			
	Darat -1	Air -2 → R801c	Darat dan air -3	Udara -4 → R801c
	b. Jika lalu lintas dari/ke desa/kelurahan melalui darat atau darat dan air (R801a berkode 1 atau 3):			
	1. Jenis permukaan jalan darat antar desa/kelurahan yang terluas:			
	Aspal/beton -1	Tanah -3		
	Diperkeras (kerikil, batu, dll.) -2	Lainnya (jalan setapak, kayu/papan, dll.) -4		
	2. Jalan darat antar desa/kelurahan dapat dilalui kendaraan bermotor roda 4 atau lebih:			
	Sepanjang tahun -1			
	Sepanjang tahun kecuali saat tertentu (terkena hujan, pasang, dll.) -2			
	Selama musim kemarau -3			
	Tidak dapat dilalui sepanjang tahun -4			
	c. Angkutan umum yang melewati desa/kelurahan:			
	1. Keberadaan angkutan umum: Pilihan boleh lebih dari satu kode.			
	Ada, dengan trayek tetap -A	Ada, tanpa trayek tetap -B	Tidak ada angkutan umum -X → R802	
	2. Operasional angkutan umum yang utama:			
	Setiap hari -1	Tidak setiap hari -2		
	3. Jam operasi angkutan umum yang utama:			
	Siang dan malam hari -1	Hanya siang/malam hari -2		
	4. Ketersediaan angkutan online (memesan angkutan online):			
	Ada -1	Tidak ada -2		

Lanjutan Lampiran 2.
Continued Appendix

002	Sarana transportasi dari kantor kepala desa/buruh ke kantor camat/bupati/walikota:						
	Sarana transportasi yang biasa digunakan oleh sebagian besar penduduk dari kantor kepala desa/buruh ke	Sarana transportasi yang biasa digunakan	Jarak dan angkutan umum (Khusus (1) A ditanggapi)		Jarak tempuh (km)	Waktu tempuh (jam: menit)	Biaya transportasi (Ribu Rupiah)
			Jenis angkutan umum	Angkutan umum yang utama			
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
a. Kantor camat	A B C	A B C D E	☐	☐	☐	☐	☐
b. Kantor bupati/walikota	A B C	A B C D E	☐	☐	☐	☐	☐
Kode kolom (2): pilihan boleh lebih dari satu kode Angkutan umum - A Kendaraan pribadi - B Jalan kaki, sepeda, dll. - C Kode kolom (3): pilihan boleh lebih dari satu kode Ojek sepeda motor - A Sewa/mobil bermotor roda 2 atau lebih - B Perahu (bermotor maupun tidak bermotor) - C Pesawat terbang - D Lainnya (berak, delman, pedati, dll) - E Kode kolom (4): pilihan boleh lebih dari satu kode Ojek sepeda motor - A Sewa/mobil bermotor roda 2 atau lebih - B Perahu (bermotor maupun tidak bermotor) - C Pesawat terbang - D Lainnya (berak, delman, pedati, dll) - E							
003	a. Jumlah keluarga yang berlangganan telepon kabel: keluarga b. Keberadaan warga yang menggunakan telepon seluler/handphone: Sebagian besar warga - 1 Sebagian kecil warga - 2 Tidak ada - 3 ☐						
004	Keberadaan menara telepon seluler, sinyal telepon dan sinyal internet di desa/kelurahan ☐ a. Jumlah menara telepon seluler atau Base Transceiver Station (BTS): b. Jumlah operator layanan komunikasi telepon seluler/handphone yang menjangkau di desa/kelurahan: jenis c. Sinyal telepon seluler/handphone di sebagian besar wilayah desa/kelurahan: Sinyal sangat kuat - 1 Sinyal kuat - 2 Sinyal lemah - 3 Tidak ada sinyal - 4 → KUDS ☐ d. Sinyal internet telepon seluler/handphone di sebagian besar wilayah di desa/kelurahan: 3G/4G/LTE - 1 2G/H/HT/BYDO - 2 2.5G/E/GPRS - 3 Tidak ada sinyal internet - 4 ☐						
005	a. Kantor pos/pos pembantu/rumah pos: Beroperasi - 1 Jarang beroperasi - 2 Tidak beroperasi - 3 Tidak ada - 4 ☐ b. Layanan pos keliling: Ada - 1 Tidak ada - 2 ☐ c. Perusahaan/agen jasa ekspedisi (pengiriman barang/dokumen) swasta: Beroperasi - 1 Jarang beroperasi - 2 Tidak beroperasi - 3 Tidak ada - 4 ☐						
IX. EKONOMI							
901	a. Keberadaan pangkalan/agen/penjual minyak tanah (termasuk penjual minyak tanah keliling): Ada - 1 Tidak ada - 2 ☐ b. Keberadaan pangkalan/agen/penjual LPG (warung, toko, supermarket, penjual gas keliling): Ada - 1 Tidak ada - 2 ☐						
902	a. Jumlah bank yang beroperasi di desa/kelurahan 1. Bank Umum Pemerintah (BRI, BNI, Mandiri, BPD, BTN) ☐ 2. Bank Umum Swasta (BCA, Permata, Sinarmas, CIMB, dll) ☐ 3. Bank Perkreditan Rakyat (BPR) ☐ b. Jika tidak ada bank, perkiraan jarak ke bank terdekat: km						
903	Jumlah koperasi di desa/kelurahan yang masih aktif: a. Koperasi Unit Desa (KUD): ☐ b. Koperasi Industri Kecil dan Kerajinan Rakyat (Kopinkra)/Usaha mikro ☐ c. Koperasi Simpan Pinjam (KSP/Kospin) ☐ d. Koperasi lainnya ☐						
904	Fasilitas kredit yang diterima warga desa/kelurahan selama setahun terakhir: a. Kredit Usaha Rakyat (KUR) Ada - 1 Tidak ada - 2 ☐ b. Kredit Ketahanan Pangan dan Energi (KPP-E) Ada - 1 Tidak ada - 2 ☐ c. Kredit Usaha Kecil (KUK) Ada - 1 Tidak ada - 2 ☐ d. Kelompok Usaha Bersama (KUB) Ada - 1 Tidak ada - 2 ☐						

Lanjutan Lampiran 2.
Continued Appendix

905	Jumlah fasilitas ekonomi di desa/kelurahan	Jumlah	Jika tidak ada fasilitas ekonomi (khusus (2) terisi 0). Untuk mencapai fasilitas ekonomi terdekat	Kemudahan untuk mencapai: Sangat mudah -1 Mudah -2 Sulit -3 Sangat sulit -4
	Jenis fasilitas ekonomi		Jarak (km)	
	(1)	(2)	(3)	(4)
	a. Kelompok pertokoan (minimal 10 toko dan mengelompok dalam satu lokasi)			
	b. Pasar dengan bangunan permanen (memiliki atap, lantai, dan dinding)			
	c. Pasar dengan bangunan semi permanen (memiliki atap dan lantai, tanpa dinding)			
	d. Pasar tanpa bangunan (misalnya: pasar subuh, pasar teraseng, dll.)			
	e. Jumlah minimarket/swalayan/supermarket (tempat usaha di bangunan tetap untuk menjual berbagai jenis barang secara eceran dengan label harga, sistem pelayanan mandiri)			
	f. Restoran/rumah makan (usaha pangan siap saji di bangunan tetap, pembeli biasanya dikenai pajak)			
	g. Warung/kedai makanan/minuman (usaha pangan siap saji di bangunan tetap, pembeli biasanya tidak dikenai pajak)			
	h. Hotel (menyediakan jasa akomodasi dan ada restoran, penginapan dengan izin usaha sebagai hotel)			
	i. Penginapan: hotel/motel/rooming/wisma (menyediakan akomodasi, penginapan dengan izin usaha bukan sebagai hotel)			
	j. Toko/warung kelontong (tempat usaha di bangunan tetap untuk menjual berbagai jenis barang keperluan sehari-hari secara eceran, tanpa ada sistem pelayanan mandiri)			
906	a. Sumber penghasilan utama sebagian besar penduduk desa/kelurahan berasal dari lapangan usaha: Pertanian -1 Industri -2 → R907 Jasa -3 → R907			
	b. Jika sektor pertanian, jenis sub sektor utama sebagian besar penduduk desa/kelurahan: Tanaman Pangan -1 Peternakan -4 Jasa Pertanian -7 → R907 Tanaman Hortikultura -2 Perikanan -5 Tanaman Perkebunan -3 Kehutanan -6			
	c. Kondisi utama dari sub sektor utama sebagian besar penduduk desa/kelurahan:			
907	a. Jumlah industri mikro dan kecil (memiliki tenaga kerja kurang dari 20 pekerja)			
	b. Jumlah Sentra Industri: lokasi			
	c. Jika terdapat sentra industri, tuliskan produk pada sentra industri yang mempunyai muatan usaha terbanyak: (tuliskan)			
908	a. Keberadaan produk barang unggulan/utama di desa/kelurahan: Ada -1 Tidak ada -2 → R1001			
	b. Produk barang unggulan/utama desa/kelurahan: 1. Makanan (tuliskan) 2. Non Makanan (tuliskan)			
X. KEAMANAN				
1001	a. Kejadian perkelahian massal di desa/kelurahan selama setahun terakhir: Ada -1 Tidak ada -2 → R1003			
	b. Jika ada kejadian perkelahian massal, jumlah perkelahian massal yang terjadi			
	c. Keberadaan korban:			
	1 Meninggal: Ada -1 Tidak ada -2			
	2 Luka-luka: Ada -1 Tidak ada -2			
	d. Penyebab perkelahian: Pilihlah boleh lebih dari satu kode.			
	Rasis -A Asmara -C Keramaian (oleh raga, hiburan, dll.) -E Kekerasan -B Ideologi/impemayaan -D Ketidakepuasan atas kebijakan/pelayanan -F Lainnya -G			

Lanjutan Lampiran 2.
Continued Appendix

1002	Upaya penyelesaian permasalahan sosial dilakukan oleh: Pilihlah boleh lebih dari satu kode. Aparat keamanan - A Tokoh masyarakat - C Lainnya - E Aparat pemerintah - B Tokoh agama - D Tidak ada - F		A B C D E F					
1003	Kegiatan warga desa/kelurahan untuk menjaga keamanan lingkungan di desa/kelurahan selama setahun terakhir:							
	a. Pembangunan/pemeliharaan pos keamanan lingkungan:	Ya - 1	Tidak - 2					
	b. Pembentukan/pengaturan regu keamanan:	Ya - 1	Tidak - 2					
	c. Penambahan jumlah anggota hamip/linmas:	Ya - 1	Tidak - 2					
	d. Pelaporan tamu yang menginap lebih dari 24 jam ke aparat lingkungan:	Ya - 1	Tidak - 2					
	e. Pengaktifan sistem keamanan lingkungan berasal dari inisiatif warga:	Ya - 1	Tidak - 2					
XI. KEUANGAN DAN ASET DESA								
Blok ini akan terisi jika Blok III R 301, status pemerintahannya adalah Desa atau UPT/SPT atau Nagari								
1101	a. Keberadaan sistem informasi desa: Ada, diperbaharui - 1 Ada, tidak diperbaharui - 2 Tidak ada - 3							
	b. Jika ada (R1101a=1 atau 2), kapan terakhir diperbaharui bulan..... dan tahun.....							
	c. Penggunaan sistem keuangan desa: Ada, diperbaharui - 1 Ada, tidak diperbaharui - 2 Tidak ada - 3							
1102	Kepemilikan badan usaha dan aset desa:							
	a. Jumlah unit usaha BUMDes:							
	b. Tanah kas desa/diayut:		Ada - 1	Tidak ada - 2				
	c. Tambakan perahu:		Ada - 1	Tidak ada - 2				
	d. Pasar (pasar desa, pasar hewan, pelepasan ikan yang dikelola desa, pelepasan hasil pertanian):		Ada - 1	Tidak ada - 2				
	e. Bangunan milik desa (balai desa, balai rakyat, lapangan olah raga, dll):		Ada - 1	Tidak ada - 2				
	f. Hutan milik desa:		Ada - 1	Tidak ada - 2				
	g. Mata air milik desa:		Ada - 1	Tidak ada - 2				
	h. Tempat wisata/Pemandian umum:		Ada - 1	Tidak ada - 2				
	i. Aset desa lainnya (kekayaan asli desa lainnya, hibah/sumbangan/sewa lainnya dll):		Ada - 1	Tidak ada - 2				
1103	Jumlah peraturan desa tahun 2024:							
XII. KETERANGAN APARATUR PEMERINTAHAN DESA/KELURAHAN								
1201	Keberadaan kepala desa/lurah dan sekretaris kepala desa/lurah:							
	Pemerintah desa/kelurahan	Keberadaan Ada - 1 Tidak ada - 2	Jika ada pemerintah desa/kelurahan (kolom (2) berkode 1)					
			Umur (tahun)	Jenis kelamin Laki-laki - 1 Perempuan - 2	Pendidikan tertinggi yang ditamatkan			
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)			
	a. Kepala Desa/Lurah							
	b. Sekretaris Desa/Sekretaris Kelurahan							
	*) Kode kolom (5):		Tidak pernah sekolah - 1	SMP/Sederajat - 4	Diploma IV/S1 - 7			
			Tidak tamat SD/Sederajat - 2	SMA/Sederajat - 5	S2 - 8			
			Tamat SD/Sederajat - 3	Akademik/DIII - 6	S3 - 9			
1202	Jumlah aparatur pemerintahan desa/kelurahan:							
	a. Sekretariat Desa/Kelurahan		c. Pelaksana Kewilayahan					
	b. Pelaksana Teknis		d. Pegawai Desa/Kelurahan lainnya					
1203	a. Badan Permusyawaratan Desa/Lembaga Musyawarah Kelurahan:		Ada - 1	Tidak ada - 2	→ STOP			
	b. Jika ada (R1203a=1), apakah ada anggota yang perempuan:		Ada - 1	Tidak ada - 2				
	c. Jumlah kegiatan musyawarah desa/kelurahan yang dilakukan selama tahun 2024:							
XIII. CATATAN								

DATA

MENCERDASKAN BANGSA

Enlighten The Nation



**BADAN PUSAT STATISTIK
PROVINSI DKI JAKARTA
BPS-STATISTICS OF DKI JAKARTA PROVINCE**

Jl. Salemba Tengah, No. 36-38 Jakarta 10440
Telp (021) 31928493, 31928496

Homepage: <https://www.jakarta.bps.go.id> Email: bps3100@bps.go.id